

AMIRUDDIN MUSTAM

MANAJEMEN KURIKULUM



**IAIN PAREPARE
NUSANTARA PRESS**

MANAJEMEN KURIKULUM

Amiruddin Mustam

Penerbit



MANAJEMEN KURIKULUM

Penulis : Amiruddin Mustam

Editor : Syarifah Halifah

Layout : Muhammad Alfian

Cover : Muhammad Alfian

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights reserved

Cetakan: Pertama, November 2022

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang Kota Parepare,
Sulawesi Selatan 91132

Diterbitkan atas dukungan dari Institut Agama Islam
Negeri Parepare Tahun 2022

Cet, 1- Parepare, November **2022**

VII, 297 hlm: 14,8 cm x 21 cm

ISBN:

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis nyatakan kehadiran yang maha mulia, atas limpahan rahmat, dan hidayaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Manajemen Kurikulum yang didesain dalam bentuk buku ajar dalam lingkup Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare .

Manajemen kurikulum tidak akan terlepas dari kegiatan pembelajaran karena manajemen kurikulum tersebut merupakan usaha untuk mensukseskan suatu tujuan dalam pendidikan. Diperlukan adanya tatakelola yang berkaitan dengan lembaga pendidikan guna mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan secara maksimal.

Manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran khususnya kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen pembelajaran adalah suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan, yang meliputi: peserta didik, guru, bahan ajar, kurikulum, sarana prasarana, serta strategi pembelajaran. Dengan demikian manajemen kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain dalam suatu pendidikan, untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

Manajemen kurikulum adalah aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional, kurikulum sebagai sistem yang memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas. Implementasi dan tatakelola kurikulum pada tingkat lembaga atau sekolah, perlu dikembangkan secara integral dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Capaian Pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah, Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan tentang konsep dan praktik yang komprehensif dan terpadu tentang manajemen kurikulum ditingkat makro dan mikro pada satuan pendidikan. Dalam kaitan ini di bahas mengenai konsep konsep manajemen pendidikan dan konsep konsep kurikulum sehingga mahasiswa lebih memahami posisi keilmuan manajemen kurikulum secara komprehensif dalam tataran implementasi dengan menganalisis berbagai perubahan dan perkembangan manajemen kurikulum.

Buku ini telah kami susun dengan berdasar pada RPS. Dalam pembelajaran Manajemen Kurikulum dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penulisan Buku ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini

Akhir kata penulis berharap semoga buku ajar tentang Manajemen Kurikulum ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Parepare, 1 Oktober 2022

Penulis

Amiruddin Mustam

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN PERTAMA	
Konsep Dasar Manajemen Kurikulum.....	1
BAGIAN KEDUA	
Masalah dan Kendala Dalam Manajemen Implementasi Kurikulum.....	23
BAGIAN KETIGA	
Tahapan Dalam Manajemen Pengembangan Kurikulum.....	58
BAGIAN KEEMPAT	
Perencanaan dalam Manajemen Pengembangan Kurikulum.....	83
BAGIAN KELIMA	
Efektifitas Manajemen Implementasi Kurikulum	111
BAGIAN KEENAM	
Fungsi Manajer Dan Personil Manajemen Kurikulum..	120
BAGIAN KETUJUHH	
Inovasi Manajemen Implementasi Kurikulum	143
BAGIAN KEDELAPAN	
Kebijakan Pendidikan dan Mmajemen Implementasi Kurikulum 2013.....	157
BAGIAN KESEMBILAN	
Manajemen Pengembangan Kurikulum.....	245
BAGIAN KESEPULUH	
Peranan IT Dalam Manajemen Kurikulum.....	278
DAFTAR PUSTAKA	293

BAGIAN PERTAMA

KONSEP DASAR MANAJEMEN KURIKULUM

Bahasan 1 Konsep dan Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Cakupan Materi

- Hakekat manajemen Kurikulum
- Fungsi dan Tujuan Manajemen Kurikulum

Bahasan 2 Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Cakupan Materi

- Perencanaan Kurikulum
- Organisasi Kurikulum
- Implementasi Kurikulum
- Evaluasi Kurikulum

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran

Mampu Memahami Konsep dan Praktik yang Komprehensif dan Terpadu tentang Manajemen Kurikulum ditingkat Makro, Meso dan Mikro Pada Satuan Pendidikan

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran

- Mengembangkan dan Meningkatkan potensi, efektivitas, Mendesain dan Mengontrol implementasi kurikulum.
- Mahasiswa memahami Konsep dan Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum.

BAB I
KONSEP DASAR MANAJEMEN KURIKULUM

ALIRAN PENDIDIKAN	KONSEP KURIKULUM
1. Pendidikan Klasik <ul style="list-style-type: none"> a. Perenialisme (Eropa) b. Pendidikan untuk nigrat c. Liberal art (bukan hal-hal praktis) d. Hal-hal yang klasik e. Essensialisme (Amerika) Pendidikan untuk mencari nafkah	SUBJEK AKADEMIS
2. Pendidikan Pribadi <ul style="list-style-type: none"> a. Progresif (John Dewey) b. Learning by doing 	HUMANISTIK

<p>c. Student active learning</p> <p>d. Romantic-Naturalisme (J.J.Rousseau)</p> <p>e. Menekankan pada hukum alam</p> <p>f. Belajar menurut keinginan anak</p>	
3. Pendidikan Teknologis	TEKNOLOGIS
4. Pendidikan Interaksional	REKONSTRUKSI SOSIAL

Hakekat Manajemen Kurikulum

KURIKULUM SUBJEK AKADEMIS

Sumber: **Pendidikan klasik** (filsafat perenialisme, esensialisme)

1. Orientasi masa lalu
2. Asumsi: ilmu, nilai, budaya telah solid
3. Tugas pendidikan memelihara & mewariskan ilmu, nilai budaya
4. Guru adalah ekspret & model.

Karakteristik kurikulum:

1. Kurikulum menekankan isi/materi ajaran
2. Isi kurikulum berasal dari disiplin ilmu (solid sistematis)
3. Peranan guru sangat dominan
4. Penyajian: ekspositori & inkuiri



KURIKULUM HUMANISTIK

Sumber: **Pendidikan pribadi** (filsafat eksistensialisme)

1. Orientasi ke masa sekarang
2. Asumsi anak punya potensi
3. Pendidikan ibarat petani
4. Guru adalah psikolog

Karakteristik Kurikulum:

1. Siswa adalah subjek, punya peran utama
2. Isi/bahan sesuai minat/kebutuhan siswa
3. Menekankan kebutuhan pribadi
4. Penyampaian: discovery, inquiry, penekanan masalah



KURIKULUM TEKNOLOGIS

Sumber: **Pendidikan Teknologis** (filsafat realism)

1. Orientasi ke masa sekarang dan y. a. d
2. Menekankan kompetensi
3. Kompetensi diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati
4. Peranan guru tidak dominan (dapat diganti alat-alat teknologi)
5. Pendidikan bersifat ilmiah (science, experimental, terukur)
6. Pendidikan-sistem

Karakteristik Kurikulum:

1. Tujuan dirinci menjadi objektif
2. Menekankan kompetensi
3. Desain pengajar disusun sistematis (menggunakan analisis)

4. Isi disajikan dalam media tulis & elektronik
5. Evaluasi menggunakan tes objektif



KURIKULUM REKONSTRUKSI SOSIAL

Sumber: **Pendidikan Intraksional** (filsafat pragmatism)

1. Orientasi ke masa lalu dan sekarang
2. Asumsi: manusia mahluk social
3. Menekankan pemecahan problema masyarakat
4. Tujuan pendidikan pembentukan masyarakat lebih baik
5. Pendidikan adalah kerjasama: interaksi guru-siswa-siswa

Karakteristik kurikulum

1. Tujuan pemecahan masalah masyarakat
2. Isi kurikulum; problema dalam masyarakat
3. Metode mengajar kooperatif/gotong royong/kerja kelompok
4. Guru & siswa belajar bersama



MODEL DAN KONSEP KURIKULUM PENDEKATAN DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM SUBJEK AKADEMIS

1. Pendekatan berdasarkan struktur pengetahuan
2. Pendekatan bersifat integratif (integrated curriculum)
3. Tema yang membentuk kesatuan (unifying theme)
4. Menyatukan beberapa disiplin ilmu (contoh social studies)
5. Menyatukan berbagai metode belajar
6. Pendekatan fundamental
7. Mata pelajaran membaca menulis berhitung
8. Mata pelajaran lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis

MODEL DAN KONSEP KURIKULUM

Kurikulum Humanistik

Menekankan keutuhan pribadi, individu merespon secara utuh (pikiran, perasaan, tindakan) dasarnya Gestalt

Ciri:

1. Partisipasi
2. Integrasi
3. Relevansi
4. Pribadi anak
5. Tujuan: mengembangkan pribadi yang utuh

Metode belajar humanistik:

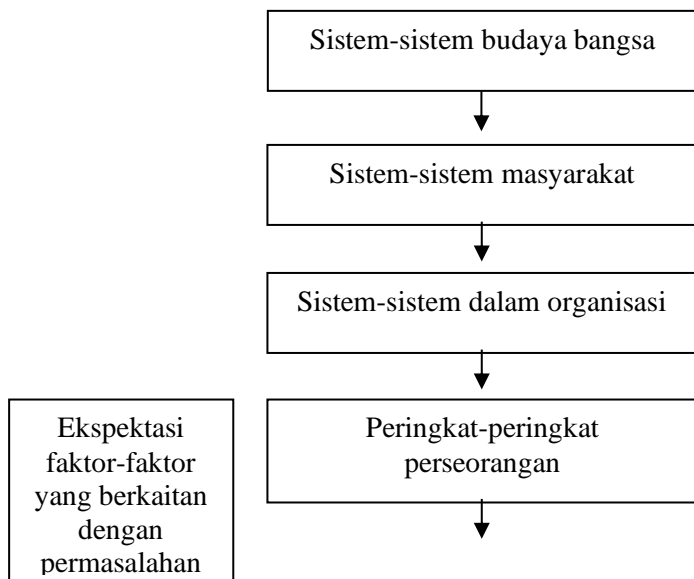
1. Mengidentifikasi topic/tema yang mengandung self-judgment
2. Materi disampaikan dalam bentuk open-ended

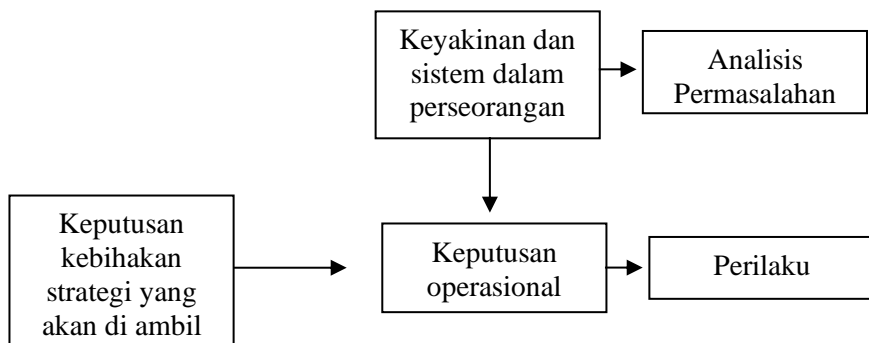
SISTEM PERUBAHAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN

No	Masyarakat Tradisional	Nilai Teori	No	Masyarakat Tradisional	Nilai Teori
1	Mistik sistematis	1. Pengalaman 2. Perasaan interaksi 3. Peralatan primitif 4. Kebiasaan	1	Analisis	1. Rasional 2. Ilmiah 3. Tehnologi 4. Efisiensi
2	Nilai Sosial	1. Pengalaman generasi 2. Status 3. Kekerabatan	2	Nilai Sosial	1. Pendidikan 2. Keahlian 3. Perestasi 4. Individu

3	Nilai Ekonomi	1. Insentif 2. Ekonomi 3. Kerja untuk sub system 4. Pola konsumtif	3	Nilai Ekonomi	1. Insentif 2. Ekonomi 3. Kerja keras 4. produktif
4	Nilai Kuasa	1. keputusan di ambil bersama 2. Orientasi pada stabilitas 3. Menolak perubahan	4	Nilai Kuasa	1. Keputusan di ambil sendiri 2. Orientasi pada kemajuan 3. Menerima perubahan
5	Nilai Agama	1. Fatalisme	5	Nilai Agama	1. Aktif memperbaiki nasib

Organisasi Sistem Pendidikan di Indonesia





1. Jenis-jenis Kurikulum

- a. Humanistic
 1. Student Orientied
 2. Integritas Intelektual Emosional tindakan
- b. Subjek akademik
 1. The knowledge centered desing
 2. Subjek centered
- c. corelated Rekonstruksi social
 1. Society centered
- d. Teknologi kurikulum
 1. Penguasaan iptek
 2. Pemanfaatan teknologi dalam software dan hardware
- e. Bentuk / Model Kurikulum
 1. Saparated subject curriculum
 - a. Correlated curriculum
 - b. Brood field curriculum
- f. Integrated curriculum

1. Activity curriculum
 2. Child centered curriculum
 3. Community centered curriculum
 4. Core general curriculum
- g. Separated subject curriculum
1. Separated subject curriculum adalah kurikulum yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah
 2. Subjek merupakan hasil pengalaman umat manusia
- h. Correlated curriculum
- Correlated curriculum adalah menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan lain dengan memelihara identitas mata pelajaran
- i. Brood field curriculum
- Brood field curriculum adalah menyatukan mata pelajaran dengan menghilangkan identitas mata pelajaran dalam bidang studi tertentu
- j. Integrated curriculum
- k. Integrated curriculum → integer: unit adalah membentuk anak-anak menjadi pribadi yang integrated atau problem solving (berfikir sendiri dari fakta)
1. Activity curriculum → Experience curriculum

2. Child centered curriculum adalah siswa sebagai sumber kurikulum atau segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum tidak lepas dari kehidupan siswa sebagai peserta didik
- I. Community centered curriculum
 1. Community centered curriculum adalah kebutuhan masyarakat harus dijadikan dasar dalam menentukan isi kurikulum
 2. Core curriculum / core general curriculum (pendidikan umum)

A. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial¹.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu².

¹Paul Harsey. 1988. Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources: h. 4

²Rusman, 2009: 3 Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) di tingkat lembaga pendidikan. MBS adalah otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, dengan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan khususnya kebijakan nasional dibidang kurikulum dan standar nasional dibidang pendidikan (SNP)³.

1. Ruang lingkup Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum, pengembangan, implementasi kurikulum dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat lembaga pendidikan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum dan standar nasional dibidang pendidikan, dan kebutuhan manajemen sekolah. Sehingga kurikulum dapat

³Syaiful Sagala. 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung : Alfabeta.

terintegritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah⁴.

2. Prinsip Manajemen Kurikulum.

Prinsip yang menjadi perhatian dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu:

- a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- b. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. Efektivitas dan efisiensi. Kegiatan manajemen kurikulum mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif

⁴ Rusman, 2009: 4 Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

efektif.

- d. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun departemen pendidikan nasional, seperti USPn No.20 tahun 2003, kurikulum pola nasional pedoman penyelenggaraan program kebijaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah, kebijaksanaan penerapan kurikulum nasional ditingkat satuan pendidikan.

Keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum⁵.

⁵ Rusman. 2009, Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 4..

3. Fungsi manajemen kurikulum

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
- c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru

maupun aktivitas peserta didik dalam belajar.

- e. Impelementasi kurikulum harus selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Sehingga ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun peserta didik selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara professional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat⁶.

⁶ Rusman, 2009. Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 5

LATIHAN

Pilihan Ganda

1. manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan definisi yang dikemukakan oleh
 - a. Rusman
 - b. Teguh
 - c. Hamalik
 - d. Malayu SP
2. suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Merupakan definisi.....
 - a. Manajemen
 - b. Kurikulum
 - c. Manajemen kurikulum
 - d. Peraturan
3. Yang termasuk ruang lingkup manajemen kurikulum adalah.....
 - a. Evaluasi Kurikulum
 - b. Peta Konsep
 - c. Rangkuman
 - d. Controlling
4. Yang termasuk prinsip manajemen kurikulum kecuali...

- a. Produktivitas
 - b. Substansi
 - c. Demokratisasi
5. Kooperatif Meningkatkan keadilan (equity)
Termasuk dalam hal.....
- a. Prinsip manajemen kurikulum
 - b. Pengertian manajemen kurikulum
 - c. Fungsi manajemen kurikulum
 - d. Bentuk manajemen kurikulum
6. Sebutkan bentuk-bentuk manajemen kurikulum....
- a. Produktivitas, Demokratisasi, Kooperatif
 - b. Pengertian, Ruang lingkup, Tugas
 - c. Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan
 - d. subject centered curriculum, Integrated Curriculum, Core curriculum
7. Apa yang dimaksud dengan Integrated Curriculum.....
- a. kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah.
 - b. kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi.
 - c. kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh.

- d. kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran
- 8. sebutkan contoh dari bentuk kurikulum Core curriculum...
 - a. Agama, Ppkn
 - b. Bahasa, Matematika, Ipa
 - c. Ipa,Ips,Sejarah
 - d. Sejarah, Perhitungan, Bahasa
- 9. Kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana
 - a. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan
 - b. Kurikulum sebagai reproduksi kultural
 - c. Kurikulum sebagai kumpulan tugas dan diskrit
- 10. Kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosia
Sudut pandang berbeda antara kurikulum lama dan kurikulum baru Pandangan kurikulum diatas dikemukakan oleh...
 - a. Nana
 - b. Rusman
 - c. Hamalik
 - d. Tegu
- 11. Sebutkan yang termasuk konsep manajemen kurikulum, kecuali
 - a. Substansi

- b. Sistem
- c. Bidang studi
- d. Administrasi

Essai Test

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kurikulum sebagai substansi !
2. Sebutkan dan berikan contoh bentuk-bentuk kurikulum !
3. Apa yang dimaksud dengan manajemen kurikulum ?
4. Siapakah yang berpendapat manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu?
5. Sebutkan prinsip manajemen kurikulum

BAGIAN KEDUA

MASALAH DAN KENDALA DALAM MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Bahasan: Masalah dan Kendala dalam
Manajkemen Implementasi Kurikulum

Cakupan Materi:

- Analisis Masalah
- Analisis Kendala
- Masalah Masalah Dalam Manajemen Implementasi Kurikulum

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu Memahami Konsep dan Praktik yang Komprehensif dan Terpadu tentang Mnajemen Kurikulum ditingkat Makro, Meso dan Mikro Pada Satuan Pendidikan

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB II

MASALAH DAN KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM

A. Identifikasi Masalah dan Kendala.

Implementasi kurikulum baru pada suatu lembaga pendidikan merupakan upaya inovasi yang akan mempengaruhi bukan saja tuntutan semakin meningkat terhadap kerja guru, tetapi juga semua perangkat yang di perlukan untuk pengembangan tersebut. Perangat atau unsur yang juga harus di libatkan antara lain peserta didik, pendanaan, sarana dan fasilitas pendidikan dan sebagainya.

Agar impementasi kurikulum lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, maka dalam pelaksanaannya perlu ditempuh langkah-langah yang sistematis mulai dari Identifikasi Masalah dan Kendala, Identifikasi dan seleksi Alternatif Pemecahan masalah yang dipilih, sampai pada pelaksanaan implementas

Upaya pengembangn dan implementasi kurikulum harus terlebih dahulu mengetahui tentang permasalahan-permasalahan dan kendala dan merumuskannya secara jelas. Pengenalan masing-masing permasalahan dan kendala hendaknya bisa di rumuskan secara rinci dan oprasional, seperti dalam bentuk hubungan sebab akibat antara

masalah yang terjadi dengan kendala yang menyebabkan munculnya masalah tersebut.

Sebagai contoh: Masalah masih banyak peserta didik yang belum menguasai kemampuan-kemampuan penting yang harus dikuasai mereka pada setiap akhir pembelajaran. Setelah kita ketahui permasalahannya, kemudian kita lihat, kita analisis kendala-kendala yang menjadi penyebabnya. Di antara kendala tersebut kemungkinannya:

- a. Beban kerja guru di luar tugas mengajar cukup berat.
- b. Kemampuan keuangan Sekolah terbatas.
- c. Kebanyakan murid berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran terbatas.

Contoh lain umpamanya: Banyak peserta didik yang kurang mampu menangkap atau menyerap materi pelajaran umum dibandingkan dengan daya serap mereka terhadap mata pelajaran agama atau sebaliknya. Bila hal ini tidak dicari terapisnya maka kemungkinannya tidak akan tercapai tujuan dari implementasi kurikulum.

Berdasarkan permasalahan, kemudian berusaha mengetahui berbagai kendala, untuk kemudian dianalisis apakah permasalahan tersebut

diakibatkan oleh kendala apa saja. Misalnya:

- a. Kebanyakan peserta didik bersal dari keluarga pedesaan yang tidak mampu memberikan informasi tentang pengetahuan umum
- b. Budaya lokal bahwa belajar agama adalah fardu 'ain, sedangkan pengetahuan umum fardu kifayah
- c. Alokasi waktu untuk mata pelajaran umum sangat terbatas
- d. Beban kerja guru cukup berat

Berdasarkan kendala-kendala yang ada dapat diketahaui mengapa permasalahan tersebut muncul, sehingga dapat mengidentifikasi jenis-jenis kendala yan dialami untuk masing-masing permasalahan. Apabila masing-masing kendala yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut sudah di ketahui, maka akan memudahkan guru dalam usaha pemecahannya.

B. Identifikasi dan Seleksi Alternatif Pemecahan

Sebelum menetpkan suatu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti dalam contoh di atas, perlu dianalisis terlebih dahulu berbagai alternatif cara yang dapat di tempuh. Berbagai alternatif memerlukan waktu dan proses tersendiri, dimana guru secara tekun dan serius

melakukan pengujian setiap alternatif atau kemungkinan yang akan di tempuh.

Jika sudah di temukan sejumlah alternatif cara, kemudian di lakukan seleksi dengan memperhitungkan berbagai kendala yang ada. Pada bagian ini akan di coba ntuk membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah yang berkenaan pengembangan dan implementasi kurikulum yang dihadapi guru.

Masalah kendala yang dihadapi:

- a. Kurang aktifnya peserta belajar dalam proses belajar
- b. Kurang mempunya murid menerapkan apa yan telah di pelajari
- c. Belum meratanya peningkatan kempuan hasil belajar di antara murid-murid di kelas
- d. Masih banyaknya murid yang belum menguasai kempuan-kempuan penting yang ingin dicapai pada akhir setiap satuan pelajaran
- e. Tidak terselesaikannya seluruh bahan kurikulum dalam penajaran
- f. Belum optimalnya penggunaan alat dan sumbeer belajar
- g. Sedikitnya perhatian terhadap murid-muridyang kurang pandai
- h. Terbatasnya jam pelajaran untuk setiap bidang studi

- i. Terbatasnya waktu para guru disebabkan oleh adanya tugas-tugas lain di luartugas mengajar
- j. Kurangnya dana tersedia di Madrasah
- k. Kurangnya jumlah guru terutama pada Madrasah di daerah terpencil
- l. Kurangnya peralatan yang dapat di sediakan Madrasah

Setelah kita berhasil membuat identifikasi permasalahan dan kendala, maka kita coba mengajukan alternatif yang dapat di tempuh untuk mengatasi masing-masing masalah / kendala sebagai berikut:

1. Kurang aktifnya murid dalam proses belajar, dengan alternatif pemecahan:
 - a. Guru mencoba mengembangkan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran.
 - b. Guru memberikan berbagai permasalahan yang harus di pecahkan bersama dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar, melalui pembelajaran aktif.
 - c. Guru memberikan berbagai tugas atau pekerjaan rumah yang harus di selesaikan peserta didik pada setiap pelajaran.
 - d. Guru emberikan penghargaan dan penilaian tersendiri kepada peserta didik yang aktif

- dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong peserta didik lainnya untuk aktif,
- e. Guru memberikan tugas dan tanggung jawab mempersentasikan di kelas secara individual maupun kelompok,
2. Kurang mampunya peserta didik menerapkan apa yang telah dipelajarinya, dengan alternatif pemecahan:
- a. Kemungkinannya karena peserta didik pasif sewaktu mengikuti proses belajar mengajar, sehingga perlu digalakkan pendekatan pembelajaran aktif.
 - b. Perlu dicek kembali kemungkinan bobot materi yang diberikan terlalu sarat atau terlalu sulit, sehingga sulit dicerna oleh mereka,
 - c. Perlunya variasi dalam proses belajar mengajar, sehingga murid terhindar dari rasa jenuh dan membosankan. Variasi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode, penggunaan alat peraga dan sebagainya
 - d. Perlu adanya pelajaran tambahan di luar jam sekolah sehingga murid dapat lebih memahami materi pelajaran karena mereka tidak terikat oleh waktu,

- e. Perlunya penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga apayang mereka terima di Madrasah tidak tersaing bahkan menyatu secara fungsional dengan kehidupan mereka,
3. Belum meratanya peningkatan kemampuan hasil belajar di antara peserta didik di kelas, dengan alternatif penyelesaian:
- a. Perlunya penggunaan metode simulasi dimana masing –masing murid secara individual dituntut terlibat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang diajukan terhadap dirinya,
 - b. Guru harus memberikan perhatian yang merata, khusus kepada murid yang kurang pandai. Kepada murid yang pandai bisa dimintakan untuk membantu temannya yang kurang pandai. Dengan demikian terjadilah interaksi antarmurid dalam bentuk tutor sebaya yang akan membantu pemerataan kemampuan murid,
 - c. Menyarankan murid yang kurang pandai untuk mencari guru privat atau guru mereka sendiri menyediakan waktu untuk les tambahan.
 - d. Peningkatan keterlibatan murid yang kurang pandai dalam proses belajar, sedangkan

mereka yang pandai hanya beberapa sebagai tutor.

4. Masih banyaknya peserta didik yang belum menguasai kemampuan-kemampuan penting yang ingin dicapai pada akhir setiap satuan pelajaran, alternatif yang bisa ditawarkan antara lain:
 - a. Peserta didik harus diberitahu secara jelas tentang hal-hal yang harus mereka kuasai pada akhir setiap satuan pelajaran. Sehingga murid mengetahui tujuan akhir yang harus dicapai.
 - b. Sebelum diadakan evaluasi (tes) gurur harus berkeyakinan bahwa murid sudah mencapai kemampuan diatas rata-rata (minimal 75 %). Hal ini dapat diketahui dari hasil tanya jawab/latihan mengenai materi yang telah diberikan.
 - c. Sebelum proses belajar di mulai sebaiknya di lakukan persepsi, atau diadakan semacam kuis untuk menetahi kemampuan/kesiapan murid. Dengan demikian materi yang di berikan akan lebih cocok/tepat, sebab kemampuan murid untuk menyerap pelajaran baru, sangat tergantung dengan konsep yang mereka kuasai sebelumnya,
 - d. Ada baiknya diadakan pre-test dan post-tes dalam setiap proses pengajaran, sehingga

dapat diketahui kemampuan murid sebelum dan sesudah proses belajar mengajar.

5. Tidak terselesaikannya seluruh bahan kurikulum dalam pengajaran, dengan alternatif penyelesaian:
 - a. Guru membuat pengelompokkan materi sejenis yang bisa di berikan atau diajarkan secara terpadu,
 - b. Gurur bisa memberikan pelajaran ekstra di luar jam pelajaran,
 - c. Memberikan latihan berupa soal-soal atau tugas pekerjaan rumah yang berkenaan dengan mata pelajaran yang belum terselesaikan,
 - d. Guru bisa menggunakan waktu luang (seperti hari ahad) untuk memberikan atau membahas materi yang masih belum di selesaikan.
6. Belum optimalnya penggunaan alat dan sumber belajar, dengan alternatif penyelesaian:
 - a. Memanfaatkan alat yang ada dengan sumber belajar yang tersedia, dengantujuan memanfaatkan lingkungan sebagai alat dan sumber belajar,
 - b. Mendidik murid untuk kreatif dalam mengembangkan keterampilan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat,

- c. Mendorong anak untuk secara kreatif membuat alat peraga meskipun dalam bentuknya yang sederhana dengan memanfaatkan potensi lingkungan alam, sosial, budaya maupun kehidupan beragama.
7. Sedikitnya perhatian terhadap peserta didik yang kurang pandai, maka alternatif penyelesaian:
- a. Guru lebih banyak melibatkan anak yang kurang pandai dalam proses belajar, sedangkan anak pandai bisa ditempatkan sebagai tutor,
 - b. Guru seharusnya memiliki rasa tanggung jawab atas ketidakberhasilan muridnya dalam proses belajar. Murid diberi kesempatan atau hak untuk mengajukan pengaduan kepada kepala sekolah, apabila dia merasakan dirinya kurang diperhatikan dalam proses belajar,
 - c. Guru bisa menyelenggarakan kegiatan ekstra khusus untuk anak-anak yang memerlukan perhatian tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan,
 - d. Mengaktifkan peran bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak khusus yang memerlukan perhatian.
8. Terbatasnya jam pelajaran untuk setiap bidang studi, dengan alternatif penyelesaian:

- a. Memberikan tugas-tugas kepada murid dengan petunjuk yang jelas, sehingga pada waktu tatap muka mereka sudah membaca atau mempelajarinya. Guru membantu pada hal-hal yang mereka memerlukan bantuan,
 - b. Menyuruh murid yang pandai atau berprestasi untuk membantu guru apabila guru berhalangan (tutor sebaya).
9. Terbatasnya waktu para guru disebabkan oleh adanya tugas-tugas lain di luar tugas mengajar, maka alternatif penyelesaian:
- a. Guru menyediakan waktu khusus diluar jam pelajaran,
 - b. Guru menyarankan agar murid mencari guru privat atau les tambahan,
 - c. Guru menyarankan kegiatan kelompok belajar dengan tutor sebaya.
10. Kurangnya dana tersedia di Sekolah, dengan alternatif pemecahannya:
- a. Meminta sumbangan sukarela kepada peserta didik dengan sepengetahuan kepala Madrasah serta berdasarkan kesepakatan orang tua murid,
 - b. Mengajukan dana kepada pemerintah yang berwenang,

- c. Mendorong penggalakkan sumber-sumber dana keagamaan untuk kegiatan Madrasah, seperti zakat, infaq, wakaf dan sebagainya.
11. Kurangnya jumlah guru terutama di daerah terpencil, dengan alternatif pemecahan:
- a. Mempersiapkan guru yang ada untuk mengajar beberapa mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan yang ada,
 - b. Merekrut tenaga honorer bagi mereka yang memiliki kemampuan atau yang bisa dididik untuk tugas mengajar di Sekolah,
 - c. Meminta bantuan murid yang mempunyai potensi untuk membantu teman-temannya dalam proses belajar.

Beberapa contoh permasalahan serta kemungkinan alternatif pemecahannya yang bisa dilakukan oleh guru pimpinan sekolah yang bersangkutan. Dengan merumuskan kendala dan permasalahan dan alternatif permasalahannya, sebagai upaya manajemen implementasi kurikulum di Sekolah akan dapat diterapkan melalui tahapan-tahapan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan diatasi serta kendala yang ada hendaknya dikaji secara teliti. Pilih masing-masing alternatif kemudian dikaji secara teliti kelemahan dan kekuatan serta kemungkinan-

kemungkinan penerapannya. Bagaimana hubungan antara permasalahan dengan alternatif pemecahan tersebut, apakah memang ada hubungan timbal balik, serta kemungkinan untuk dipilih sebagai alternatif pemecahan.

C. Masalah Dalam Manajemen Implementasi Kurikulum

Berbagai masalah yang termasuk dalam masalah umum dapat di kelompokkan menjadi delapan kelompok, yaitu bidang scope dan sekuensi, relevansi, keseimbangan, integrasi, kontinuitas, artikulasi, dan kemampuan transfer.

1. Bidang scope dan Sekuensi

Scope atau bidang cakup dapat didefinisikan sebagai luas kurikulum, yang di dalamnya mencakup berbagai topik, pengalaman belajar, aktivitas, pengorganisasian elemen-elemen, serta hubungan pengintegrasian antara

elemen elemen, serta hubungan pengintegrasian dan pengorganisasian berbagai elemen tersebut, yang harus di berikan kepada peserta didik di sekolah. *by scope is meant the breadth, variety, and types of education experiences that are to be provided pupils as they progress*

*through the programs*⁷. Untuk menentukan scope tersebut, para pengembang kurikulum dihadapkan pada sejumlah permasalahan berikut:

a. Pengorganisasian berbagai elemen kurikulum

Elemen scope adalah sebagai *the actual focal poin for learning through which the school's objectives are to attained*⁸⁹. Dari pengertian ini dapat di pahami bahwa unsur unsur scope merupakan hal-hal pokok yang harus di pelajari peserta didik di sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tyler menyarankan agar para pengembang kurikulum sebaiknya dapat mengorganisasikan hubungan antar elemen atau unsure scope tersebut, yang berupa konsep ilmu pengetahuan, dan berbagai keterampilan yang harus di berikan pada peserta didik. Dewasa ini masalah yang di hadapi adalah tidak terbatasnya konsep, pengetahuan dan keterampilan tersebut.

b. Pesatnya perkembangan IPTEK

⁷ J.G Saiylor dan W.M. Alexsander. Sebagai mana di kutip oleh Feter F Oliva 1992. Developing The Curriculum. United States: Harper Collins Publisher. h. 28

⁸ Feter F Oliva 1992. Developing The Curriculum. United States: Harper Collins Publisher.

⁹Feter F Oliva 1992. Developing The Curriculum. United States: Harper Collins Publisher.

Sebagai ujung tombak dari implementasi, kurikulum sudah sewajarnya guru terus mencermati keterbatasan materi pelajaran. Ini di karenakan dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung terus berkembang dan meningkat sedemikian pesatnya berkaitan dengan masalah ini A.J. Lewis, dikutip oleh Oliva, mengatakan bahwa :

if the information continuous at the present pace, by the time child botn today graduates from college the amount of information in the world will have increased 32 times, and 97 percent of everyting known in the world will have been learned since the child was born.¹⁰

Kutipan di atas dapat di mengerti bahwa ketika anak yang di lahirkan saat ini menamatkan bangku kuliah, maka dunia informasi yang akan di hadapi nanti sudah berkembang empat kali lipat. Ketika anak tersebut berumur 50 tahun, dunia

informasi menjadi berkembang 32 kali lipat. Padahal, 97 persen pengetahuan yang ada di dunia ini di peroleh anak semenjak ia di lahirkan. Hal ini jelas merupakan masalah tersendiri yang di hadapi para pengembang kurikulum dalam penentuan scope kurikulum yang akan di kembangkan sangat jelas,

¹⁰Feter F Oliva 1992. Developing The Curriculum. United States: Harper Collins Publisher.

bahwa scope kurikulum harus di kaitkan pada keadaan atau kondisi yang di alami siswa saat ini dengan prediksi berbagai kemajuan IPTEK di masa depan.

a. Penetapan prosedur tujuan

Caswel dan Campbell dalam Oliva, mengingatkan bahwa prosedur tujuan bukan hanya menyangkut pengalaman belajar, topik maupun organisasi dan hubungan antar elemen tetapi juga menyangkut lima tahapan berikut: penetapan tujuan yang inklusif

- 1) tujuan umum tersebut harus di rumuskan lagi ke dalam sejumlah pernyataan tujuan umum yang lebih kecil.
- 2) sejumlah pernyataan tersebut di terjemahkan ke dalam tujuan institutional.
- 3) selanjutnya, tujuan institutional tersebut di uraikan ke dalam tujuan permata pelajaran.
- 4) masing- masing tujuan permata pelajaran atau bidang study tersebut harus di uraikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yang selanjutnya di jabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran khusus perpokok bahasan, dengan ketentuan bahwa pernyataan tersebut dapat di ukur.¹¹

b. Pengambilan keputusan

Masalah lain yang di hadapi dalam penentuan

¹¹Feter F Oliva 1992

scope kurikulum adalah pengambilan keputusan tentang jadi atau tidaknya scope tersebut ditetapkan sebagai cakupan sebuah kurikulum. Dalam pengambilan keputusan tersebut, oliva mengajukan sebuah pertanyaan yang harus di pertimbangkan yaitu

- 1) apa yang sebenarnya di perlukan agar peserta didik dapat sukses di dalam masyarakat
- 2) kebutuhan-kebutuhan apa yang di butuhkan oleh daerah, bangsa, dan internasional.
- 3) hal-hal esensial apa yang harus di kerjakan¹²

2. Bidang Sequence

Sequence berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Bila scope mengacu pada apa, maka sekuens lebih mengacu pada kapan dan di mana pokok-pokok bahasan tersebut di tempatkan dan di laksanakan berikut adalah langkah-langkah sekuens.

- a. Mulai dari yang paling sederhana menuju yang kompleks
- b. Menuruti alur kronologis
- c. Balikan dari alur kronolog

¹² Caswel dan Campbell dalam Olive 1992

Mulai dari keadaan geografis yang dekat sampai dan yang jauh

- a. Dari jauh menuju dekat
- b. Dari konkret ke abstrak
- c. Dari umum menuju khusus
- d. Dari khusus menuju umum

Donald E. Orlosky dan B. Othanel Smith, mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep sekuens yaitu sekuens menurut kebutuhan, sekuens macro, dan sekuens mikro. Dalam proses sekuens, para pengembang kurikulum harus memperhatikan tingkat kedewasaan, latar belakang pengalaman, tingkat kematangan dan ketertarikan atau minat siswa, serta tingkat kegunaan dan kesukaran materi pelajaran¹³

3. Relevansi

Relevansi atau kesesuaian merupakan masalah lain yang cukup esensial dan harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan kurikulum, berikut adalah salah satu inter pretensi tentang relevansi yang di kemukakan oleh B.O. Smith:

The teacher is constantly asked: why should I learn that? What is the use of studying history? Why should I be rekuired to take biology? The

¹³Donald E. Orlosky dan B. Othanel Smith dalam Oliva, 1992

intent of these questions is to ask what use one can make of them in everyday activities, only general answers are possible. We can and do talk about the relevance of subject matter to the decisions and activities that pupils will have to make we know, among other things, they must : (1)Choose and follow a vocation (2)Exercise the tasks of citizenship (3 Engaged in personal relationship and(4)Take part in culture-carrying activities¹⁴

Pengertian relevansi dalam definisi diatas bermakna bahwa kata relevansi itu, harus dikaitkan dengan masalah dunia kerja, kependudukan, hubungan antarpribadi, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya yang menyangkut budaya, social, politik, dan sebagainya. Meskipun demikian, jelas terlihat bahwa masalah relevansi berkembang menurut kegunaan dan kebermaknaan satu kurikulum bagi orang dan masyarakat dan bangsa, bahkan bagi komunitas bangsa di dunia pada umumnya.

4. Keseimbangan

Dalam sulitnya mendefinisikan kata balance atau keseimbangan, oliva menunjukkan beberapa

¹⁴Feter F Oliva, 1992

variabel yang harus di pertimbangkan

- a. kurikulum yang berpusat pada peserta didik (child centered curriculum) dan kurikulum berpusat pada pelajaran (subject centered curriculum)
- b. kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat (needs as sessments)
- c. pendidikan umum dan pendidikan khusus
- d. luas dan dalamnya kurikulum
- e. tiga domain penting pendidikan kognitif, efektif, dan psikomotorik
- f. pendidikan individual dan pendidikan masyarakat
- g. inovasi dan tradisi
- h. logis dan psikologis
- i. kebutuhan yang diharapkan dan tidak di harapkan siswa
- j. kebutuhan akademis yang diharapkan
- k. metode, pengalaman, dan strategi
- l. cepatnya perubahan dan pergantian waktu atau masa
- m. dunia kerja dan permainan
- n. sekolah dan masyarakat sebagai sumber daya dalam pendidikan
- o. disiplin kelembagaan
- p. tujuan tujuan kelembagaan dan disiplin ilmu

Dikarenakan begitu banyaknya variabel yang menyangkut keseimbangan dalam pengembangan kurikulum tersebut, maka sudah dapat di pastikan bahwa hal ini juga telah menjadi suatu masalah yang tidak dapat di abaikan begitu saja oleh para pengembang kurikulum. Sebaliknya, justru merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian yang cukup maksimal.

5. Integritas

Para pengembang kurikulum harus perduli terhadap masalah pengintegrasian mata pelajaran. Pengintegrasian berarti memadukan mengembangkan dan menyatukn antardisiplin ilmu. Tyler, mendefinisikan integrasi sebagai berikut: *the organization of these experiences should be such that they help the student increasingly to get a unified view and to unity his behavior in relation to the elements deals with*¹⁵.

Sehubungan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Tyler tersebut, Taba juga menyatakan bahwa: *it is recognized that learning is more effective when facts and principles from one field can be related to another, especially when applying this knowledge*¹⁶.

¹⁵Feter F Oliva, 1992

¹⁶Taba, Hilda 1962. *Curriculum Development, Theory,*

Meskipun demikian, lain halnya dengan penentuan scope dan sekuens yang bersifat keharusan, pengintegrasian ini bersifat *optional*, dan kadang kadang bahkan *controversial*. Apakah kurikulum berkeinginan untuk mengintegrasikan pelajaran atau tidak, bergantung pada filosofi pengetahuannya.

Bagaimanapun juga, kurikulum adalah suatu hal yang terintegrasi. Kadar dan tingkat keintegrasian lebih di tentukan oleh dasar filosofis pengembang kurikulum, dibandingkan berdasarkan data empiris. Namun karena tidak semua guru berpandangan demikian, dengan alasan bahwa terdapat beberapa pelajaran yang harus di ajarkan secara terpisah maka kalangan progresif menawarkan agar para guru, sebagai pengembang kurikulum, memosisikan dirinya pada rangkaian.

Korelasi mata pelajaran, yaitu hubungan di antara mata pelajaran yang masih ada unsur keterpisahannya seperti dalam pengajaran sejarah dan sastra, matematika dan sains, serta seni, musik dan sastra. Korelasi akan menjadi integrasi jika identitas masing-masing di lepaskan .

Terdapat dua pandangan integrasi seperti yang di tawarkan oleh taba. Pertama seperti yang di

and Practice. New York: Hercout, Brace and World.
s

bahas sekarang ini terdapat hubungan horizontal antar pelajar. Dalam hal ini, Taba juga menyatakan bahwa: *Integration is also defined as something that happens to an individual*¹⁷.

Adapun pandangan kedua mengatakan bahwa :

*the problem then, is that of developing ways of helping individual in this process of creating a unity of knowledge. This interpretation of integration throws the emphasis from integrating subjects to locating the integrative threads*¹⁸

Perencana kurikulum harus memutuskan model pengorganisasian yang akan di gunakan, apakah korelasi atau integrasi mata pelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa *scope*, relevansi, keseimbangan, dan integrasi merupakan suatu rangkayan yang erat sekali kaitannya satu sama lain..

6. Kontinuitas

Kontinuitas merupakan pengulangan terencana tentang isi (content) untuk mencapai keberhasilan. Tyler mendeskripsikan kontinuitas

¹⁷Taba 1962. *Curriculum Development, Theory, and Practice*. New York Hercout, Brace and World.

¹⁸Taba 1962. *Curriculum Development, Theory, and Practice*. New York: Hercout, Brace and World.

sebagai pengulangan vertical dari elemen atau unsur kurikulum.

Pada dasarnya, prinsip kontinuitas menyerupai dengan apa yang disebut spiral curriculum, yaitu pengenalan konsep keterampilan, dan pengetahuan secara berulang, dalam permasalahan kontinuitas ini, dibutuhkan tingkat keahlian yang tinggi dari perencana kurikulum, baik menyangkut pengetahuan terhadap materi pelajaran (subject matter), maupun pengetahuan tentang siswanya. Kontinuitas bukanlah semata-mata pengulangan content pelajaran, melainkan merupakan pengulangan yang kompleks dan *shopisticated* dalam upaya peningkatan hasil belajar.

7. Artikulasi

Artikulasi di artikan sebagai pertautan antar kelompok elemen atau unsur lintas tingkatan sekolah. Contohnya dapat di lihat antar SD dan SLTP, SLTP dan SMA, serta antara SMA dan Perguruan tinggi, yang juga tak lepas dalam dimensi sekuens seperti halnya kontinuitas.

Oliva, menjelaskan pengertian artikulasi sebagai artikulasi horisontal atau korelasi, sedangkan kontinuitas sebagai artikulasi vertikal. Dari

pengertian ini dapat diketahui bahwa antara sekuensi, kontinuitas, dan artikulasi terdapat kaitan satu dengan lainnya sekuens merupakan pengaturan unit-unit dan materi pelajaran secara logis dan kronologis menurut unit, lembaga dan tingkatannya. Kontinuitas merupakan rencana introduksi dan reintroduksi unit-unit materi yang sama di berbagai tingkatan dalam upaya meningkatkan pemahaman yang kompleks dan komprehensif. Adapun artikulasi merupakan rencana sekuens unit-unit materi pelajaran tersebut secara lintas tingkatan.

8. Kemampuan Transfer

Segala hal yang di berikan sekolah pada hakikatnya merupakan proses pentransferan nilai, maksudnya apapun yang di pelajari di sekolah seharusnya harus dapat diaplikasikan di luar sekolah, saat siswa sudah menamatkan pendidikannya. Dengan demikian, proses pendidikan di sekolah harus dapat memperkaya kehidupan siswa.

- a. Para ahli pendidikan seperti Thorndike, Daniel dan L. N. Tanner serta Taba menyepakati bahwa jika guru hendak mentransfer nilai-nilai tersebut, maka terlebih dahulu harus diperhatikan prinsip-prinsip umum dari proses transfer yaitu: Transfer merupakan hati nurani pendidik proses

transfer memungkinkan untuk dilakukan

- b. proses transfer di mulai dari situasi yang lebih dekat ke situasi luar kelas yang lebih jauh dan luas
- c. hasil transfer akan lebih bermakna jika guru membantu peserta didik dalam menderivasi, generalisasi, serta menetapkan generalisasi tersebut dan secara umum, dapat di katakan bahwa ketika siswa memperoleh pengetahuan bagi dirinya, proses transfer tersebut telah berhasil.¹⁹

Transferability merupakan prinsip dari pengajaran dan sekaligus juga perinsip dari kurikulum. Pada saat membicarakan metode mengajar transferability, berarti kita memasukan wilayah proses pengajaran. Pada saat menganalisis hal yang di transferkan, maka kita telah memasuki wilayah kurikulum, oleh karena itu para pengembang kurikulum harus menentukan tujuan, menyeleksi isi atau materi, dan memilih setrategi pengajaran yang mengarah pada pendaya gunaan proses transfer secara maksimal, selanjutnya, dalam perencanaan evaluasi kurikulum juga harus di masukkan ukuran tingkatan transfer dari berbagai segmen dalam kurikulum.

¹⁹Feter F Oliva 1992.

D. Masalah Khusus

1. Kaitannya dengan pengembangan kurikulum, beberapa masalah berikut perlu di pahami secara seksama berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan dan hasil-hasil kurikulum yang di harapkan oleh sekolah seperti :
 - a. untuk siapa kurikulum itu di sediakan.
 - b. apakah kurikulum tersebut bermaksud mendidik peserta didik agar mampu mengendalikan diri, atau agar mereka mampu mengikuti perubahan social
 - c. apakah kurikulum bersifat mendoktrinasi.
 - d. apakah kurikulum bermaksud mempersiapkan peserta didik untuk masa depannya, atau untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan sekarang ini.
 - e. Apakah kurikulum memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau perorangan
 - f. Apakah kurikulum berkenaan dengan permasalahan yang controversial
 - g. Apakah kurikulum disesuaikan dengan minat dan kebutuhan perorangan atau umum
 - h. Apakah kurikulum berkenaan dengan pendidikan umum atau dengan pendidikan khusus
 - i. Apakah kurikulum dinyatakan sebagai usaha pencapaian tujuan-tujuan pendidikan, dan

pengajaran

- j. Apakah tujuan-tujuan tersebut diperbaiki guna mencapai hasil pendidikan yang lebih baik.
2. berbagai masalah yang berhubungan dengan isi dan organisasi kurikulum yang terdiri atas:
- a. ukuran yang di gunakan dalam memilih bahan dan pengalaman-pengalaman kurikuler
 - b. apakah kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran atau pengusahaannya adanya korelasi dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kurikulum tersebut
 - c. jenis-jenis kegiatan dan pengalaman yang terdapat dalam kurikuler.
 - d. Jenis kurikulum yang digunakan.
 - e. Pengalaman-pengalaman yang diwajibkan dan yang bersifat pilihan
 - f. Apakah dalam kurikulum terdapat pelajaran-pelajaran khusus
 - g. Berbagai pelajaran yang diperlukan untuk kenakikan kelas, dan cara perbaikan seleksi dan organisasi bahan-bahan pelajaran dan pengalaman belajar.
3. Masalah yang berhubungan dengan proses penyusunan dan revisi kurikulum, seperti :
- a. Cara pengadaan artikulasi dan korelasi,
 - b. Awal penyusunan dan revisi kurikulum

- c. Sumber-sumber informasi yang dapat di manfaatkan untuk penyusunan kurikulum.
- d. Pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam perubahan dan penyusunan kurikulum
- e. Pihak yang akan memberikan latihan dalam pengelolaan kurikulum dan dalam bentuk pelaksanaan latihan tersebut
- f. Langkah-langkah yang akan di lakukan dalam menadakan perubahan kurikulum secara menyeluruh, dan
- g. Cara perbaikan peroses penyusunan kurikulum

E. Peran Guru Dalam Manajemen dan Implementasi Kurikulum

Dalam studi tentang ilmu mengajar dan kurikulum, pembahasan mengenai permasalahan yang dialami guru senantiasa mendapat tempat tersendiri. Ini di karenakan guru mengemban peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Bahkan berdasarkan pandangan yang ada sekarang ini, betapapun bagus dan indahnya kurikulum keberhasilan kurikulum tersebut pada akhirnya bergantung pada masing masing guru.

Pengembangan kurikulum melibatkan banyak pihak, terutama guru yang bertugas di kelas. Setiap guru mengemban tanggungjawab secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian,

pengadmimistrasian, dan perubahan kurikulum sejauh mana keterlibatan guru akan turut menentukan keberhasilan pengajaran di sekolah.

Sejauh manakah peran guru dalam perencanaan kurikulum? Kurikulum di susun oleh suatu lembaga tertentu (di Indonesia, kurikulum disusun oleh BP3K), yang umumnya dirancang oleh ahli kurikulum dengan bantuan ahli psikologi belajar dan ahli bidang studi. Para guru bidang studi yang dianggap telah memiliki pandangan yang luas biasanya di ikutsertakan dalam penyusunan kurikulum tersebut. Kepada mereka, dimintakan saran-saran sesuai dengan pengalaman mereka dalam melaksanakan kurikulum di sekolah

F. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kurikulum

Implementasi Kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya.
2. Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataan, lokakarya penyediaan buku kurikulum dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong

penggunaan kurikulum di lapangan.

3. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran

Implementasi kurikulum diperkukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional guru sebagai salah satu implementator kurikulum. Marsh mengemukakan tiga faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas²⁰. Dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu utama. Keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru, dan kekuatan sarana dan prasarana pendidikan.

²⁰David Marsh. 1980 *The Quattrocento Dialogue Classical Tradition and Humanist Innovation*. Harvard University Press.

LATIHAN

Essai Test

1. Uraikan apa yang dimaksud dengan scope dan sequence, dan mengapa keduanya menjadi masalah penting dalam penyusunan kurikulum?
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum. Apakah guru-guru diikuti sertakan dalam perbaikan kurikulum di sekolahnya?
3. Dalam system pendidikan kita dewasa ini, apakah hal tersebut dimungkinkan? Tunjukkanlah bukti-bukti nyata yang mendukungnya!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kurikulum?
5. Jelaskan apa yang dimaksud Implementasi Kurikulum?

Pilihan Ganda

1. Strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataan dan lokakarya penyediaan buku kurikulum dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan disebut...
 - a. Strategi Implementasi
 - b. Implementasi Kurikulum
 - c. Kurikulum
 - d. Implementasi

2. Pengulangan terencana tentang isi (content) untuk mencapai keberhasilan disebut...
 - a. Kontinuitas
 - b. Artikulasi
 - c. System Kurikulum
3. Implementasi Kurikulum Susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum disebut...
 - a. Sekuens (Sequence)
 - b. Artikulasi
 - c. Kontinuitas
 - d. System Kurikulum
4. Prinsip dari pengajaran dan sekaligus juga prinsip dari kurikulum disebut...
 - a. Transferability
 - b. Kontinuitas
 - c. Artikulasi
 - d. Kurikulum

BAGIAN KETIGA

TAHAPAN DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Tahapan Perencanaan
- Tahapan Pengorganisasian
- Tahapan Pelaksanaan
- Tahapan Pengendalian

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori teori dalam tahapan tahapan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB III

TAHAPAN DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum sangat menentukan bagi pembinaan kepribadian anak dan mempersiapkan mereka agar siap hidup bermasyarakat, karena semua bahan pengajaran yang akan di berikan kepada anak tertuang dalam kurikulum. Karenanya dalam peerencanaan kurikulum selalu didasarkan pada faktor faktor sebagai berikut:

- a. Faktor filosofis
- b. Faktor psikologis
- c. Faktor sosiologis, dan
- d. Faktor organisasi atau bentuk kurikulum

a. Faktor filosofis

Faktor atau landasan filosofis dimaksudkan agar dalam menyusun rencana kurikulum hendaknya berpegang atau berlandaskan nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam hidup dan kehidupan seseorang dan masyarakat. Nilai-nilai filosofis biasanya bersumber pada ajaran agama atau nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat

Dengan berlandaskan nilai-nilai filosofis, akan menjawab beberapa pertanyaan antara siapa

manusia,ra lain, untuk apa manusia hidup, akan kemana setelah hidup, apa yang harus, dan apa yang tidak pantas dilakukan.

Dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasilaharus secara konsisten dijadikan landasan dalam penyusunankurikulum. Sebagai contoh, nilai-nilai ketuhanan Ynag maha Esa, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan yang lebih rinci dan oprasional.

Seperti dalam konsep manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang maha Esa, masih memerlukan kejelasan sebagai wujud manusia yang beriman dan bertaqwa?. Bila memungkinkan dimunculkan dalam bentuk indikator-indikator, seperti beribadah, memilih tanggung jawab sosial, jujur, disiplin dan sebagainya. Demikian pula ha-hal yang tidak patut di lakukanoleh orang beriman dan bertaqwa. Dengan demikian bagi merekayang akan merumuskan kurikulum harus benar-benar menghayati landasan filosofis tersebut. Demikian pula dengan guru dan pimpinan sekolah sebagai pelaksana kurikulum harus secara sadardan memahami landasan tersebut, sehingga apa yang dilakukan dalam tugas-tugasnya di landasi oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, atau nilai-nilai yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. sehingga dengan sendirinya masyarakat dilibatkan secara filosofis dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

b. Faktor psikologis

Pendidikan pada dasarnya berkenaan dengan upaya perubahan perilaku manusia menuju kedewasaan baik secara fisik, mental, intelektual, moral maupun sosial. Proses perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan dan kesiapan anak, faktor lingkungan, sosial dan sebagainya.

Kemampuan anak dalam menerima program-program kurikulum sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan jiwa anak. Karena itu penentuan program kurikulum baik keluasan maupun kedalamannya harus sesuai dengan kekuatan psikologis anak. Penjenjangan lembaga pendidikan pada dasarnya dibuat berdasar pada prinsip-prinsip psikologis belajar. Atau dengan kata lain pentingnya landasan atau faktor psikologis dalam kurikulum terutama dalam: (a) bagaimana kurikulum harus disusun, (b) bagaimana kurikulum diberikan dalam bentuk pengajaran dan (c) bagaimana proses belajar anak dalam mempelajari kurikulum.

c. Faktor Sosiologis

Proses pendidikan pada hakikatnya membangun anak agar memiliki kesiapan untuk menjadi warga

masyarakat mandiri dan bermartabat. Kesiapan tersebut antara lain anak-anak harus mengetahui nilai-nilai, norma, tata aturan yang berlaku dalam masyarakat. Mereka juga perlu disiapkan dengan berbagai fungsi dan peran yang harus dilakukan setelah mereka berada di masyarakat.

Berdasarkan arah dan tujuan tersebut, maka pendidikan harus menjadikan masyarakat sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam manajemen kurikulum. Karenannya perlu adanya keseimbangan antara kepentingan anak sebagai individu dan kepentingan anak sebagai warga masyarakat. Karenanya perlu dicegah adanya kurikulum yang semata-mata diarahkan pada *society-centered*, yaitu kurikulum yang semata-mata mementingkan masyarakat, tanpa memperhitungkan kepentingan individu anak.

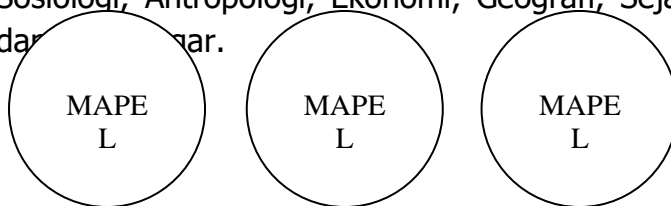
Landasan sosial budaya bukan hanya diperlukan semata-mata dalam pengembangan kurikulum tingkat nasional, melainkan juga bagi guru dalam pembinaan di sekolah bahkan sampai dalam tingkat pengajaran.

d. Faktor organisasi, dan bentuk kurikulum.

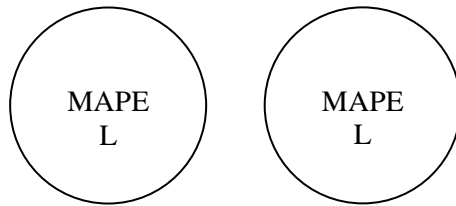
Manajemen kurikulum dari sisi faktor organisasi,

berorientasi pada bentuk penyajian bahan pelajaran atau organisasi kurikulum. Manajemen organisasi kurikulum desain dan pengembangannya mengacu pada empat pola, yaitu: (1) Kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang lebih dikenal dengan *separated subject curriculum*. (2) Kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang dihubungkan-hubungkan (*correlated subject curriculum*) (3) Kurikulum yang terdiri dari peleburan (fusi) sejumlah mata pelajaran sejenis (*broad field*) (4) dan kurikulum integrasi (*integrated curriculum*)²¹.

Manajemen kurikulum dengan mata pelajaran terpisah (*separated subject curriculum*) bahan kurikulum dituangkan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, semakin menyempit serta tidak atau kurang dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Dengan demikian semakin banyak jenis mata pelajaran yang harus diambil oleh anak. Sebagai contoh dalam ilmu sosial, ada mata pelajaran Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan lain-lain.

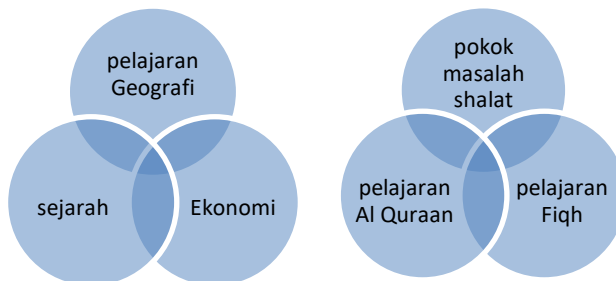


²¹S. Nasution. Asas Asas Kurikulum Cetakan kedua Bumi Aksara. 2014 h. 136



Gambar 1: *Separated Subject Curriculum*

Pada *Correlated curriculum* sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, pada mata pelajaran geografi dapat dihubungkan dengan mata pelajaran sejarah dan ekonomi, demikian halnya dalam mata pelajaran shalat bisa di hubungkan dengan mata pelajaran al Quraan dan Hadis. Pada saat mempelajari shalat bisa dihubungkan dengan pelajaran al Quraan surah al Fatiha dan surah lainnya, hadis yang berkenaan dengan shalat, dan seterusnya. Untuk jelasnya bisa terlihat dalam gambar.



Pada pelajaran 'geografi' disinggung
Soal sejarah ilmu ekonomi, dan sebagainya

soal shalat dibicarakan
dalam pelajaran fiqh atau
pada jam pelajaran
Al Quran

Gambar 2: *Correlated Curriculum*

Pada *broad field* sejumlah mata pelajaran dilebur menjadi satu bidang studi, sehingga memperkecil jumlah mata pelajaran tetapi lebih memperluas ruang lingkup tiap bidang studi yang ada.

Di dalam kurikulum sekarang kita mengenal lima macam bidang studi yang menganut *broad field* yaitu:

- a. Ilmu pengetahuan alam, peleburan dari mata pelajaran ilmu alam, ilmu kimia, dan ilmu kesehatan
- b. Ilmu pengetahuan sosial, peleburan dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, civic hukum ekonomi dan sejenisnya.
- c. Bahasa, peleburan dari mata pelajaran membaca, tata bahasa, menulis, mengurang, menyimak pengetahuan bahasa.
- d. Matematika, peleburan dari berhitung, aljabar, ilmu ukur sudut, bidang, ruang dan statistik.
- e. Kesenian, peleburan dari seni tari, seni suara, seni klasik, seni pahat dan kesenian drama.

Pendidikan agama di sekolah umum seperti SD.

SMP. dan seterusnya, dilihat dari penyatuannya beberapa mata pelajaran fiqh, tauhid, ahklak, tarikh dan membaca al-Quraan, maka pendidikan agama termasuk menganut sistem *broad field*. Demikian pula dengan pelajaran bahasa arab, yang merupakan peleburan dari qiraat, muhadatsah, ilma, khat, muthalaah, dan sebagainya termasuk dalam *broad field*.

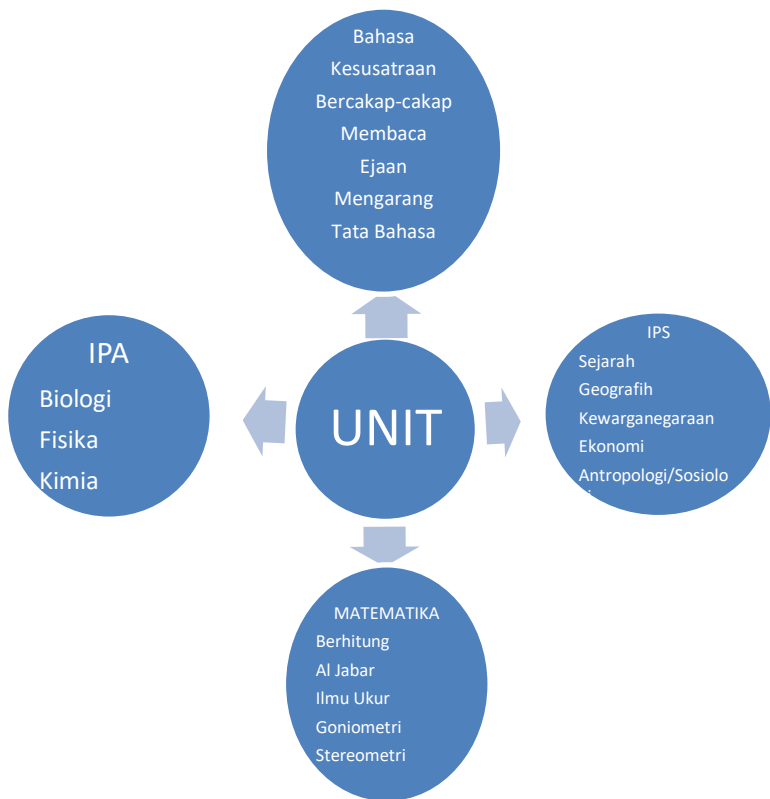
Manajemen mata pelajaran juga dapat dilihat dalam bentuk kurikulum integrasi. Kata integrasi berasal dari kata integer yangt berarti unit, dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan, dan keseluruhan.²² Integrasi kurikulum meniadakan batas batas antar berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit dan keseluruhan.

Kurikulum integrasi dilaksanakan dalam bentuk unit, menurut Caswell sebagaimana di kutip S Nasution unit adalah, “ *a series of related activities engaged in by children in the process of realizing a dominating purpose which is compatible with the aims of education*”²³ suatu unit mempunyai tujuan

²²S. Nasution. Asas Asas Kurikulum Cetakan kedua Bumi Aksara. 2014 h. 155

²³S. Nasution. Asas Asas Kurikulum Cetakan kedua Bumi Aksara. 2014 h. 155

yang bermakna bagi peserta didik yang biasanya dituangkan dalam bentuk masalah, yang dapat merangsang untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah itu.



Gambar 3 Kurikulum Unit tanpa batasan bidang bidang ilmu, disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan pembelajaran pada setiap unit.

Unit tidak terbatas pada suatu atau beberapa mata pelajaran, melainkan menggunakan segala macam bahan untuk memecahkan soal-soal yang terkandung dalam unit itu. Dalam kurikulum ideal batas-batas antara mata pelajaran selalu ada karena itu ahli kurikulum dalam usaha menyusun kurikulum selalu memberi batasan pada setiap bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak terdapat batas-batas itu. Karena itu dalam kurikulum unit, setiap unit disusun dengan bidang ilmu yang sesuai dengan tujuan unit pembelajaran. Peserta didik mempelajari berhitung, sejarah, geografi, ilmu alam bahasa dan sebagainya. Jadi masalah itu dipecahkan secara inter-disipliner. Bahan ajar digunakan dari berbagai sumber seperti:

1. *Dari lingkungan sekitar*: toko, arca, kebun binatang, kantor pos, taman-taman, lapangan terbang, sawah, station dan sebagainya.
2. *Dari orang-orang* yang dapat memberikan keterangan: tukang kayu, tukang becak, kepala kantor saudagar, dan sebagainya.
3. *Dari alat-alat peraga*: globe, peta, daftar-daftar, gambar, jika mungkin film, radio, dan sebagainya.
4. *Dari bacaan*: buku, Jurnal majalah, surat

kabar, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, Mahasiswa telah mengenal empat bentuk pengorganisasian kurikulum yang cocok untuk jenjang tertentu di samping masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat diskusikan dalam diskusi kelompok kuliah.

2. Prinsip Prinsip Manajemen Pengembangan Kurikulum

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa proses pendidikan merupakan upaya mendewasakan seseorang agar memiliki kematangan baik fisik, mental, moral dan sosial, sehingga yang bersangkutan siap hidup bermasyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri senantiasa berubah dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang semakin maju. Sehingga pendidikan sendiri memerlukan penyesuaian, inovasi dan pengembangan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakatnya.

Agar pendidikan selalu relevan dan fungsional, maka dalam menentukan isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

²⁴Mahasiswa dapat memperdalam bacaannya tentang kurikulum unit dalam buku Asas Asas Kurikulum. S. Nasution Edisi 2 Bumi Aksara 2014 h. 155 – 178.

Karenanya dalam pengembangan kurikulum diperlukan kriteria dan persyaratan tertentu, agar isi kurikulum sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Ada beberapa kriteria yang dapat di gunakan dalam mengembangkan isi kurikulum, yaitu:

- a. Isi kurikulum harus sahih (valid) dan terpercaya (signifikan).
- b. Isi kurikulum harus berpegang pada kenyataan-kenyataan sosial
- c. Harus seimbang antara kedalaman dan keluasan kurikulum
- d. Isi kurikulum menjangkau tujuan yang luas, meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap
- e. Isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman anak
- f. Isi kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan dan menarik minat anak.

Selain adanya validitas dan signifikansi dalam pengembangan kurikulum, juga diperlukan adanya akuntabilitas dalam tatakelola sekolah, artinya menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan. Akuntability berarti kewajiban pembuat keputusan untuk : (1) tanggap atas kebutuhan pengguna jasa layanan pendidikan, (2) kemampuan pengguna jasa untuk meminta pertanggungjawaban

kepada pembuat kebijakan atau kepala sekolah atas keputusan mereka. Setiap komponen sekolah didorong untuk terbuka, kreatif, dan inifatif sehingga memungkinkan tercapainya visi dan misi dalam sistem manajemen sekolah.²⁵

3. Tahapan Dalam Manajemen Pengembangan Kurikulum

Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

1. Pengembangan program mencakup program tahunan, semester atau catatan harian, mingguan, dan bulanan. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial.
2. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut.
3. Evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang

²⁵Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta. 2009. h. 107.

proses pelaksanaan kurikulum atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumilatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.²⁶

1. Manajemen Pengembangan Tingkat Institusional

Pada dasarnya sebelum guru melaksanakan proses belajar-mengajar terlebih dahulu harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas bukan saja memudahkan guru dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan, tetapi juga mempunyai manfaat besar dalam pengembangan kurikulum.

Pengembangan kurikulum pada dasarnya dimulai dari tingkat institusional atau kelembagaan. Karena pada jenjang ini, program pendidikan dimulai dikembangkan dan dirinci secara operasional. Pengembangan kurikulum tingkat kelembagaan dimulai dengan perumusan tujuan yang jelas. Rumusan tujuan masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat dalam buku kurikulum setiap jenjang pendidikan.

Tujuan yang jelas akan memungkinkan penentuan, menseleksi materi kurikulum yang

²⁶Hamalik, 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 239

relevan utk menunjang pencapaian tujuan tersebut. Materi kurikulum bisa dilihat dari jenis mata pelajaran atau bidang studi, keluasan dan kedalamannya sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum yang dianut. Tyler dan Hilda Taba, menyatakan bahwa tujuan yang jelas akan berfungsi memandu dalam menentukan isi kurikulum, bentuk-bentuk pengalaman belajar yang ingin dicapai peserta didik, dan penetapan kriteria yang digunakan dalam menentukan apa yang harus diajarkan serta bagaimana mengajarkannya.

Rumusan Tyler dan Hilda Taba tersebut dapat dilihat dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan, yang mencantumkan tujuan-tujuan kurikulum, bahan pengajaran, kapan diberikan, metode, sampai kepada sistem penilaian.

Pengembangan kurikulum pada tingkat kelembagaan di negara-negara berkembang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk sekolah-sekolah yang berada di lingkungan dan menjadi tanggung jawab Kemendiknas (SD, SMP, SMA, dan SMK). Demikian pula lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Agama, maka pengembangan kurikulum tingkat kelembagaan dilakukan oleh Kemenag.

Dari rumusan hasil pengembangan tingkat

institusional atau kelembagaan tersebut, kemudian oleh guru dijabarkan kembali secara lebih terinci. Karenanya pada tingkatan pengembangan kurikulum yang paling rendah pun, yaitu tingkat pengajaran guru selalu mengawalinya dengan merumuskan tujuan yang lebih kongkrit dan jelas. Tujuan yang kongkrit dan jelas mencakup jenis kemampuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan setelah peserta didik mengikuti proses belajar-mengajar.

Pada pengembangan kurikulum tingkat pengajaran, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sehubungan dengan pengembangan kurikulum tingkat pengajaran, yaitu:

- a. Menganalisis tujuan berdasarkan apa yang tertuang dalam kurikulum
- b. Mengembangkan alat evaluasi berdasarkan tujuan
- c. Merumuskan bahan yang sesuai dengan isi kurikulum
- d. Merumuskan bentuk kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik.
- e. Melaksanakan apa yang telah diprogramkan.

2. Manajemen Pengembangan tingkat Mata Pelajaran

Pengembang tahap kedua adalah

pengembangan kurikulum tingkat mata pelajaran. Pengembangan pada tingkat mata pelajar dimaksudkan agar setiap mata pelajaran secara efektif dan konsisten dapat menunjang pencapaian tujuan kelembagaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pengembangan kurikulum tingkat mata pelajaran umumnya dilakukan oleh kelompok guru bidang studi seperti yang tertuang dalam Silabus dan RPP masing-masing mata pelajaran. Sebagai contoh untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangan tingkat bidang studi dilakukan dalam bentuknya seperti tertuang dalam Silabus dan RPP mata pelajaran. Pengembangan kurikulum tingkat mata pelajaran dimulai dengan merumuskan tujuan kurikuler, dilanjutkan dengan pemilihan materi atau bahan yang sering dikenal dengan konsep pokok atau sub pokok bahasan.

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya memilih topik pembelajaran:

- a. Mengidentifikasi topik-topik yang diperkirakan dapat dijadikan bahan untuk dipelajari peserta didik agar mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cara yang di tempuh untuk mengidentifikasi topik-topik yang hendak di jadikan bahan pelajaran adalah: 1. Menganalisis setiap tujuan untuk mengetahui hakikat maksud

- yang ingin dicapai dan menganalisis sumber tujuan dari tujuan yang lebih umum. 2. Mengidentifikasi topik yang diperkirakan dapat dijadikan bahan dalam proses pencapaian tujuan.
- b. Memilih topik-topik yang paling relevan, fungsional, efektif dan komprehensif bagi pencapaian tujuan yang telah diidentifikasi. Maksud topik yang relevan adalah topik yang benar-benar berisi hal-hal yang dimaksud oleh tujuan yang ada atau beberapa tujuan yang lebih umum, atau penjabaran topik tersebut menggambarkan tujuan kurikuler mata pelajaran.

Yang dimaksud dengan topik yang fungsional dan efektif adalah topik yang benar-benar berfungsi efektif dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan, atau tujuan yang lebih umum. Sedangkan yang dimaksud dengan komprehensif adalah setiap topik harus memperhitungkan kaitan fungsionalnya dengan berbagai tujuan termasuk tujuan yang ada dalam kurikulum.

3. Pengembangan Tingkat Operasional

Proses pengembangan selanjutnya adalah pengembangan topik-topik yang terpilih kedalam bentuk jabaran program pengajaran. Dalam proses pengembangan ini sangat diperlukan sejumlah

konsep-konsep dan generalisasi yang mendukung terhadap topik dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Uraian tentang pengembangan tingkat opsional ini lebih ditekankan pada usaha guru dalam mengembangkan Silabus dan RPP setiap Bidang Studi.

Istilah Silabus dan RPP atau *basic course outline* mengandung arti garis besar program belajar-mengajar suatu bidang studi, yang diorganisasikan menurut hirarki fungsional dalam urutan waktu menuju tercapainya semua tujuan kurikulum bidang studi tertentu, untuk jenjang pendidikan tertentu.

Mengapa digunakan istilah pengembangan, karena guru harus berupaya mengembangkan topik-topik yang akan menjadi bahan pelajaran yang jelas isi dan luasnya. Ini berarti guru, harus menjabarkan topik yang ada kedalam sub-sub topik. Dengan demikian akan dapat diperkirakan waktu yang akan diperlukan dan tingkat keluasan topik tersebut. Bila suatu topik tidak dapat lagi dipecah lagi menjadi sub-topik yang lebih kecil, berarti topik tersebut tidak mengandung isi materi kurikulum yang komprehensif.

Sebagai contoh: topik "penyusunan Undang-Undang di dalam Negara Demokrasi". topik ini mengandung pengertian yang dapat dipahami oleh

peserta didik tentang proses pengambilan keputusan di dalam lembaga perwakilan rakyat. Untuk sampai kepada pengertian itu peserta didik harus memahami pengertian atau konsep demokrasi, hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam proses penyusunan Undang-Undang, struktur hubungan kekuasaan dalam lembaga perwakilan rakyat di negara demokrasi, dan sebagainya. Semua topik harus di kembangkan kedalam sub topik pada unit unit pembelajaran dalam satuan semester di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Signifikansi pengembangan kurikulum pada tingkat pengajaran yang lebih spesifik merupakan kegiatan seorang guru yang sifatnya rutin. Kegiatan pengembangan tingkat pengajaran sebagaimana pada pengembangan tingkat bidang studi diawali dengan pengembangan tujuan dan merumuskan ke dalam tujuan pengajaran khusus atau bisa dikenal dengan tujuan inti dan kompetensi khusus.

Selanjutnya berdasarkan rumusan tujuan khusus tersebut, guru mengkaji secara teliti hakikat bahan yang di perlukan dan mengidentifikasi berbagai alternatif bahan atau sub bahan pelajaran. Setelah itu barulah di pilih bahan-bahan pelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pengajaran khusus itu. Apabila telah tercapai maka bahan-bahan tersebut siap untuk di sampaikan dalam pembelajaran di

kelas.

Demikianlah penjelasan tentang prinsip prinsip dasar dan tahapan manajemen pengembangan kurikulum yang perlu ada dan diimplementasi oleh setiap guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Sekolah dan Madrasah).

Selanjutnya sebagai bahan evaluasi, Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Dalam menyusun kurikulum banyak faktor yang perlu di pertimbangkan, karena menyusun kurikulum bukanlah pekerjaan yang mudah. Tugas anda sekarang sebutkan beberapa asas kurikulum, serta jelaskan peranan masing-masing asas tersebut!
- 2) Di antara asas tersebut ada asas yang paling sering mengalami perubahan, sebutkan serta jelaskan mengapa demikian?
- 3) Adakan diskusi dengan teman-teman anda tentang permasalahan yang sering dilontarkan sebagian orang bahwa "cobalah anda pelajari dan selidiki apakah pernyataan tersebut memang benar dan tunjukkan dalam hal-hal apa saja terdapat ketinggalan tersebut! Dalam tingkat pengajaran, sudah menjadi tugas rutin bagi guru untuk merumuskan tujuan pengajaran. Coba seutkan beberapa hal yang

harus di lakukan guru sehubungan dengan pengembangan kurikulum pada tingkat pengajaran tersebut, kemudian jelaskan di sertai contohnya yang relevan!

- 4) Sebelum mrngrmbangkan kurikulum pada tingkat oprasional, seorang guru harus menentukan bahan pelajaran sebagai usaha memilih topik yang akan dikembangkan. Dalam upaya memilih topik, ada beberapa langkah yang perlu di tempuh diantaranya topik harus relevan, fungsional, efektif dan komprehensif. Coba jelaskan masing-masing langkah tersebut menurut pemahaman anda sendiri!

Rangkuman

Berdasarkan uraian mengenal landasan dan tingkatan dalam pengembangan kurikulum, maka dapat disimpullkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya dalam membina kurikulum kita berpegang pada asas sebagai berikut:
Asas filosofis: filsafat dan tujuan pendidikan, asas fsikologis, psikologi belajar dan psikologi anak, asas sosiologis masyarakat dan asas organisasi.
2. Prinsip-prinsip yang dianut dalam mengembangkan kurikulum antara lain isi

kurikulum harus: Sahih dan terpercaya, berpegang pada kenyataan sosial, seimbang, menjangkau tujuan yang luas, meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. memenuhi kebutuhan minat peserta didik.

3. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh guru dalam membina kurikulum pada tingkat pengajaran yaitu: Menganalisis tujuan, mengembangkan alat evaluasi, merumuskan bahan, merumuskan bentuk kegiatan belajar-mengajar, melaksanakan program.
4. Ada 2 langkah yang dapat ditempuh dalam upaya memilih topik, yaitu: Mengidentifikasi topik-topik yang akan dijadikan bahan pelajaran memilih topik-topik yang relevan, fungsional, efektif dan komprehensif.

BAGIAN KEEMPAT

PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Pengertian Perencanaan Kurikulum
- Sifat Perencanaan Kurikulum
- Prinsip Perencanaan Kurikulum
- Model Perencanaan Kurikulum

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori teori perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB IV

PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Pengertian Perencanaan Kurikulum

Merujuk pada fungsi fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan supervisi, maka perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya alam (*natural resources*) dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan.²⁷

Perencanaan adalah proses penyusunan, penetapan, dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu dan rasional agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁸

Perencanaan dalam suatu organisasi memiliki peran penting untuk menentukan langkah- langkah

²⁷ H.B Siswanto.(2015).*Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. h.42.

²⁸ Zainal Arifin. (2014). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya, h.25.

melaksanakan kegiatan sehingga tercapai tujuan. Kevalidan dan kesalahan dalam perencanaan akan memberi pengaruh positif dan negatif pada masa yang akan datang. Suatu perencanaan yang dibuat manajer organisasi perlu memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya sebuah perencanaan.

Pengertian perencanaan secara umum oleh Waterson yang dikutip Sudjana bahwa perencanaan pada hakikatnya adalah usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus yang dilakukan untuk memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹ Perencanaan memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang
2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi yaitu serangkaian tindakan di masa akan datang dan akan diambil oleh perencana
3. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan

²⁹ Nana Sudjana. (2002). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, h.46

unsur yang penting dalam setiap perencanaan.³⁰

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada masa akan datang dalam mencapai tujuan yang akan dicapai dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya organisasi.

Kurikulum adalah semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan guru. Pengalaman tersebut dapat bersifat intra kurikulum, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler.³¹ Yang kemudian dapat dimaknai bahwa hakikat kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan dalam pengawasan sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan terwujudnya perubahan perilaku peserta didik dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan.

Perencanaan merupakan bagian dari konsep manajemen, sedangkan kurikulum adalah bagian dari konsep ilmu pendidikan. Yang artinya bahwa perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika pendidik dan peserta didik dalam banyak tingkatan

³⁰ H.B Siswanto .(2015).*Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. h.42.

³¹ Sukiman. (2015). *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.4.

membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui situasi mengajar dan belajar, serta telaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.

Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan.³² Perencanaan kurikulum menjadi bagian kegiatan awal untuk menyusun konsep kurikulum yang menjadi program pendidikan di sekolah, tidak hanya rencana pembelajaran, tetapi rencana atas konsep kurikulum yang akan diajarkan di sekolah.

Perencanaan kurikulum mencakup spektrum yang sangat luas, baik rencana tentang tujuan, materi pelajaran, metode, media, dan evaluasi ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kurikulum dalam wujud pembelajaran. Maknanya bahwa perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik.

³² Oemar Hamalik.2007 *Manajemen Pengembangan Kurikulum* . Remaja Rosdakarya. h. 171

Pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.³³ Perencanaan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan fungsi atau proses manajemen kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. dan pembelajaran. Fungsi atau proses manajemen kurikulum tersebut terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.³⁴

Perencanaan kurikulum merupakan proses menetapkan tujuan, sasaran, dan program kurikulum yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan fungsi atau proses manajemen kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses manajemen kurikulum tersebut terkait

³³ Zainal Arifin. (2014). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya, h.25.

³⁴ Teguh Triwiyanto. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h.86

dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.³⁵

Proses perencanaan kurikulum dan kemudian diharapkan prosesnya dari perencanaan dan langkah rancangan kepada pelaksanaan aktual dengan lebih mudah, setelah peninjauan ulang dengan sejumlah proyek inovatif.³⁶

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan penataan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai produktivitas pendidikan. Produktivitas pendidikan dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan.³⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa perencanaan kurikulum adalah proses menetapkan rancangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada masa akan datang dalam praktik

³⁵Teguh Triwiyanto.(2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h.86

³⁶ Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins.(1978). *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. New Jersey ; Prentice Hall, Englewood Cliffs, h. 223

³⁷ Teguh Triwiyanto. 2015. *Manajemen Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. h.23.

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagai langkah dalam mencapai standar nasional pendidikan dan tujuan pendidikan nasional.

Adapun tujuan perencanaan kurikulum, yaitu:

- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- b. Standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan.
- c. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan.
- d. Merupakan gambaran kurikulum yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, dan
- e. Menimbulkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, serta menghemat biaya, tenaga dan waktu.³⁸

Perencanaan kurikulum merupakan langkah awal dalam pengelolaan kurikulum pendidikan yang diharapkan menghasilkan wujud kurikulum sebagaimana diharapkan sehingga

³⁸Teguh Triwiyanto. 2015. h.103

manajemen kurikulum berfungsi di setiap pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah. Dalam perencanaan ada sejumlah langkah yang mencakup perumusan standar kompetensi lulusan.

Materi, proses pembelajaran dan perangkat evaluasi adalah sebagai wujud pelaksanaan kurikulum, yang harus didukung dengan manajer, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan pendidikan.

B. Dasar Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum menjadi bagian integral dari manajemen kurikulum. Untuk itu perencanaan berarti menyiapkan langkah pelaksanaan kurikulum di masa akan datang berdasarkan kebutuhan anak pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dengan kata lain, setiap satuan pendidikan perlu disusun kurikulumnya dengan memperhatikan banyak faktor, dan yang paling utama adalah faktor peserta didik dan tujuan pembangunan jangka panjang nasional, serta keadaan bangsa di tengah perubahan zaman. Karena itu perencanaan kurikulum memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bersifat strategis, karena merupakan instrumen

yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

- b. Bersifat komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bersifat integratif, yang mengintegrasikan rencana yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas.
- c. Bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
- d. Bersifat humanistik, menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Bersifat futuristik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju.
- f. Merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistemik.
- g. Perencanaan kurikulum mengacu kepada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional.
- h. Bersifat spesifikasi untuk melayani keragaman peserta didik.
- i. Bersifat desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi

daerah.³⁹

Selain hal di atas perencanaan kurikulum juga penting berdasar pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Objektivitas, perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik ber- dasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan.
- b. Keterpaduan, perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian.
- c. Manfaat, perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
- d. Efisiensi dan efektivitas, perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, waktu dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan.
- e. Kesesuaian, perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan IPTEK, dan

³⁹Baca Manajemen mutu pengembangan kurikulum, dan Manajemen mutu terpadu pendidikan.

perubahan/ perkembangan masyarakat.

- f. Keseimbangan, perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan.
- g. Kemudahan, perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
- h. Berkesinambungan, perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan-tahapan dan jenis dan jenjang suatu pendidikan.
- i. Pembakuan, perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis suatu pendidikan, sejak dari pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya.
- j. Mutu, perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan.

C. Prinsip Perencanaan Kurikulum

Mengarahkan sebuah perubahan, maka dibutuhkan manajer yang mampu menjalankan kepemimpinan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Untuk kepentingan tersebut seorang manajer mampu menyusun rencana strategis yang jelas dan menyiapkan sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung, yaitu sarana dan prasarana serta anggaran yang kuat. Dalam dunia pendidikan selain renstra yang handal, dan sumberdaya pendukung, juga diperlukan perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kurikulum sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber daya, serta sebagai sistem kontrol.
- 2) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi lembaga pendidikan dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan(organisasi) tersebut.
- 3) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang

optimal.⁴⁰

Seorang perencana kurikulum dituntut untuk memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam merencanakan kurikulum baik secara menyeluruh maupun secara rinci karena perencanaan kurikulum memiliki multi fungsi pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan kurikulum, yaitu:

- 1) Perencanaan yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar yang potensial sesuai dengan hasil (tujuan) yang diharapkan sekolah.
- 2) Perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa.
- 3) Perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih dan memajukan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah.
- 4) Perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan,

⁴⁰ Oemar Hamalik.(2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya, h.152.

kesanggupan, dan taraf kematangan siswa (*level of pupils*).

- 5) Perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman belajar sehingga anak-anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar sekolah.
- 6) Perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontiniu sehingga kegiatan-kegiatan belajar siswa dari sejak awal sungguh mampu memberikan pengalaman.
- 7) Kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membantu pembentukan karakter, kepribadian, dan perlengkapan pengetahuan dasar siswa yang bernilai demokratis dan yang sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa Indonesia.
- 8) Perencanaan harus realistis, fleksibel (dapat dikerjakan), dan *acceptable* (dapat diterima dengan baik).⁴¹

Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang

⁴¹ Oemar Hamalik.(2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya. h.152.

diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur- unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.

Selain berfungsi sebagai alat manajemen juga perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

Beberapa analisis mengemukakan bahwa prinsip-prinsip perencanaan kurikulum ada pada semua tingkatan pendidikan dan tingkatan kelas. Karena itu, perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa.
- 2) Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses.
- 3) Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik.
- 4) Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok.

- 5) Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan.
- 6) Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan.⁴²

Pendapat di atas menegaskan bahwa perencanaan kurikulum dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip yang luas dan komprehensif, yaitu berkenaan dengan pengalaman peserta didik, berisikan konten dan proses yang memuat adanya topik-topik, penyusunan melibatkan tim, yang mendistribusikan materi untuk semua tingkatan dan sifatnya berkelanjutan. Dengan demikian prinsip perencanaan kurikulum berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan peserta didik yang mengakomodir tercapainya berbagai kompetensi yang menjadi tujuan kurikulum.

F. Model Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan kegiatan yang kompleks yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka dalam mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses perencanaan kurikulum

⁴²Oemar Hamalik.(2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya. h.153.

diperlukan mode I- model dalam penyajiannya, yang didasarkan pada asumsi-asumsi rasionalitas tentang pemrosesan informasi atau data secara cermat.

Adapun model-model dalam perencanaan kurikulum yang disebutkan oleh Oemar Hamalik adalah:⁴³

1. Model Perencanaan Rasional Deduktif atau Rasional Tyler. Model ini menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (*Goals and Objectives*). Namun model ini cenderung mengabaikan masalah-masalah dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan namun lebih cocok digunakan untuk sistem pendidikan yang sentralistik yang menitikberatkan pada sistem perencanaan pusat, dimana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi.
2. Model Interaktif Rasional (*The rasional-interactive model*).

⁴³ Oemar Hamalik, Oemar Hamalik.(2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya. h. 154

Model ini memandang rasional sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan logika. Model ini seringkali dinamakan model situasional. asumsi rasionalitasnya

menekankan pada respons fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal. *Implementasi* perencanaan merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, dimana diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum.

3. *The Disciplines Model.*

perencanaan ini menitikberatkan pada guru-guru, mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologi dan psikologi.

4. Model tanpa perencanaan (*non planning model*)

Ini merupakan suatu model perencanaan kurikulum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru didalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan.

Secara umum dalam sebuah perencanaan kurikulum dapat mengandung keempat tipe diatas, namun untuk membedakannya antara satu dengan

yang lain, diperlukan analisis variabel kebermaknaan bagi praktik perencanaan.⁴⁴ Dalam konteks ini perencanaan kurikulum tidak bisa dilaksanakan oleh setiap orang atau sembarangan, sebab proses penyusunan awal dan pengembangan kurikulum selain berkenaan dengan kebijakan pemerintah, juga memerlukan para ahli baik dari segi pengalaman dalam bidang praktik pendidikan dan pembelajaran sekaligus memang memerlukan pakar dalam bidang pendidikan.

G. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada peserta didik yang merupakan dasar dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Menurut Sukiman,⁴⁵ organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum

⁴⁴ Oemar Hamalik, Oemar Hamalik.(2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya. h. 156

⁴⁵Sukiman.2012. *Pengembangan Media Pembelajaran*.Pedagogia Cetakan 1 h.58.

yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan.

Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan penyampaian bahan pembelajaran, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum.

Kemudian menurut Rusman,⁴⁶ organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek peserta didik dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*sequence*), kesinambungan, keseimbangan, dan keterpaduan (*integrated*)

⁴⁶ Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, h.60

1. Ruang lingkup (*scope*) dan urutan bahan pelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran lingkup materi pelajarannya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Sementara itu, organisasi kurikulum integritas lingkup materi pelajarannya diambil dari masyarakat maupun dari aspek peserta didik. (minat bakat dan kebutuhan) tidak hanya lingkup materi pelajaran yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum, tetapi bagaimana urutan (*sequence*) bahan tersebut harus disajikan dalam kurikulum.
2. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan

berdasarkan keluasaan secara vertikal maupun horizontal

3. Keseimbangan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum: (1) keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum dan (2) keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni apresiasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum
4. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum.⁴⁷

Berdasarkan pendapat di atas jelas dapat

⁴⁷ Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, h.60

dipahami bahwa organisasi kurikulum sejatinya merupakan bagian dari perencanaan kurikulum. Sebab yang dimaksudkan dengan organisasi kurikulum adalah pengaturan materi/isi kurikulum, khususnya berkaitan dengan bahan mata pelajaran. Hal ini penting diperhatikan para perencana kurikulum agar guru mudah mengajarkan, dan anak didik juga mudah memahami atau menguasai keterampilan yang disampaikan guru kepada anak didik.

SOAL

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d dengan jawaban yang benar!

1. Perencanaan kurikulum berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen kurikulum. Fungsi atau proses tersebut meliputi

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
 - b. Pengarahan dan pengawasan kurikulum.
 - c. Perencanaan kurikulum
 - d. Evaluasi kurikulum
- 2. Fungsi atau proses manajemen kurikulum tersebut berkaitan dengan
 - a. Pengembangan kurikulum
 - b. Landasan kurikulum
 - c. Perencanaan kurikulum
 - d. Perencanaan pembelajaran
- 3. Mensyaratkan adanya ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak (tidak kaku)mencakup peserta didik dalam memilih program pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran. Hal ini merupakan prinsip dari
 - a. Efisien
 - b. Kesyinambungan
 - c. Efektivitas
 - d. Prinsip fleksibilitas
- 4. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Hal ini merupakan pengertian perencanaan kurikulum menurut

- a. Usman (2010: 66)
 - b. Herbert spencer (1879)
 - c. Rusman (2011: 21)
 - d. Ocmar Hamalik (2007: 152)
5. Dalam perencanaan kurikulum minimal ada 5 hal yang memengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu
- a. Filosopis, materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajar.
 - b. Sumber biaya, tenaga, sarana, monitoring, dan evaluasi.
 - c. Kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, gaya belajar siswa, dan pelatihan.
 - d. Sarana dan prasarana, lokasi, tenaga, pelatihan guru dan evaluasi
6. Beberapa keputusan harus harus di buat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada
- a. Jumlah siswa
 - b. Pengembangan masyarakat
 - c. Gaya belajar siswa
 - d. Spesifikasi berdasarkan kriteria
7. Perencanaan kurikulum mencakup
- a. Pengumpulan, pembentukan, sistensis, menyeleksi informasi yang relevan dari

- berbagai sumber.
- b. Menyeleksi dan informasi dari satu pihak
 - c. Mencari informasi yang ada
 - d. Pengumpulan dari berbagai pihak
8. Yang termasuk tujuan perencanaan kurikulum yaitu
- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
 - b. Sebagai alat untuk belajar
 - c. Sebagai sumber daya
 - d. Sebagai alat transportasi
9. Landasan perencanaan kurikulum untuk mengasimilasi dan mengorganisasi informasi dan data yang secara intensif yang berhubungan dengan pengembangan program lembaga atau sekolah. Informasi dan data yang menjadi area utama adalah
- a. kekuatan intelektual dan kekuatan sosial
 - b. kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia
 - c. pertumbuhan manusia
 - d. perkembangan manusia
10. penyesuaian perencanaan kurikulum dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti, sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hal ini merupakan

pengertian dari

- a. perlakuan pengetahuan
- b. Kekuatan sosial
- c. kekuatan sosial
- d. pertumbuhan dan perkembangan

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. Sebutkan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum!
2. Apa yang di maksud dengan kurikulum?
3. Apa pengertian perencanaan kurikulum?
4. Apa saja tujuan perencanaan kurikulum?
5. Apa perbedaan perencanaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran ?

BAGIAN KELIMA

EFEKTIFITAS MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Implementasi manajemen
- Konsep implementasi manajemen
- Kemampuan guru dalam implementasi manajemen

TUJUAN

Mahasiswa memahami Efektifitas dalam implementasi manajemen kurikulum pada satuan pendidikan.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan.

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB V

EFEKTIFITAS MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM

A. Pengertian Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum dapat diartikan

sebagai aktivitas kurikulum tertulis (*written curriculum*) adalah bentuk pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran.

Mars, dikutip oleh Mulyasa,⁴⁸ mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu: dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru dan dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. Dari berbagai faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor lain. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh faktor guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak melakukan tugas dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum (pembelajaran) tidak akan memuaskan.

Menurut Kunandar,⁴⁹ dalam garis besar implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan

⁴⁸Mulyasa. 2006. *Kurikulum Yang di Sempurnakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 247

⁴⁹Kunandar. 2007. *Guru profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan menghadapi Sertifikasi Guru*. Kunandar Penerbit. h. 236

pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan dan evaluasi. perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau bisa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum kedalam tindakan operasional. Evaluasi

kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti: politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan.

Masih menurut Kunandar,⁵⁰ mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum hal yang paling penting diperhatikan adalah potensi dan pengembangan peserta didik. Karena peserta didik merupakan subyek dalam kegiatan pembelajaran. Adapun penjelasan kegiatan implementasi kurikulum itu adalah pengembangan program. Pengembangan program kurikulum meliputi: Pengembangan program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu program semester, program modul, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial dan program bimbingan dan konseling

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum saat ini dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, dan penilaian program.

1. Penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Ulangan harian terdiri dari seperangkat

⁵⁰Kunandar. 2007. h. 236-241

soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas.

2. Tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III.
3. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pembelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satu waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah.
4. *Benchmarking*. *Benchmarking* merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan
5. Penilaian program. Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan

Dinas Pendidikan secara *continue* dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.

Setiap guru harus memahami tujuan penilaian kelas dengan baik agar fungsi yang telah disebutkan terlaksana. Jika dalam penilaian kelas, siswa jauh sekali dari pencapaian tujuan intruksional maka diharapkan guru segera mencari pemecahan masalahnya.

B. Implementasi Kurikulum

Berkaitan dengan implementasi kurikulum yang berbasis pada kompetensi KBK, KTSP, dan K 13, dikembangkan dengan berorientasi kepada pengembangan kepribadian, atau kurikulum humanistik, menuju kepada kurikulum yang berorientasi pada kehidupan dan alam pekerjaan, atau rekontuksi sosial dan teknologi.

Kurikulum humanistik dapat diberlakukan pada awal pendidikan dasar, di mana sejumlah kemampuan dasar untuk keperluan pengembangan pribadi seperti kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis, serta keberanian mengeluarkan ide

atau gagasan, dan bekerja sama perlu ditonjolkan. pada jenjang menengah, barulah mereka belajar berdasarkan disiplin ilmu, atau subjek akademik, dengan tetap bersandar pada kehidupan dan lingkungan masyarakat sebagai sumber kurikulum, atau rekontruksi sosial dan teknologi.

Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan kreativitas peserta didik lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini, peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran yang multi arah sebagiannya dapat dikembangkan sehingga pembelajaran kognitif dapat mengembangkan kemampuan berpikir sebaiknya dikembangkan dengan menekankan pada aktifitas peserta didik untuk mencari pemahaman akan objek, menganalisis dan merekonstruksi sehingga terbentuk pengetahuan baru dalam diri peserta didik.

Menurut Nana Syaodih Sukma Dinata.⁵¹, Untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanan. Sebagus apa apun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada guru.

⁵¹Nana Syaodih Sukmkadinata . 2006. *Pengembangan Kurikulum teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya .

Sumber daya pendidikan yang lain pun seperti sarana prasarana biaya, organisasi, lingkungan, juga merupakan kunci keberhasilan pendidikan, tetapi kunci utamanya adalah guru.

C. Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum

Kompetensi yang harus dikuasai guru dalam mengimplementasikan kurikulum adalah sebagai berikut: (1) pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. (2) kekuatan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. (3) kekuatan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran.

Kompetensi tersebut mungkin sudah dikuasai oleh guru-guru dan para dosen, tetapi mungkin juga baru dikuasai sebagian atau sebagian guru yang menguasainya, perlu adanya kegiatan yang bersifat peningkatan atau penyegaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui diskusi diskusi simulasi dalam FGD, MGMP, dan KKG selain dilakukan melalui lokakarya pelatihan, penataran intern dengan mendatangkan narasumber.

Kendala dalam implementasi kurikulum ini adalah terutama berkenaan dengan masih lemahnya diagnosis kebutuhan baik pada skala makro dan

mikro sehingga implementasi kurikulum sering tidak sesuai yang diharapkan. Kendala yang dimaksud adalah: (1) Perumusan kompetensi pada tahapan mikro sering dikacaukan dengan intruksional yang dikembangkan. (2) Pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan. (3) Evaluasi sering tidak sesuai dengan tujuan intruksional yang dikembangkan;

Mengantisipasi kendala yang dihadapi, sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: (1) Dalam mendiagnosisi kebutuhan masyarakat, maka baik dewan sekolah maupun komite sekolah harus dilibatkan sejak awal. (2) Dalam implementasi kurikulum guru mempunyai kewenangan penuh dalam menerapkan strategi pembelajaran dan materi atau bahan pelajaran. (3) Struktur materi diorganisasikan mulai dari perencanaan pengajaran dalam bentuk jam pelajaran, sampai dengan evaluasi menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan.

BAGIAN KEENAM

FUNGSI MANAJER DAN PERSONIL MANAJEMEN KURIKULUM

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Fungsi Manajer
- Konsep tugas pokok personil dalam manajemen kurikulum
- Kemampuan guru dalam Manajemen kurikulum

TUJUAN

Mahasiswa memahami Efektifitas dalam manajemen kurikulum pada satuan pendidikan

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori teori perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan.

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB VI

FUNGSI MANAJER DAN PERSONIL MANAJEMEN KURIKULUM

A. Tugas dan Fungsi Personil Lembaga pendidikan

1. Kepala sekolah
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah

merupakan bagian aktivitas aktivitas rantai panjang birokrasi, hal ini ditandai oleh besarnya peran Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Meskipun ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala sekolah baik yang bersifat administratif maupun persyaratan lainnya. Tetapi, pengangkatan kepala sekolah pada semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan seakan menjadi otoritas penuh dari kepala daerah atas usul kepala dinas pendidikan. Manajemen penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan oleh kepala daerah dan dinas pendidikan memperlakukan sekolah untuk semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan pukul rata, dan telah banyak menghasilkan keseragaman jenis sekolah.⁵²

Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah yang harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan

⁵² Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta. 2009. h. 82.

program

Efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama para guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional kedalam program tahunan, catur wulan dan bulanan. Adapun program mingguan ataupun program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.⁵³

Menurut Triwiyanto,⁵⁴ tugas kepala sekolah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran pada kompetensi manajerial, meliputi: (1)Menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang meliputi kebutuhan pendidik, pembagian tugas mengajar, kelengkapan alat dan bahan pelajaran, serta semua kegiatan sekolah. (2)Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan di sekolah. (3)Menyelenggarakan evaluasi bagi siswa dan ujian sekolah. (4)Melakukan supervisi terhadap proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler

⁵³Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama. h. 41

⁵⁴Teguh Triwiyanto. 2015. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran* Jakarta: Bumi Aksara. h. 71

dan intrakurikuler, kegiatan ketatausahaan sekolah, dan kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi lain. (5) Menyusun penjabaran kalender pendidikan menyusun dan mengelola evaluasi pembelajaran. (6) Senantiasa meningkatkan stabilitas dan mutu pendidikan. (7) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi proses pembelajaran tambahan atau ekstra. (8) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan akademik pendidik menuju profesionalitas. (9) Memantau kualitas pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. (11) Melaksanakan supervisi. (12) Mendokumentasikan laporan kegiatan evaluasi, ulangan umum dan ujian akhir. (13) Memantau pembuatan rencana pengajaran pendidik. (14) Membina dan memeriksa penyusunan satuan pelajaran, daya serap siswa, deposit soal, program remedial, dan pengayaan soal.

Seorang Kepala Sekolah memiliki fungsi yang disebut dengan fungsi supervisi kurikulum. Supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerak motivasi, nasihat dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Sebagai seorang kepala sekolah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan terarah pada tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada dasarnya supervisor kurikulum memiliki lima fungsi, sebagai berikut:

1. Fungsi edukatif, sebagai usaha untuk menciptakan tenaga pengajar yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya.
2. Fungsi kurikuler, yakni berkenaan dengan pelaksanaan, pengajaran dan peningkatan situasi belajar-mengajar sehingga siswa dapat belajar secara lebih efektif. Hal ini dimaksudkan untuk membantu guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kurikulum sekolah.
3. Fungsi pembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru agar mampu mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tanggung jawab kependidikannya.
4. Fungsi administratif, fungsi ini berkenaan dengan kegiatan pengawasan dan

kepemimpinan terhadap organisasi dalam rangka kependidikan dan pengajaran sekolah.

5. Fungsi pengabdian, yakni berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah, seperti membantu guru, membantu siswa, dan menyelenggarakan sistem sekolah secara menyeluruh.

Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta dapat memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kurikulum, pengembangan program, supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium dan ujian.

2. Wakil Kepala Sekolah

Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah urusan kurikulum, adalah sebagai berikut : (1) Menyusun program kerja bidang kurikulum. (2) Memberdayakan guru agar mampu menyediakan dokumen-dokumen kurikulum. (3) Mengkoordinasikan penyusunan dan revisi kurikulum tingkat satuan pendidikan. (4) Memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi dasar setiap

mata pelajaran. (5) Membantu kepala sekolah dalam pembagian tugas mengajar guru. (6) Menyusun peraturan akademik. (7) Menyusun kalender pendidikan. (8) Membuat jadwal pembelajaran. (9) Memfasilitasi guru untuk menyusun administrasi pembelajaran setiap mata pelajaran. (10) Memfasilitasi guru untuk memilih buku sumber yang sesuai untuk setiap mata pelajaran. (11) Memfasilitasi guru dalam mengembangkan dan memperbaiki proses pengajaran. (12) Mengidentifikasi kebutuhan dalam bagi pengembangan kurikulum lokal. (13) Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian dan ujian nasional. (14) Mengkoordinasi pengolahan nilai penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian dan ujian nasional. (15) Menetapkan kriteria naik/tidak kelas dan kriteria kelulusan. (16) Mengatur jadwal penerimaan buku laporan penilaian hasil belajar dan ijazah. (17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum, membuat laporan pelaksanaan kurikulum secara berkala kepada kepala sekolah.

3. Komite sekolah

Komite sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi, dan komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan lembaga pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat, dan juga merupakan pemandirian satuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pendidikan, tanpa harus ketergantungan kepada pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD yang tidak akan pernah mencukupi kebutuhan pembiayaan pada satuan-satuan lembaga pendidikan, dalam upaya menjadikan lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas.⁵⁵

Menurut Kompri,⁵⁶ fungsi komite sekolah antara lain sebagai berikut :

1. Memberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah serta menentukan, melaksanakan kebijakan pendidikan.
2. Mendukung (*supporting agency*), kerjasama sekolah dalam masyarakat baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam

⁵⁵Kompri. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta. h. 360.

⁵⁶Kompri. 2014. h. 368

penyelenggaraan pendidikan.

3. Mengontrol (*controlling agency*), kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
4. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/legislatif), dengan masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) dan dunia kerja, pemerintah, DPRD dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
7. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan dan program pendidikan.

Tugas komite sekolah antara lain sebagai berikut: (1) Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. (2) Pendukung baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dalam

satuan pendidikan.(4)Mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.

4. Bagian perpustakaan

Perpustakaan ditujukan sebagai pelengkap dari proses pendidikan yang isinya merupakan buku-buku yang berkaitan dengan materi ajar yang disampaikan dalam kurikulum pendidikan. Perpustakaan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan dan memelihara koleksi kepustakaan berupa buku dan hasil riset.

Pustakawan adalah petugas perpustakaan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan perpustakaan dan juga merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pelayanan yang ada di perpustakaan.

Berikut ini merupakan Tugas pokok seorang pustakawan, yaitu: (1) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. (2) Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai. (3) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka. (4) Menghimpun alat seleksi bahan pustaka. (5) Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan. (6) Melakukan pelayanan perpustakaan. (7) Menelaah pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi edukatif, perpustakaan sekolah menyediakan buku-buku baik buku fiksi maupun nonfiksi. Buku-buku tersebut dapat membiasakan murid untuk belajar mandiri. Selain itu perpustakaan sekolah menyediakan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum sekolah, hal ini dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 2) Fungsi informatif, perpustakaan sekolah menyediakan majalah, bulletin, surat kabar, pamphlet, artikel, peta bahkan juga dengan alat- alat pandang-dengar, seperti proyektor, televisi, tape recorder dan sebagainya. Semua ini akan memberikan informatif yang diperlukan oleh murid-murid oleh sebab itu, perpustakaan sekolah memiliki fungsi informatif.
- 3) Fungsi tanggung jawab administratif, fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah. Setiap peminjaman dan pengembalian buku selalu di catatoleh pustakawam. Setiap murid yang amsuk harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan, tidak boleh mengganggu temannya yang lagi belajar, jika murid telat mengembalikan buku pinjamannya maka harus didenda, jika

menghilangkan bukunya maka harus mengganti dengan buku yang baru. Semua itu untuk mendidik murid agar bersikap dan bertindak secara administratif.

- 4) Fungsi riset, perpustakaan menyediakan banyak bahan pustaka, adanya bahan pustaka yang lengkap ini membuat pustaka dapat melakukan riset yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
- 5) Fungsi rekreatif, perpustakaan sekolah dapat dipakai untuk mengisi waktu luang seperti pada waktu istirahat dengan cara membaca buku cerita, novel, roman, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Guru

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerja guru pada tingkat institusional dan instruksional peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai tenaga profesional pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran

antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu perekayasa pendidikan dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap dunia pendidikan dewasa ini.⁵⁷ Menurut Karwati, guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam proses pembelajaran.. Terkait dengan hal tersebut maka fungsi guru meliputi⁵⁸:

- 1) Pendiagnosa perilaku peserta didik. Guru harus mampu memahami dan memberikan solusi atas segala kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk itu guru dituntut untuk mengenal lebih dekat kepribadian peserta didiknya.
- 2) Penyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran yang baik harus didukung dengan perencanaan yang baik, karena rencana yang baik akan meminimalisir risiko pembelajaran yang buruk dan tidak terarah.
- 3) Pelaksana proses pembelajaran. Guru harus

⁵⁷Euis Karwati, 2014. *Manajemen Kelas*. Bandung: Alfabeta. h. 61

⁵⁸Euis Karwati, 2014: 61-65

mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, karena kualitas proses pembelajaran akan menentukan hasil akhir yang akan dicapai oleh peserta didik.

- 4) Pelaksana administrator sekolah. Guru dapat berperan sebagai administrator sekolah yang berfungsi untuk membantu kepala sekolah dan tata usaha sekolah ini memungkinkan guru untuk mengetahui peserta didik tidak hanya sebatas kepetingan akademik namun juga kepentingan administratif peserta didik.
- 5) Penyebar komunikasi dan komunikator. Terkait dengan proses penyampaian informasi oleh guru, baik kepada dirinya sendiri, kepada peserta didik, kepada pemimpinnya, kepada orang tua peserta didik, maupun kepada masyarakat.
- 6) Pengembangan potensi peserta didik. Guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki peserta didik.
- 7) Pengembang kurikulum di sekolah. Guru merupakan ujung tombak yang mengimplementasikan kurikulum di sekolah, sehingga guru merupakan jembatan antara kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah dan pelaksana di tingkat sekolah peran strategis tersebut menuntut guru untuk mampu

mengembangkan kurikulum ditingkat sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah dan kondisi peserta didik.

Tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut dengan istilah "*level of performance*" atau level kinerja, guru yang memiliki kinerja tinggi merupakan guru yang memiliki produktivitas kerja sama dengan atau diatas standar yang ditentukan, begitupun sebaliknya guru yang memiliki level kinerja rendah maka guru tersebut merupakan guru yang tidak produktif.⁵⁹

6. Administrasi sekolah

Garapan administrasi sekolah dilihat dari sudut pandang yang sempit terdiri dari: Pertama Administrasi tata laksana sekolah, seperti laporan anggaran, rencana anggaran, dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS), surat menyurat, administrasi pegawai dan lain sebagainya. Kedua administrasi guru dan pegawai sekolah, Ketiga supervisi pendidikan. Keempat yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum

Administrasi sekolah memiliki tugas pokok yaitu: (1) Melayani pelaksanaan pekerjaan operasional untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. (2)

⁵⁹Euis Karwati. 2014 h. 66.

Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan.
(3) Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

Terdapat beberapa komponen yang sangat penting untuk mendukung peningkatan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu yang pokok adalah penyelenggaraan administrasi yang dalam lingkup makro disebut juga administrasi sekolah. Tanpa adanya administrasi sekolah yang baik maka kemungkinan sekali segala upaya kegiatan peningkatan mutu bidang pendidikan akan gagal. Aspek apapun yang dibenahi akhirnya kembali pada persyaratan utamanya adalah administrasi, baik sebagai sarana maupun sebagai alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya.

Upaya peningkatan mutu layanan kinerja sumber daya manusia dalam kegiatan administrasi sekolah, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip efisiensi. Administrator sekolah akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien
- 2) Prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang efektif dan efisien dengan melakukan pekerjaan manajemen yang

baik, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan.

- 3) Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Seseorang administrator cenderung memprioritaskan perhatiannya pada pekerjaan operatif, namun seharusnya ia tidak selalu memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai
- 4) Prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila memilih gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia, pelaksanaan tugas serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

7. Laboran

Laboran adalah orang yang bertugas membantu aktivitas peserta didik di laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan dan penelitian kurikulum. dalam melakukan tugasnya seorang laboran bertanggung jawab dalam menyediakan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum atau penelitian. laboran terdiri dari:

- a. Teknisi. Orang yang berperan untuk beroperasinya peralatan laboratorium misalnya

listrik, air, komputer dan perbengkelan.

- b. Analisi. Orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis pada bidang tertentu Laboran teknisi maupun analisi yang handal sangat diperlukan maka selayaknya mereka mempunyai keahlian atau kompetensi di bidangnya.

Adapun tugas laboran agalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan praktikum peserta didik.
- (2) Menyediakan fasilitas labolatorium untuk kegiatan penelitian atau karya ilmiah.
- (3) Membuat dan menyusun daftar alat alat labolatorium.
- (4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan labolatorium secara berkala.
- (5) Inventarisasi dan pengadministrasian alat alat labolatorium

Selanjutnya fungsi laboran adalah sebagai berikut: (1) Mendata alat dan bahan praktikum. (2) Mencatat kegiatan praktikum. (3) Merawat ruang labolatorium. (4) Melayani kegiatan praktikum. (5) Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di labolatorium.

SOAL DAN LATIHAN

Pilihan ganda

1. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, merupakan pengertian dari?

- a. Kurikulum
 - b. Satuan pendidikan
 - c. Manajemen
 - d. Komite sekolah
 - e. Organisasi
2. Orang yang bertugas membantu aktivitas siswa di laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan dan penelitian kurikulum adalah?
- a. Pustakawan
 - b. Laboran
 - c. Kepala sekolah
 - d. Wakil kepala sekolah kesiswaan
3. Proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi upaya organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, merupakan pengertian dari?
- a. Manajemen
 - b. Kurikulum
 - c. Administrasi
 - d. Organisasi
 - e. Analisis
4. Perpustakaan menyediakan banyak bahan pustaka, merupakan salah satu fungsi perpustakaan yaitu?
- a. Fungsi riset
 - b. Fungsi rekreatif

- c. Fungsi informative
 - d. Fungsi edukatif
 - e. Fungsi tanggung jawab administrasi
5. Berikut ini merupakan fungsi laboran, kecuali?
 - a. Mendata alat dan bahan praktikum
 - b. Mencatat kegiatan praktikum
 - c. Merawat ruang laboratorium
 - d. Melayani kegiatan praktikum
 - e. Menyediakan dan merawat buku pelajaran
 6. Berkenaan dengan pelaksanaan, pengajaran dan peningkatan situasi belajar-mengajar sehingga siswa dapat belajar secara lebih efektif, merupakan fungsi kepala sekolah sebagai?
 - a. Fungsi kurikuler
 - b. Fungsi edukatif
 - c. Fungsi pengembangan
 - d. Fungsi pembimbingan
 - e. Fungsi administratif
 7. Salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat, merupakan pengertian dari?
 - a. Administrasi sekolah
 - b. Komite sekolah
 - c. Manajer sekolah
 - d. Laboran

- e. Pustakawan
- 8. Kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan, merupakan salah satu fungsi komite sekolah yaitu?
 - a. Memberi pertimbangan
 - b. Mengontrol
 - c. Mendukung
 - d. Mediator
 - e. Memberi masukan
- 9. Berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah, seperti membantu guru, membantu siswa, dan menyelenggarakan sistem sekolah secara menyeluruh, merupakan salah satu fungsi kepala sekolah yaitu?
 - a. Fungsi pengabdian
 - b. Fungsi edukatif
 - c. Fungsi pembimbing
 - d. Fungsi kurikuler
 - e. Fungsi administrative
- 10. Merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan, menilai hasil pembelajaran , melakukan pembimbingan dan pelatihan, merupakan tugas seorang guru menurut?
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 39 ayat 2

- b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003, pasal 39 ayat 2
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2007, pasal 39 ayat 2
- d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 39 ayat 3
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 29 ayat 2

Essay

- 1. Sebutkan tugas pokok komite sekolah!
- 2. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3. Pendukung baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 4. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan.
- 5. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.
- 6. Sebutkan tugas pokok seorang laboran.

BAGIAN KETUJUH

INOVASI MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Implementasi Kurikulum
- Konsep implementasi kurikulum
- Kemampuan guru dalam implementasi kurikulum

TUJUAN

Mahasiswa memahami Efektivitas dalam implementasi manajemen kurikulum pada satuan pendidikan

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB VII

INOVASI MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Secara etimologi inovasi berasal dari kata latin *innovaation* yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya *innovo* yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan yang terencana.⁶⁰Kamus besar Bahasa Indonesia, Inovasi di artikan pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode atau alat.⁶¹

Setelah perencanaan kurikulum, maka pemerintah menetapkan kebijakan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum berarti proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran disekolah. Dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk profesional merancang pembelajaran yang efektif, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan, dan pembentukan kompetensi secara aktif serta menerapkan kriteria ketuntasan

⁶⁰Udin Syaefudin Soud. 2020. *Inovasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta* Cetakan 11. h. 5

⁶¹Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1989:333.

dalam pembelaaran.

Secara etimologi kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, *Curere* berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai atau *start* sampai *finish*. Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah *al-manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya.

Menurut Muhaimin kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai⁶². Keberhasilan proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan tidak bisa terlepas dari kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan karena kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan dengan tujuan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum memberikan rancangan pendidikan yang berfungsi memberikan pedoman dalam proses pendidikan. Sedangkan dalam terminologi, terdapat perbedaan pengertian kurikulum.

⁶²Muhaimin. 2014..*Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinngi*. Jakarta:Rajawali Pres. h. 21.

Dalam pengertian klasik kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, yang telah tersusun secara sistematis dan logis. Pendefinisian ini walau terasa kurang tepat, tetapi memang ada benarnya jika ditarik dari asal kata kurikulum di atas tadi, yakni *curere* yang biasa diartikan dengan jarak yang harus ditempuh oleh pelari.

Berdasarkan pengertian klasik, pengertian kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran dari sejumlah mata pelajaran yang berada di sekolah atau di madrasah yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Kurikulum juga merupakan keseluruhan mata pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Pengertian klasik memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah materi.

Pengertian lain, Ramayulis mendefinisikan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Menurut

Syarifuddin,⁶³ kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam sistem institusional pendidikan.

Beberapa definisi memberikan makna, bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau kegiatan yang mencakup program pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Definisi ini kemudian berkembang sesuai dengan dinamika IPTEK dan tuntutan zaman. Kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan pendekatan manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.

Sebuah kurikulum lembaga pendidikan yang diatur dan dikembangkan dengan baik akan menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar.

Kurikulum kemudian dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan

⁶³Syafruddin Nurdin. 2016 *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press. Cetakan II. h. 71

yang memerlukan sebuah inovasi dan pengembangan. Karenanya kurikulum selalu bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan pebelajar.

Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan bagian dari struktur kurikulum, isi kurikulum, proses pembelajaran, kerja keras, kedisiplinan, kebiasaan belajar, dan jujur dalam belajar. Semua itu merupakan tanggung jawab sekolah yang wajib diberikan kepada peserta didik. Pengertian tersebut terlihat, bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja melainkan juga mencakup kegiatan di luar kelas. Pengertian kurikulum seperti ini sering dimaknai dengan sejumlah pengalaman belajar bagi peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Beberapa definisi di atas, kurikulum dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Kurikulum sebagai produk, yakni sebagai hasil karya pengembangan kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. Inilah yang disebut dengan dokumen kurikulum.
2. Kurikulum sebagai program, yakni alat yang

dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran, tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain.

3. Kurikulum sebagai materi ajar agar dapat dipelajari oleh peserta didik yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
4. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum. Sedangkan pandangan yang keempat ini mengenai apa yang secara actual menjadi kenyataan pada setiap siswa. Ada kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.

Secara garis besar dalam SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 kurikulum disimpulkan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2. Inovasi Manajemen Implementasi Kurikulum

Inovasi dalam manajemen implementasi kurikulum dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Dari sisi bentuk dan organisasi inovasinya berupa perubahan dari Kurikulum tahun 1947 yang disebut Rencana Pelajaran Dirinci Dalam Rencana Pelajaran terurai (17 tahun) menjadi kurikulum tahun 1964. Rencana Pendidikan Dasar (4 tahun) menjadi kurikulum tahun 1968. Kurikulum Sekolah Dasar (6 tahun) menjadi kurikulum tahun 1974. Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan 1 tahun menjadi kurikulum tahun 1975. Kurikulum Sekolah Dasar (9 tahun) menjadi kurikulum 1984. Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (KCBSA) (10 tahun), menjadi Kurikulum 1994 (3 tahun), pada tahun 1997 Revisi Kurikulum 1994 (7 tahun), pada tahun 2004 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) (2 tahun), menjadi kurikulum tahun 2006 Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (7 tahun). Dan, tahun 2013 Pemerintah menerapkan kurikulum 2013 yang

mulai diberlakukan bulan Juli 2013.

- b. Dari sisi psikologi timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru, maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan proses, dan belajar tuntas.
- c. Dari sisi sosiologis timbul masalah berkenaan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks sehingga muncul 1 inovasi berupa masuknya mata pelajaran keterampilan, adanya kerja dan gagasan muatan lokal.
- d. Dari sisi penyampaian pengajaran, inovasi berupa sistem modul paket untuk pendidikan luar sekolah dan metode SAS (Struktural Analisis Sintesis) untuk belajar membaca Alquran. Pembelajaran melalui komputer adalah bentuk pembelajaran yang dirancang secara individual dengan cara peserta didik berinteraksi secara langsung dengan materi pelajaran yang diprogram secara khusus melalui sistem komputer. Dengan demikian, melalui komputer siswa dapat belajar sendiri dari mulai pengenalan tujuan yang harus dicapai, pengalaman belajar yang harus dilakukan sampai mengetahui tingkat keberhasilannya sendiri dalam pencapaian tujuan.

Inovasi dalam bidang pendidikan, biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, keresahan guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang dianggapnya kurang berhasil, keresahan pihak administrator pendidikan tentang kinerja guru, atau mungkin keresahan masyarakat terhadap kinerja dan hasil bahkan sistem pendidikan.

Keresahan-keresahan itu pada akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera. Dari upaya untuk memecahkan masalah maka muncul gagasan dan ide-ide baru sebagai suatu inovasi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah, hampir tidak mungkin inovasi muncul tanpa adanya masalah.

Soal Pilihan Ganda

1. Secara etimologi inovasi berasal dari bahasa?
 - a. Latin
 - b. Indonesia
 - c. Arab
 - d. Yunani
2. Secara etimologi inovasi berasal dari kata innovation yang memiliki arti?
 - a. Pembukuan
 - b. Pembaharuan dan perubahan
 - c. Pembaharuan
 - d. Perubahan
3. Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa?
 - a. Amerika
 - b. Latin
 - c. Yunani
 - d. Indonesia
4. "Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan." Definisi tersebut kemukakan oleh?
 - a. Ramayulis
 - b. Yono

- c. Tubagus
 - d. Ahmad
5. Menurut M. Arifin mendefinisikan kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam satu sistem?
- a. Institusional Pendidikan
 - b. Perubahan Pendidikan
 - c. Institut Pendidikan
 - d. Pembaharuan Pendidikan
6. Indonesia sering sekali berinovasi dalam berganti kurikulum tentunya demi perbaikan pendidikan di Indonesia, sudah berapa kali Indonesia berganti kurikulum?
- a. 20
 - b. 15
 - c. 11
 - d. 12
7. Kurikulum pada tahun berapakah yang paling lama di gunakan untuk pendidikan di Indonesia?
- a. 2002
 - b. 2013
 - c. 1947
 - d. 1999
8. Di bawah ini salah satu contoh inovasi kurikulum

- ialah...
- a. Pembelajaran melalui computer
 - b. Pembelajaran di ruang kelas
 - c. Pembelajaran dengan buku
 - d. Pembelajaran di kantin
9. Kurikulum memerlukan suatu Inovasi yang bertujuan untuk...
- a. Sistem pendidikan semakin baik
 - b. Mengubahnya saja
 - c. Pembaharuan
 - d. Kemajuan
10. Dibawah ini faktor terjadinya inovasi adalah...
- a. Adanya perubahan
 - b. Adanya suatu masalah yang dirasakan
 - c. Adanya perubahan dan pembaharuan
 - d. Adanya suatu ketakutan

Essai

1. Dalam etimologi dan beberapa istilah kurikulum diambil dari beberapa bahasa dan pengertian, salah satunya istilah "jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam bidang kehidupannya" coba jelaskan menurut anda istilah tersebut !
2. Tahap pengertian tentang kurikulum terbagi menjadi 2 fase, bisa dikatakan terbagi dalam fase lama dan fase baru. Coba anda jelaskan secara rinci kesimpulan dari kedua fase tersebut

!

3. Dalam metode khusus pembentukan suatu unsur pembaharuan dalam inovasi dilihat dari beberapa implementasi. Coba anda sebutkan apa saja tahap yang menyangkut dalam implementasi inovasi tersebut!
4. Coba anda sebutkan dari tahun berapa hingga tahun berapa kurikulum pendidikan di Negara kita melawati sistem inovasi yang pernah terjadi! Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya atau adanya inovasi, coba jelaskan salah satu faktor pendorong terjadinya atau adanya faktor yang mendorong terjadinya atau adanya inovasi!

BAGIAN KEDELAPAN

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Kebijakan Kurikulum 2013
- Konsep Kebijakan kurikulum 2013
- Kemampuan guru dalam implementasi kurikulum.

TUJUAN

Mahasiswa memahami Efektifitas dalam implementasi manajemen kurikulum pada satuan pendidikan.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori teori perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan.

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB VIII

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam perspektif administrasi, kebijakan diartikan sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain.⁶⁴ Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan bahwa: (1) Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan, (2) Yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana, (3) Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi Sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.⁶⁵

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program- program pemerintah.⁶⁶ Selanjutnya dapat

⁶⁴ Yoyon Bahtiar Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Press. h. 34.

⁶⁵ Hasbullah. 2010. *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press. h. 37.

⁶⁶ Yoyon, Bahtiar Irianto. 2011. *Kebijakan*

dikemukakan bahwa kebijakan adalah proses politik sebagai kebutuhan, sasaran, dan maksud yang diterjemahkan ke dalam satu perangkat sasaran, hukum, kebijakan, dan program yang mempengaruhi alokasi sumberdaya, tindakan, dan keluaran yang menjadi dasar evaluasi, perbaikan, dan kebijakan baru.⁶⁷

Secara konseptual, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan

Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model.
Jakarta: Rajawali Press. h. 34.

⁶⁷ Bruce S. Cooper, Lance D. Fusarelli, E. Vance Randall. 2004. *Better Policies. Better Schools, Theories and Applications.* USA: Pearson Education. h. 3.

perundang-undangan.

Kedua; dalam konteks tata negara dikemukakan bahwa:

1. Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).⁶⁸

Pendapat lain menjelaskan bahwa konsep kebijakan negara, yaitu:

⁶⁸ Yoyon, Bahtiar Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Press. h.35.

1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak atau kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan tetapi merupakan tindakan yang direncanakan lebih dahulu;
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan yang berdiri sendiri;
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dan bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, ekonomi, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya;
4. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif mungkin juga negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa berbentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi

keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana sangat diperlukannya campur tangan pemerintah.⁶⁹

Kebijakan merupakan keharusan dalam eksistensi suatu organisasi. Artinya, kebijakan merupakan produk organisasi dalam rangka merespon kebutuhan internal dan eksternal organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi sehingga visi, misi dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, berbagai undang-undang, peraturan, keputusan, dan panduan organisasi dihasilkan sebagai kebijakan organisasi.

B. Kebijakan Dalam Manajemen Pendidikan

Kebijakan publik dalam pendidikan dibuat agar menjamin pendidikan menjadi kepentingan publik. Pada awalnya persekolahan, pendidikan merupakan urusan swasta yang disediakan oleh sebagian kecil masyarakat. Namun sekolah diciptakan pemerintah untuk seluruh warga.

Selanjutnya kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang diatur tidak

⁶⁹ Hasbullah. 2010. *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press. h. 40

hanya kurikulum, pedagogi, dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru, dan pemeliharaan sarana fisik sekolah.

Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan, dan 2) melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.⁷⁰

Menurut Rahayu Kusuma Dewi, kebijakan adalah ketetapan yang memuat berbagai prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁷¹ Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.⁷²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dalam bidang pendidikan diwujudkan sebagaimana dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan

⁷⁰ Nanang Fattah. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 132-

⁷¹ Rahayu Kusuma Dewi. 2016. *Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustaka Setia. Cetakan I.* h.16.

⁷² Said Zainal Abidin. 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas, , h.23.

dan atau keputusan Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi.

Sebagai perwujudan dari reformasi di Indonesia adalah desentralisasi termasuk otonomi dalam bidang pendidikan dengan mengeluarkan undang-undang tentang otonomi daerah. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah. Tentu saja, hal ini sangat riskan dilakukan karena berhubungan langsung dengan masyarakat atau rakyat kecil “akar rumput” (*grass roots*) yang semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah.
- b. Desentralisasi pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi para kepala dinas pendidikan. Hal ini membuka peluang bagi terciptanya raja-raja kecil di daerah, khususnya ketika kontrol pemerintah provinsi dan pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, para kepala dinas pendidikan pemerintah kota atau kabupaten tersebutlah yang secara individual memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam

pengambilan keputusan *decision making*.

- c. Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang semakin lebar Antara si kaya dan si miskin. Hal ini bisa terjadi karena daerah-daerah dengan PAD besar akan memberikan porsi dana pen- dapatannya itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. Sementara daerah lainnya tidak mungkin melaksanakannya. Hal itu sampai terjadi karena mereka tidak memiliki dana yang cukup besar untuk menambah insentif bagi para guru-guru mereka.
- d. Desentralisasi pendidikan ini juga bisa berdampak negatif terhadap pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah- daerah kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas, sekaligus secara kuantitas guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya tersebut. Bagaimana halnya dengan daerah-daerah yang PAD-nya sangat kecil? Mereka akan ditinggalkan oleh guru-guru mereka. Akhirnya tempat-tempat tertentu di Indonesia ini akan kelebihan tenaga guru, sementara daerah lainnya akan mengalami kekurangan tenaga guru.
- e. Ada juga yang mengatakan bahwa desentralisasi ini hanya akan memindahkan

praktik-praktik kotor korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Praktik KKN dibidang pendidikan yang selama ini banyak dilakukan oleh para penguasa orde baru, ada kemungkinan akan bergerak secara perlahan, tetapi pasti menuju daerah-daerah yang 'basah' dan kaya. Bila daerah-daerah tersebut membuka peluang untuk mereka menjalankan misi dan visi malingnya, tidak akan mustahil KKN akan menjadi semakin "sukses" berkembang di daerah tersebut.

- f. Selain penjelasan diatas, kita dapat juga memprediksi tentang kemungkinan beragamnya hasil belajar peserta didik. Hal ini disebabkan pembuatan silabus materi pembelajaran dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut memberi kemungkinan terjadinya keberagaman hasil belajar siswa. Kalau kondisi sudah menjadi begini rupa, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan angka-angka yang dapat berbicara dalam skala nasional. Pada akhirnya, kondisi ini akan mengarah pada titik meratanya mutu/kualitas hasil belajar/tamatan siswa kita.⁷³

⁷³ Sam M. Chan dan Tuti T. Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press. h.10-11

Sebagai kebijakan publik, dalam desentralisasi melalui analisis SWOT, ada beberapa dimensi analisis, yaitu:

1. Kekuatan Kebijakan Desentralisasi

Kekuatan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah:

- a. Sudah merupakan kebijakan yang populis;
- b. Mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari wakil rakyat yang menduduki kursi DPR-RI;
- c. Sebagai hal yang telah lama ditunggu tunggu menyusul adanya perubahan social politik;
- d. Kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tahun 2003;
- e. Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi.

Ketentuan di atas merupakan kebijakan yang populis, desentralisasi pendidikan pasti didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di daerah. Kekuatan lain yang juga amat mendukung bagi lahirnya kebijakan ini adalah dukungan dari pihak legislatif.

Kekuatan lainnya adalah kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menghadapi perubahan. Termasuk dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat menyikapi desentralisasi pendidikan. Anggota masyarakat amat dituntut partisipasinya dalam menjalani perubahan tersebut.

Kekuatan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana anggaran pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan anggaran sebelumnya yaitu kurang dari 4%. Kita berharap anggaran pendidikan yang disepakati 20% dari APBN dijadikan prioritas utama sebelum penganggaran bidang lainnya.

2. Kelemahan Kebijakan Desentralisasi

Adapun kelemahann yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui UU Otonomi Daerah adalah:

- a. Kurang siapnya SDM daerah terpencil;
- b. Tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya daerah- saerah miskin;
- c. Mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging;
- d. Menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus;
- e. Dijakdkan komoditas;
- f. Belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan Depdiknas dalam mengalokasikannya. Walhasil akan

menguntungkan departemen-departemen lain yang mengelola pendidikan atau pelatihan, padahal departemen lain telah memperoleh dana dari APBN. Sementara itu, hasilnya masih diragukan karena ditangani bukan oleh para ahli/ profesional pendidikan.

3. Peluang Implementasi Kebijakan

Setelah melihat kekuatan sekaligus kelemahan dari kebijakan desentralisasi pendidikan, harus dicari celah peluang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Mengingat kebijakan ini lahir dari arus paling bawah (*grass roots*), walaupun baru terlaksana sekarang di era reformasi, kebijakan ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam hal keberhasilan pelaksanaannya karena telah menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak.

4. Tantangan Implementasi

Adapun tantangan yang harus diperhitungkan dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah munculnya individu-individu/ lembaga-lembaga serakah yang mencari kesempatan dalam kesempitannya. Sekali lagi bagaimanapun harus diwaspadai mental-mental korup haus uang.

Tantangan lainnya adalah memberi pengertian kepada lembaga di luar Depdiknas yang selama ini memperoleh *budget* dari Depdiknas untuk kepentingan kegiatan pelatihan/pendidikan. Hal ini

harus dipertegas sehingga tidak terjadi dualisme dalam anggaran pendidikan yang pada akhirnya merugikan Depdiknas. Tentu ini akan mengurangi jatah bagi biaya pendidikan yang akan merugikan sekaligus mempengaruhi proses pembangunan masyarakat madani.

Dalam praktiknya, maka implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui undang-undang otonomi daerah, pada kenyataannya menunjukkan bahwa terdapat proses implementasi kebijakan yang tidak melibatkan seluruh *stakeholders*, khususnya daerah-daerah yang secara finansial belum memiliki kemampuan untuk turut mengimplementasi kebijakan tersebut. Sesungguhnya masih ada daerah-daerah tertinggal di kabupaten-kabupaten yang harusnya menjadi bagian integral dalam proses pengimplementasian kebijakan.

Namun ada kecenderungan yang kuat menciptakan pemekaran kabupaten baru, padahal dari segi kemampuan keuangan daerah sejatinya masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, sehingga sangat dipaksakan untuk menjadi kabupaten baru sebagai upaya percepatan pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan.

C. Stratifikasi Kebijakan Manajemen

Pendidikan

Dalam praktiknya, kebijakan dibuat oleh top manager atau top leader sehingga memiliki level dalam kebijakannya. Kebijakan pendidikan merupakan produk sistem dan politik pendidikan, oleh karenanya stratifikasi kebijakan pendidikan pada dasarnya sangat luas dan beragam, dari yang bersifat makro seperti UUD 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendidikan, hingga yang bersifat mikro seperti Peraturan Desa, peraturan sekolah dan lain-lain.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah, kebijakan dan kewenangan pengelolaan pemerintahan daerah yang ada bersifat sentralistik, dalam artian kewenangannya ditentukan oleh pemerintah pusat, dan ada kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pengelolaannya atau desentralisasi, termasuk dalam hal ini kebijakan di bidang pendidikan.

Stratifikasi kebijakan pendidikan juga dapat dilihat dari daya ikat terhadap wilayah pemberlakuan. Dalam konteks ini, ada kebijakan pendidikan yang bersifat nasional dan ada yang bersifat daerah, artinya ada kebijakan pendidikan yang hanya berlaku di suatu provinsi, atau berlaku di suatu kabupaten/kota tertentu saja. Sedangkan bila dilihat dari sisicakupannya, ada kebijakan pendidikan

yang bersifat makro, ada juga kebijakan pendidikan yang bersifat makro.

Secara ringkas, stratifikasi kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. Karena ruang cakupannya secara nasional, maka kebijakan ini akan berlaku di semua wilayah NKRI. Contoh kebijakan ini seperti pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), dan Ujian Nasional (UN).

Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. Karena ruang cakupannya berada di tingkat daerah, maka hanya berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Wujud kebijakan pendidikan di daerah ada dua macam;

Pertama, Peraturan Daerah (PERDA) tentang pendidikan yang perumusannya berada di tangan eksekutif (Bupati/Walikota) dan legislatif (DPRD),

Kedua; keputusan/peraturan bupati/walikota tentang pendidikan. Contoh; kebijakan pendidikan yang bersifat desentralisasi misalnya penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari SD, hingga

SMP/MA/SMK, keputusan Bupati/walikota tentang hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan di daerahnya, dan lain-lain.

Secara umum ada empat tingkat kebijakan pemerintah, yaitu:

1. Tingkat kebijakan nasional (*national policy level*), biasanya sebagai penentu kebijakan pada level ini adalah MPR/DPR/DPD, berlaku secara nasional disebut juga sebagai kebijakan administratif. Salah satu produk MPR (bersama DPR dan DPD) adalah konstitusi UUD 1945 berikut amandemennya yang berisi pasal-pasal tentang pendidikan nasional, dan selalu menjadi konsideran bagi perumusan kebijakan pendidikan di bawahnya.
2. Tingkat kebijakan umum; tingkat kebijakan ini pada biasanya sangat ditentukan oleh pemerintah atau eksekutif, karenanya sering disebut sebagai kebijakan eksekutif. Sifat kebijakan pendidikan yang bersifat umum (*general policy level*), merupakan kebijakan pendidikan eksekutif. Oleh karena yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. Termasuk ke dalam kebijakan pendidikan eksekutif ini adalah:
 - a. Undang-undang
Kekuasaan membuat undang-undang berada

di tangan Presiden meskipun harus dengan persetujuan DPR. Produk kebijakan pendidikan dalam bentuk UU antara lain: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan kebijakan pendidikan yang dibuat dalam rangka mengoperasikan undang-undang, kekuasaan pembuatannya ada pada kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Produk kebijakan pendidikan dalam bentuk PP antara lain: PP No. 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, dan lain-lain.

c. Keputusan, Peraturan dan Instruksi Presiden

Berisikan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan yang kekuasaan pembuatannya ada di tangan Presiden. Contoh kebijakan pendidikan dalam kategori ini antara lain Kepres RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

3. Tingkat kebijakan khusus (*special policy level*); sebagai penentu tingkat kebijakan ini adalah para Menteri sebagai pembantu Presiden, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk kebijakannya seperti Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Menteri. Contoh kebijakan pendidikan yang bersifat khusus pada level kementerian antara lain:

- a. Keputusan Mendiknas RI No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru;
- b. Permendiknas RI No. 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru;
- c. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BLN No. 03/V/PB/2010; Nomor 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- d. Permendikbud RI No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

Tingkat kebijakan teknis (*technical policy level*); lazim disebut kebijakan operatif, karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentu kebijakan ini berada pada Pejabat Eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan

lembaga non-departemen. Produk kebijakannya dapat berupa peraturan, keputusan dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan *technical policy level* inilah para gubernur, bupati, kepala dinas dan sebagainya, melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah masing masing.

D. Pengembangan Kurikulum 2013

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan keputusan tentang kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Secara sederhana kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, penge- tahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selain itu penataan kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan peraturan presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional.⁷⁴

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi dalam suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan *skill, themes, concept, and topics* baik dalam bentuk *within singel disciplines, across*

⁷⁴ Loeloek Endah Poerwati, Sofan amri. 2013. *Panduan Memahami Kurikulum. 2013*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. h. 68.

*several disciplines, and within and across learner.*⁷⁵

Dengan kata lain bahwa kurikulum terpadu sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran/bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas terhadap peserta didik.

Dikatakan bermakna karena dalam konsep kurikulum terpadu peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh dan realistis. Serta dikatakan luas karena peserta didik tidak hanya dalam suatu ruang lingkup melainkan semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan antara satu dengan yang lain.

Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan:

⁷⁵ Loeloek Endah Poerwati, Sofan amri. 2013. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustaka. h. 28.

- a. Observasi;
- b. Bertanya (wawancara);
- c. Bernalar; dan
- d. Mengkomunikasikan (Mempesentasikan) apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima mata pelajaran.

Adapun objek pembelajaran kurikulum 2013 adalah fenomena alam, sosial, seni dan budaya. Melalui pendekatan tersebut peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan serta tantangan dimasa mendatang.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi (*outcomes-based curriculum*) dengan pengembangan menggunakan pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta penilaian hasil belajar diukur dengan pencapaian kompetensi.

Kurikulum 2013 berbassis karakter dan kompetensi harus melibatkan semua komponen (*stakeholders*), termasuk komponen- komponen tersebut antara lain kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan

pembelajaran, pengelolaan sekolah/madrasah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, pengembangan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah/madrasah.

Kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang optimal diantara para guru, sehingga memerlukan pembelajaran berbentuk tim, dan menuntut kerjasama yang kompak diantara para anggota tim. Kerjasama antar guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat.

Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas seperti pada jenjang pendidikan sekolah dasar menengah dimulai dari kelas I dan IV untuk SD, kelas VII SMP dan kelas IX untuk SMA. Apa yang diungkapkan tersebut merupakan asumsi bahwa kurikulum 2013 dapat diterapkan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan dan pada berbagai ranah pendidikan. Meskipun demikian kurikulum tidak dapat digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan pendidikan. Waktu terus berlalu tanpa kompromi.

Keberhasilan Kurikulum 2013 dapat diketahui dari perwujudan indikator standar kompetensi lulusan (SKL) dalam pribadi peserta didik secara utuh. Kata utuh perlu ditekankan, karena hasil

pendidikan sebagai output dari setiap satuan pendidikan belum menunjukkan SKL pada permukaannya saja, atau kulitnya saja.

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 dapat dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya lulusan yang berkualitas, produktif, kreatif dan mandiri;
2. Adanya peningkatan mutu pembelajara
3. Adanya peningkatan perhatian serta partisipasi masyarakat
4. Adanya peningkatan tanggungjawab sekolah;
5. Tumbuhnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara utuh dikalangan peserta didik;
6. Terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM);
7. Terciptanya iklim yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (*joyfull learning*);
8. Adanya proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan (*continous quality improvement*).

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi bukan hanya tanggungjawab sekolah semata tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak: orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan rencana, pelaksanaan,

dan evaluasi pembelajaran dimulai dari analisis karakter dan kompetensi yang akan dibentuk atau yang diharapkan muncul setelah pembelajaran. Bedanya kurikulum lain, kurikulum 2013 lebih fokus dan berangkat dari karakter serta kompetensi yang akan dibentuk kemudian memikirkan mengembangkan tujuan yang akan dicapai.

Semua komponen lebih diarahkan pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik yang diharapkan, baik *real curriculum* maupun *hidden curriculum*. Dalam hal ini semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembentukan karakter dan kompetensi akan semakin efektif hasil yang diperoleh. Untuk mengefektifkan program pendidikan dan meningkatkan kompetensi dalam Kurikulum 2013 diperlukan koordinasi, komunikasi dan jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah baik dalam pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasan.⁷⁶

Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang

⁷⁶ E. Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 65-66.

dipelajari. Peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 bagian umum dikatakan bahwa:

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Dan pada penjelasan pasal 35 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut menuntut perubahan pada berbagai aspek lain terutama dalam implementasinya dilapangan. Pada proses pembelajaran, dari siswa diberi tahu menjadi siswa

mencari tahu, sedangkan pada proses penilaian, dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian out put secara utuh dan menyeluruh, sehingga penambahan jam pelajaran.⁷⁷

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional lebih diperkaya dan dipermudah tata kelola dan implementasinya oleh para guru. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah akselerasi pencapaian mutu pendidikan nasional supaya dapat lebih kompetitif dengan pendidikan bangsa lain yang lebih modern

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik, hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.

Saylor berpendapat sebagaimana dikutip Mulyasa, dalam bukunya Manajemen berbasis sekolah bahwa *"Instruction is thus the implementation of curriculum plan, usually, but not necessarily, involving teaching in the sense of student, teacher interaction in an aducational*

⁷⁷ E. Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, , h. 65-66.

*setting*⁷⁸. Dalam hal ini guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah pembelajaran dihentikan, diubah metodenya atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu.

Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pelatihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan, dan penggunaan metode pembelajaran keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan bagian integral bagi seorang guru sebagai tenaga profesional yang hanya dapat dikuasai dengan baik melalui pengalaman praktik yang intensif.

Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Untuk itu guru harus mendampingi peserta didik menuju kesuksesan belajar atau penguasaan sejumlah kompetensi tertentu.

⁷⁸ E. Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 16

Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik pada umumnya memiliki taraf per-kembangan yang berbeda yang menuntut materi yang berbeda pula. Selain itu aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa proses belajar itu sendiri megandung variasi seperti belajar keterampilan motorik, belajar konsep, belajar sikap, dan seterusnya.

Perbedaan tersebut menuntut pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis belajar yang sedang berlangsung. Aspek didaktis menunjuk pada pengaturan belajar peserta didik oleh guru. Dalam hal ini guru harus menentukan secara tepat jenis belajar manakah yang paling berperan dalam proses pembelajaran tertentu, dengan mengingat kompetensi dasar yang harus dicapai.

Kondisi eksternal yang harus diciptakan oleh guru menunjuk variasi juga dan tidak sama antara jenis belajar yang satu dengan yang lain, meskipun ada pula kondisi yang paling dominan dalam segala jenis belajar. Untuk kepentingan tersebut guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis-jenis belajar, kondisi internal dan eksternal peserta didik serta cara melakukan pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Pembelajaran menyenangkan efektif dan

bermakna dapat dirancang oleh setiap guru, dengan prosedur sebagai berikut.

1. Pemanasan dan Apersepsi

Pemanasan dan apersepsi perlu dilakukan untuk menjajaki pengetahuan peserta didik dengan menyajikan materi yang menarik dan mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru. Pemanasan dan apersepsi ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami peserta didik.
- b. Peserta didik dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi kehidupan mereka
- c. Peserta didik digerakkan atau tertarik dan bernaflu untuk mengetahui hal-hal yang baru

2. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Hal tersebut dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Perkenalkan materi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik.
- b. Kaitkan materi standard dan kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan dan

kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik

- c. Pilihlah metode yang paling tepat dan gunakan secara bervariasi untuk meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar kompetensi baru.

3. Konsolidasi Pembelajaran

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta didik. Konsolidasi pembelajaran ini dapat dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Libatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi dan kompetensi baru.
- b. Libatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan masalah (*problem solving*) terutama dalam masalah-masalah actual.
- c. Letakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu kaitan antara materi standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan dalam kehidupan dalam masyarakat.
- d. Pilihlah metode yang paling tepat sehingga materi standar dapat diproses menjadi

kompetensi dan karakter peserta didik.

4. Pembentukan sikap, kompetensi dan karakter
Pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dorong peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian, kompetensi dan karakter yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Praktekkan pembelajaran secara langsung, agar peserta didik dapat membangun sikap, kompetensi dan karakter baru dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipelajari;
 - c. Gunakan metode yang paling tepat agar terjadi perubahan sikap, kompetensi dan karakter peserta didik secara nyata.
5. Penilaian Formatif
Penilaian formatif perlu dilakukan untuk perbaikan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. Kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik
 - b. Gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam membentuk karakter

dan kompetensi peserta didik.

- c. Pilihlah metodologi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin di capai.

Prosedur pembelajaran efektif dan bermakna sebagaimana diuraikan di atas dapat di lukiskan sebagai berikut.

	ALOKASI WAKTU
PEMANASAN APERSEPSI Tanya jawab tentang pengetahuan dan pengalaman	5-10%
EKSPLORASI Memperoleh/mencari informasi baru	25-30%
KONSOLIDASI PEMBELAJARAN Negosiasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru	35-40%
PEMBENTUKAN SIKAP DAN PERILAKU Pengetahuan diproses menjadi nilai, sikap dan perilaku	10-%
PENILAIAN FORMATIF	10%

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna peserta didik perlu dilibatkan secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran serta pembentukan kompetensi dan karakter. Peserta didik harus dilibatkan dalam tanya jawab yang terarah dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah pembelajaran. Peserta didik harus didorong untuk menafsirkan informasi yang diberikan oleh guru, sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Strategi seperti ini memerlukan pertukaran pikiran, diskusi dan perdebatan dalam rangka mencapai pengertian yang samaterhadap setiap materi standar.

Melalui pembelajaran efektif dan bermakna, kompetensi dapat diterima dan tersimpan lebih baik, karena masuk otak dan membentuk karakter melalui proses yang logis dan sistematis. Dalam pembelajaran efektif dan bermakna setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengalaman sebelumnya. .

Agar peserta didik belajar secara aktif guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna, sedemikian rupa, sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Motivasi yang seperti ini akan dapat tercipta kalau guru dapat meyakinkan peserta didik akan kegunaan materi

pembelajaran bagi kehidupan nyata peserta didik. Demikian juga, guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pembelajaran selalu tampak menarik dan tidak membosankan.

a. Mengorganisasikan Pembelajaran

Dalam mengorganisir pembelajaran guru dituntut memperhatikan yang berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 seperti: pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan.

b. Manajemen dan Pendekatan Pembelajaran

Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan pembelajaran kontekstual (*teaching learning (contextual teaching and learning)*), bermain peran, pembelajaran partisipatif (*participative teaching and learning*), belajar tuntas (*mastery learning*), dan pembelajaran konstruktivisme (*constructivism and Learning*).

c. Manajemen pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter

Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar,

pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Untuk kepentingan tersebut, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar dan waktu yang diperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal.

d. Manajemen Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dalam pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut menentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata,

menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, keberhasilan implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter dapat dilihat dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.⁷⁹

E. Manajemen Implementasi Kurikulum 2013

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut pemerintah melakukan penataan kurikulum.

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pernah diuji coba pada tahun 2004. KBK atau (*Competency Based Curriculum*) dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan khususnya pada jalur pendidikan

⁷⁹ E. Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, , h. 65-66.

sekolah.

Pada hakikatnya kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Burke, mengemukakan sebagaimana dikutip E. Mulyasa bahwa kompetensi: *"....is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, wich become part of his or her being to the exent he or she can statisfactorily perperm particular cognitive, afektive, and psychomotor behaviors"*⁸⁰.

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psiko- motorik dengan sebaik-baiknya. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa kompetensi merupakan penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dengan demikian terdapat hubungan (*link*) antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh

⁸⁰ E. Mulyasa. 2013. h. 66

dunia kerja. Untuk itu, kurikulum menuntut kerjasama yang baik antara pendidikan dengan dunia kerja terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik disekolah.

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai hasil wujud belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari.

Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap sebagai hasil belajar.dengan demikian dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subyektif.

Beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengetahuan (*knowledge*); yaitu kesadaran

dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.

2. Pemahaman (*understanding*); yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (*kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain*).
5. Sikap (*attitude*); yaitu perasaan (sering tidak senang, suka-tidaksuka) atau reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji dan sebagainya.

6. Minat (*interest*); adalah kecendrungan seseorang untuk melakukansesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Berdasarkan analisis kompetensi di atas kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai sesuatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.

Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.

Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk

membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.

F. Landasan Implementasi Kurikulum 2013

Paling tidak terdapat dua landasan teoretis yang mendasari kurikulum 2013 berbasis kompetensi.

Pertama, adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok kearah pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual setiap peserta didik dapat belajar sendiri sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengaturan kelas fleksibel baik sarana maupun waktu, dimungkinkan peserta didik belajar dengan kecepatan yang berbeda, penggunaan alat yang berbeda serta mempelajari bahan ajar yang berbeda pula.

Kedua, pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) atau belajar sebagai penguasaan (*learning for mastery*) adalah salah satu falsafah pembelajaran yang mengatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat semua peserta didik

dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik dengan demikian setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, jika diberikan waktu yang cukup. Jika asumsi tersebut diterima maka perhatian harus dicurahkan kepada waktu yang diperlukan untuk kegiatan belajar.

Dalam hal ini perbedaan antara peserta didik yang pandai dengan yang kurang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari sesuatu atau memecahkan suatu masalah sementara yang pandai bisa lebih cepat melakukannya.

Landasan pemikiran ini memberikan beberapa implikasi dalam pembelajaran:

Pertama, meskipun meskipun secara klasikal pembelajaran harus lebih menekankan pada kegiatan individual dengan memperhatikan perbedaan peserta didik. Dalam hal ini misalnya tugas diberikan secara individu bukan secara kelompok.

Kedua, perlu diupayakan lingkungan belajar yang kondusif, dengan metode dan media yang bervariasi sehingga memungkinkan setiap peserta didik belajar dengan tenang dan menyenangkan.

ketiga, agar setiap peserta didik dapat mengerjakan tugas dengan yang baik dalam pembelajaran perlu diberikan waktu yang cukup terutama dalam penyelesaian tugas dan praktek.

Jika alokasi waktu yang tersedia disekolah tidak mencukupi, maka berilah kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas diluar kelas pada kegiatan ekstra kurikuler. Sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum 2013 berbasis kompetensi yaitu penetapan kompetensi yang akan dicapai, pengembangan strategi untuk mencapai kompetensi dan evaluasi.

Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan tujuan (*goal statement*) yang hendak diperoleh peserta didik, menggambarkan hasil belajar (*learning outcomes*) pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.

Strategi mencapai kompetensi adalah upaya untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan, misalnya: membaca, menulis, mendengarkan, berkreasi dan mengobservasi, sampai terbentuk suatu kompetensi. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi bagi setiap peserta didik.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi; dan pengembangan sistem pembelajaran.

Disamping itu, kurikulum berbasis kompetensi memiliki sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, penilaian dilakukan berdasarkan standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik, pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan individual personal untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, peserta didik dapat dinilai kompetensinya kapan saja bila mereka telah siap, dan dalam pembelajaran peserta didik dapat maju sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.

Berbagai sumber yang dapat diidentifikasi ada lima karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, yaitu; mendayagunakan keseluruhan sumber belajar; pengalaman lapangan; strategi individual personal; kemudahan belajar dan belajar tuntas. Kelima hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Mendayagunakan keseluruhan sumber belajar

Suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Hal tersebut lebih dipersulit lagi oleh suatu kondisi yang turun temurun yang mana guru mendominasi kegiatan pembelajaran.

Dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi,

guru hendaknya tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal peserta didik dituntut tidak hanya mengandalkan diri dari apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan.

Pendayagunaan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar, yang sangat menguntungkan baik bagi guru, maupun bagi peserta didik. Dengan pendayagunaan berbagai sumber belajar secara maksimal, dimungkinkan orang yang belajar menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga pengetahuannya senantiasa aktual, serta mampu mengikuti akselerasi teknologi dan seni yang senantiasa berubah.

Pada hakikatnya tidak ada satu sumber belajar pun yang dapat memenuhi segala macam keperluan belajar mengajar dengan demikian, berbicara sumber belajar perlu dipandang dalam arti luas jamak dan beraneka ragam. Momentum pemilihan sumber suatu belajar, perlu dikaitkan dengan tujuan

yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain sumber belajar dipilih dan digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Dalam keanekaragaman sifat dan kegunaan sumber belajar secara umum dapat dirumuskan kegunaan sebagai berikut:

- a. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses belajar mengajar yang akan ditempuh. Disini sumber belajar merupakan peta dasar yang perlu dijajaki secara umum agar wawasan terhadap proses pembelajaran yang akan dikembangkan dapat diperoleh lebih awal.
- b. Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti menuju pada penguasaan keilmuan secara tuntas.
- c. Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek bidang keilmuan yang dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan yang dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan lainnya.
- d. Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan bidang keilmuan lainnya.
- e. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain yang

- berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu.
- f. Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul yang merupakan konsekuensi logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya kemampuan pemecahan dari orang yang mengabdikan diri dalam bidang tersebut.

G. Implementasi Kurikulum 2013 Merealisasikan SNP

Kedudukan guru profesional merupakan garda terdepan dan ujung tombak implementasi kurikulum dan pembelajaran yang berhadapan langsung dengan anak didik. Dengan kata lain, tanpa guru profesional perubahan kurikulum tidak akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap kualitas pembelajaran dan mutu lulusan pada umumnya.⁸¹

Di samping Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur kebijakan dan arah praktik pendidikan nasional, maka Standar Nasional Pendidikan (SNP)

⁸¹ E. Mulyasa, *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.1.

telah digulirkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Keberadaan SNP tersebut merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berlaku dari Sabang sampai Merauke.

Sesungguhnya dengan ditetapkan- kannya SNP dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta akselerasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

Penataan terhadap empat standar dilakukan terutama dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum 2013. Hasil penataan tersebut dituangkan dalam PP Nomor 32 tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono tanggal 7 Mei 2013. Penataan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan zaman, akselerasi IPTEKS yang berdampak kepada kebutuhan peserta didik.⁸²

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional merupakan jaminan bagi laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Di samping itu, merupakan

⁸² E. Mulyasa, *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.21.

acuan penyelenggaraan serta bentuk akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Jika standar kompetensi dan standar mutu pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional, kemudian dituangkan kedalam kurikulum serta ditunjang oleh guru dan kepala sekolah profesional maka pendidikan dapat diharapkan menghasilkan SDM berkualitas, mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan serta dapat mengikuti percepatan informasi dalam era globalisasi.⁸³

Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah melakukan berbagai penataan dalam standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. dan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Dalam kedua peraturan tersebutdikemukakan bahwa :”standar nasional pendidikan adalah kriteria

⁸³ E. Mulyasa, *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.23.

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia". Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat".

Lebih lanjut Mulyasa menjelaskan bahwa perubahan standar nasional pendidikan dimaksud adalah diselaraskan untuk mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat, baik lokal, nasional maupun global sehingga fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan secara optimal.

Perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional terutama untuk meningkatkan sumberdaya manusia agar masyarakat dan bangsa kita memiliki nilai tambah dan nilai jual sehingga dapat bersaing, bersanding dan bertanding dengan negara-negara lain dalam tatanan global dan internasional.

Penataan standar juga dilakukan dalam rangka pengembangan dan perubahan kurikulum yang secara periodik perlu penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Karena itu penataan lebih difokuskan kepada empat standar dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran.

Empat elemen perubahan tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian, sedangkan standar pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan tidak dilakukan perubahan secara signifikan.

Dengan demikian, kedua peraturan tersebut, baik PP no.19 tahun 2005 dan PP No.32 tahun 2013 masih berlaku dan harus dijadikan pedoman pelaksanaan serta direalisasikan secara efektif, produktif. Penataan pelaksanaan tersebut tidak menambah maupun mengurangi jumlah standar, jumlahnya masih delapan, standarnyaupun masih sama seperti semula.

Delapan standar nasional pendidikan tersebut, garis besarnya sebagai berikut: (Diadaptasi dari PP. No. 32 tahun 2013).

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL tersebut digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. SKL

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah, yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Isi (SI). SI adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. SI mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Ruang lingkup materi dirumuskan dengan mempertimbangkan muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; konsep keilmuan; dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik; Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI); dan penguasaan kompetensi secara berjenjang.
3. Standar Proses (SP). SP adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, serta melakukan pengawasan secara efektif, agar pembelajaran dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK). SPTK adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

- undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik; Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Profesional; dan. Kompetensi Sosial, dan kompetensi spiritual dan moral secara proporsional.
 - d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
 - e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
5. Standar Sarana dan Prasarana (SPS). SPS adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP

dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruangan pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- c. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan

yang harus tersedia.

- d. Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
6. Standar Pengelolaan (SPe). SPe adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Garis besar standar pengelolaan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- b. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku mem- berikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional,

personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

c. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

- 1) Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus;
- 2) Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- 3) Struktur organisasi satuan pendidikan;
- 4) Pembagian tugas di antara pendidik; Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- 5) Peraturan akademik;
- 6) Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 7) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
- 8) Biaya operasional satuan pendidikan.

- d. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
 - e. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah, sedangkan untuk pendidikan tinggi harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagai- mana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
7. Standar Pembiayaan (Spem). Spem adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan

berkelanjutan. Standar pembiayaan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
 - b. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - d. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) Bahan atau peralatan habis pakai; (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.
 - e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
8. Standar Penilaian Pendidikan (SPP). SPP adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar. penilaian hasil

belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dan nilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

H. Asumsi Dalam Implementasi Kurikulum 2013

Dalam Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Konsistensi dan validitas setiap kompetensi harus sesuai dengan asumsi, meskipun tujuannya selalu diuji kembali berdasarkan masukan yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Sedikitnya terdapat tujuh asumsi yang mendasari Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi. Ketujuh asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama: banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional, dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh Karena itu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi

menuntut peningkatan kemampuan professional guru.

Kedua: banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran.

Ketiga: peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Pengembangan potensi tersebut menuntut iklim kondusif yang dapat mendorong peserta didik belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*), serta menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat: peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan bervariasi, dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa-biasa saja, bahkan rendah. Di samping itu, mereka memiliki tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru, sehingga guru harus dapat membantu menghubungkan pengalaman yang sudah dimiliki dengan situasi baru.

Kelima: pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya

secara optimal. Dalam hal ini (Sukmadinata: 2000) memberikan ilustrasi dengan mengumpamakan pendidikan ibarat bertani, petani menyediakan lahan yang gembur, mengatur air, udara, cahaya yang diperlukan tanaman, memupuk, menyayangi dan mencegah tanaman dari hama-hama. Guru seperti petani yang penuh rasa sayang dan perhatian, dengan tekun dan telaten merawat tanaman kesayangannya. Petani tidak perlu menarik-narik pohon supaya tinggi, membeber-beberkan daun supaya lebar, memberi parfum supaya wangi. Kalau pohon tersebut punya potensi tinggi, daun lebar, bunga, atau buahnya wangi, ciri-ciri tersebut akan dicapainya sendiri asalkan diciptakan kondisi dan perlakuan lingkungannya tidak mendukung para peserta didik, seperti halnya tanaman bisa menjadi bonsai.

Keenam: kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi-kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jabaran dari seluruh aspek kepribadian peserta didik, yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

Ketujuh: kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya secara

optimal. Dalam hal ini tugas guru adalah memberikan kemudahan dan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk menemukan ide dan menerapkan strategi belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.

Implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan, karena Kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan.

Pertama: Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Kedua: Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat

dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu.

Ketiga: ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pada semua jenjang pendidikan, sebagai berikut.

Beban belajar di SD/MI

Kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 35 menit.

Beban belajar di SMP/MTs

Dari semula 32 menjadi 38 jam untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit.

Beban belajar di SMA/MA

Kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 45 menit.

Kebijakan penambahan jam ini dimaksudkan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses

pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Implikasi dari penambahan beban belajar ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan mengembangkan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar dan membentuk kompetensi dirinya. dalam pada itu, guru juga dituntut untuk secara kreatif menciptakan lingkungan yang kondusif, dengan manajemen kelas yang efektif, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan (*joyfull teaching and learning*).

I. Perbedaan Dalam Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 Dan KTSP 2006

Perubahan dan pengembangan kurikulum mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan, dalam konteks nasional maupun global. Perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 dapat dikaji perbedaannya dengan KTSP 2006, dalam tabel-tabel

berikut ini (dimodifikasi dan dikembangkan dari materi sosialisasi kurikulum 2013).

Tabel 3
Perbedaan Esensial Kurikulum SD

KTSP 2006	Kurikulum 2013	Status
Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Benarnya
Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar	Mata pelajaran yang dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas	Benarnya
Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain	Bahasa Indonesia sebagai penghubung mapel lain (sikap dan keterampilan berbahasa)	Idealnya

Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda	Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama (saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,	Idealnya
Tiap jenis konten pembelajaran diajar- kan terpisah (<i>separated curriculum</i>)	Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain (<i>cross curriculum</i> atau <i>integrated curriculum</i>)	Baiknya
	Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya	
Tematik untuk kelas III (belum integrative)	Tematik Integratif untuk kelas I-VI	Baiknya

Kurikulum sekolah dasar 2013 lebih ditekankan pada aspek afektif, dengan penilaian yang ditekankan pada nontes dan portofolio.

Dalam implementasi kurikulum yang berbasis

kompetensi dan karakter ini, murid SD idealnya tidak lagi banyak menghafal, karena kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memiliki budi pekerti atau karakter yang baik, sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Berikut adalah perbedaan lebih lanjut kurikulum 2013 untuk sekolah dasar.

1. Tematik Integratif

Pembelajaran tematik integratif sebelumnya hanya dilaksanakan pada kelas rendah saja, dan kelas tinggi setiap mata pelajaran terkesan terpisah atau berdiri sendiri. Dalam implementasi kurikulum 2013, murid sekolah dasar tidak lagi mempelajari masing-masing mata pelajaran secara terpisah. Pembelajaran berbasis tematik integrative yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar ini menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya.

2. Delapan Mata Pelajaran

Untuk tingkat SD, saat ini ada 10 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran untuk

anak SD yang semula berjumlah 10 mata pelajaran dipadatkan menjadi delapan mata pelajaran, yaitu Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni Budaya, IPA, dan IPS. Bahkan semula rencananya hanya enam mata pelajaran saja, karena IPA dan IPS rencananya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lainnya.

3. Pramuka sebagai Ekstra Kurikuler Wajib

Dalam implementasi kurikulum 2013, Pramuka merupakan ekstra- kurikuler wajib dan itu diatur dalam undang-undang. Pramuka ini menjadi ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah, untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan layanan secara profesional, maka dalam implementasi pramuka, Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenpora.

4. Bahasa Inggris hanya Ekskul

Sebelumnya terjadi polemik mengenai bahasa Inggris di SD, yaitu bahasa Inggris akan dihapus dari kurikulum. Rencana penghapusan bahasa Inggris dari kurikulum SD ini didasari kekhawatiran akan membebani siswa dan memprioritaskan terhadap penguasaan Bahasa Indonesia. Ternyata untuk tingkat SD ini, dalam kurikulum baru 2013 Bahasa Inggris termasuk dalam kegiatan ekstra kurikuler bersama dengan Palang Merah Remaja (PMR), UKS,

dan Pramuka.

5. Belajar di Sekolah Lebih Lama

Pemadatan mata pelajaran dalam kurikulum 2013 bukan mengurangi jam belajar, justru membuat lama belajar anak di sekolah bertambah. Metode baru pada kurikulum ini mengharuskan anak-anak untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan. Untuk kelas I-III yang awalnya belajar selama 26-28 jam dalam per minggu bertambah menjadi 30-32 jam per minggu. Sedangkan untuk kelas IV-VI yang semula belajar selama 32 jam per minggu di sekolah bertambah menjadi 36 jam per minggu.

Itulah isi perubahan kurikulum baru yang rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran baru Juli 2013 untuk anak-anak SD. Sistem pembelajaran berbasis tematik integrative ini telah dijalankan di banyak negara, seperti Inggris, Jerman, Perancis, Finlandia, Skotlandia, Australia, Selandia Baru, Sebagian Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Filipina. Penambahan jam belajar di sekolah dianggap masih sesuai karena dibandingkan dengan negara lain, Indonesia terbilang masih singkat durasinya untuk anak usia 7-9 tahun. Dengan pemadatan mata pelajaran dan pembelajaran berbasis tematik, anak-anak jga tidak akan lagi kerepotan membawa buku yang banyak dalam

tasnya.

Selanjutnya, perbedaan esensial dari kurikulum SMP adalah sebagai berikut

Tabel 4
Perbedaan Esensial Kurikulum SMP

KTSP 2006	Kurikulum 2013	Status
Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, keterampilan, dan pengetahuan)	Benarnya
Mata pelajaran dirancang sendiri berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri	Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas	Benarnya
Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan <i>carrier of knowledge</i>	Idealnya

Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda	Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....	Idealnya
TIK adalah mata pelajaran sendiri	TIK merupakan sarana pembela- jaran, digunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain	Baiknya

Adapun perbedaan esensial kurikulum SMA/SMK dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
Perbedaan Esensial Kurikulum SMA/SMK

KTSP 2006	Kurikulum 2013	Status
Mata pelajaran ter- tentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (Sikap, keterampilan, pengetahuan) dengan penekanan yang berbeda	Benarnya

Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri	Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas	Benarnya
Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan <i>carrier of knowledge</i>	Idealnya
Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda	Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....	Idealnya
Untuk SMA, ada penjurusan sejak kelas XI	Tidak ada penjurusan SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat.	Idealnya

SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi	SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap.	Baiknya
Penjurusan di SMK sangat detail (Sampai keahlian)	Penjurusan di SMK tidak terlalu detail (sampai bidang studi), di dalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman	Baiknya

Kurikulum 2013 dipastikan sebagai pembaharuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Menghadapi berbagai perbedaan tersebut, dilakukan langkah penguatan tata kelola dengan cara menyiapkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Buku pedoman pembelajaran yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Guru.
2. Guru dilatih untuk memahami pendayagunaan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan.
3. Pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan

daerah terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Menurut E. Mulyasa dalam rangka menyukseskan implementasi Kurikulum 2013, dan menyiapkan guru yang siap menjadi fasilitator pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas,; hendaknya diadakan musyawarah antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Musyawarah tersebut diperlukan, terutama untuk menganalisis, mendiskusikan, dan memahami buku pedoman dan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013, sebagai berikut:

1. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
2. Pedoman Implementasi Kurikulum 2013
3. Pedoman Pengelolaan
4. Pedoman Evaluasi Kurikulum
5. Standar Kompetensi Lulusan
6. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
7. Buku Guru
8. Buku Siswa
9. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
10. Standar Proses dan Model Pembelajaran
11. Dokumen Standar Penilaian
12. Pedoman Penilaian dan Rapor

13. Buku Pedoman Bimbingan dan Konseling.²¹

Mencermati kelengkapan kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud, nampak jelas bahwa keberadaan kurikulum 2013 merupakan kebijakan pembaharuan pendidikan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setiap lulusan mampu berkompetisi dengan kemajuan pendidikan yang sudah dicapai oleh bangsa lain.

J. Implementasi Kurikulum 2013 Dan Tupoksi Guru

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyaksikan orang-orang yang suka mengkritisi pekerjaan orang lain, padahal pekerjaannya sendiri belum tentu benar. Layaknya seorang komentator sepak bola, yang sangat piawai mengomentari berbagai kurang dan peluang-peluang dalam setiap pertandingan, padahal kalau dia disuruh bermain/bertanding belum tentu bisa. Ini jangan terjadi pada diri kita, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi dilakukan oleh guru.

Sebelum mengomentari pekerjaan orang lain, mengkritisi orang lain, eloknya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kita sebagai guru dan

merealisasi- kannya dengan baik dan bermutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kinerja.

Apa yang diilustrasikan di atas perlu mendapat perhatian, karena pada umumnya banyaknya percekcoan, perselisihan di setiap lembaga, disebabkan oleh kurang pahamnya setiap orang yang terlibat dalam organisasi/lembaga terhadap tupoksinya; boleh jadi juga tidak tahu hak dan kewajiban yang berujung pada menuntut hak tetapi tidak melakukan kewajiban.

Tupoksi guru yang paling utama berkaitan dengan pembelajaran, yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai/memonitor hasil pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat tiga peran atau tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap guru, baik guru senior maupun guru yang masih baru. Ketiga tugas pokok dan fungsi guru tersebut menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, kompetensi, dan karakter yang akan dibentuk, serta memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan

tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dasar, dan mencapai tujuan pembelajaran.

2. Pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat membentuk kompetensi, karakter dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam fungsi pelaksanaan ini termasuk pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam fungsi manajerial pelaksanaan proses pembelajaran, selain tercakup fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi kepemimpinan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dubrin (1990), bahwa fungsi pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang

mempengaruhi pihak lain dalam upaya mencapai tujuan, yang akan melibatkan berbagai proses antarpribadi, misalnya bagaimana memotivasi dan memberikan ilustrasi kepada peserta didik, agar mereka dapat mencapai

tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi pribadinya secara optimal.

3. Pengendalian atau ada juga yang menyebut evaluasi dan pengendalian bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses manajerial terakhir ini perlu dibandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar). Guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

Pembelajaran dapat dikatakan efektif dan efisien, apabila dapat mencapai dan merealisasikan hasil yang diharapkan, membentuk kompetensi dan karakter sesuai dengan kompetensi Inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Untuk kepentingan tersebut

diperlukan manajemen sistem pembelajaran, sebagai keseluruhan proses untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Guru diharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta melakukan pengembangan program, dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program, guru hendaknya tidak membatasi diri pada pembelajaran dalam arti sempit, tetapi harus menghubungkan program-program pembelajaran dengan seluruh kehidupan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pengembangan program juga harus dilakukan secara adaptif, fleksibel, dan situasional; agar senantiasa dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Hal ini penting, karena guru merupakan seorang manajer pembelajaran, yang bertanggung-jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap perubahan dan perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik,

meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta memonitor dan mengevaluasi perubahan program.

Menjalankan tugas pokok dan fungsi guru diperlukan kompetensi. Itu artinya tupoksi bisa dilakukan dengan baik, apabila ditunjang oleh kompetensi yang memadai, serta mengacu pada kemampuan dalam melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. dalam hal ini, kompetensi guru menunjuk kepada performansi dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performansi merupakan perilaku nyata, yang tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan

suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning process*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sejalan dengan itu, *Finch and Crunkilton, (1992: 220)* mengemukakan bahwa: "*Competencies are those tasks, skills, attitudes, values, and appreciation that are deemed critical to successful employment.*"

Kalimat tersebut mengandung makna bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, nilai, dan apresiasi yang diungkapkan secara kritis untuk keberhasilan kerja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang diterapkan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, emosional, dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk standar profesi, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Penguasaan materi

meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari.

Penyesuaian substansi dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta pemahaman manajemen pembelajaran. Hal ini menjadi penting dalam memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah. Dengan menguasai materi pembelajaran, guru dapat memilih, menetapkan, dan mengembangkan alternatif strategi dari berbagai sumber belajar yang mendukung pembentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD).

Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik oleh para guru menjadi prasyarat dalam pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu peserta didik. Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik merupakan upaya memfasilitasi perkembangan potensi individu secara

optimal dan bersinergi antara pengembangan potensi pada setiap aspek kepribadian.

Upaya memfasilitasi perkembangan setiap aspek kepribadian dalam pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada pembentukan individu yang utuh dalam kompetensi kecakapan hidup yang bertakwa, bermartabat, bermoral, dan bertanggung jawab. Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan instuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, dan kritis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakukan pembelajaran yang mendidik. Di samping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertakwa, serta sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan

bertanggung jawab. Pengembangan keempat standar kompetensi guru tersebut perlu didasarkan pada landasan konseptual, landasan teoretik, dan peraturan perundangan yang berlaku; landasan empirik dan fenomena pendidikan yang ada, kondisi, strategi, dan hasil di lapangan, serta kebutuhan *stakeholders*.

Standar kompetensi guru merupakan jabaran tugas dan fungsi guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Standar kompetensi di atas, selanjutnya harus dijabarkan ke dalam indikator standar kompetensi: rumpun kompetensi, butir kompetensi, dan indikator kompetensi; serta pengalaman belajar dan asesmen sebagai tagihan konkret yang dapat diukur dan diamati untuk setiap indikator kompetensi.

Dalam perkembangannya; pemerintah merumuskan empat kompetensi guru, yang mencakup kompetensi profesional, kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut, meskipun secara teoretis konseptual dapat dikaji secara terpisah satu dengan yang lainnya; tetapi dalam pelaksanaannya menyatu membentuk kepribadian

guru, yang satu sama lain saling terintegrasi membentuk pribadi guru.

Seperti dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

BAGIAN KESEMBILAN

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bahasan :

Cakupan Materi:

- Manajemen Pengembangan Kurikulum Sentralistik
- Manajemen Pengembangan Kurikulum Desentralistik
- Model-Model Pengembangan Kurikulum
- Organisasi Kurikulum

TUJUAN

Mahasiswa memahami model dan organisasi dalam manajemen pengembangan kurikulum.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu mengaplikasikan teori perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan.

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Memahami, menerapkan, dan menganalisis model dan organisasi pengembangan kurikulum.

BAB IX

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Manajemen Pengembangan Kurikulum Sentralistik

Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pusat (pemerintah). Pada negara yang bersifat kesatuan seperti Indonesia, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal sentralisasi berada pada tingkat pemerintah federal (pusat) atau tingkat negara bagian. Dalam manajemen pengembangan kurikulum yang terpusat atau sentralistik, bukan hanya tugas, wewenang dan tanggung jawab pengembangan kurikulum yang dipegang oleh pejabat pusat, tetapi juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan di pusat. Biasanya daerah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan hanya mengembangkan kurikulum yang sudah ada.

Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku diseluruh wilayah negara. Dalam manajemen kurikulum sentralistik, bisa jadi seluruh

perangkat kurikulum, mulai dari landasan atau dasar-dasar pengembangan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, silabus atau garis besar program pembelajaran, rincian materi dan kegiatan pembelajaran, buku, media, alat-alat penunjang, penilaian hasil belajar beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya disusun oleh pusat. Di pihak lain, bisa saja yang disusun oleh pusat. Di pihak lain, bisa saja yang disusun hanya landasan atau dasar-dasar penyusunan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, sedangkan penjabaran lebih lanjut dalam silabus, satuan pelajaran, rincian materi, buku, media dan alat pembelajaran dikembangkan oleh daerah atau satuan pendidikan (sekolah).

- a. Kurikulum seragam untuk seluruh daerah dan sekolah, dapat dikembangkan standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional.
- b. Lebih mudah dalam pengendalian atau pengawasan dan evaluasinya karena kurikulum seragam.
- c. Pembinaan para pelaksana kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakannya hampir sama.
- d. Penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk setiap

- daerah dan satuan pendidikan dan
- e. Memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional karena desain atau rancangan kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh daerah dan satuan pendidikan.

Tabel 1
Ciri sentralistik pada kurikulum yang berlaku di
Indonesia

No .	Nama Kurikulum	Ciri Sentralistik
1.	Rencana Pelajaran 1960	Rumusan Keputusan MPRS Nomor II/MPRS/1960 mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana, yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam pelaksanaan- nya di berbagai sekolah sesuai dengan jiwa dari keputusan MPRS tersebut.

		Kurikulum yang berlaku tunggal dari pusat sampai daerah.
2.	Kurikulum 1968	Awal masa Orde baru terdapat TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan kebudayaan, dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai pembentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945. Lembaga pendidikan dan strukturnya disederhanakan, perkembangan pramuka sangat diperhatikan pemerintah. Kurikulum yang berlaku tunggal dari pusat sampai daerah.

3.	Kurikulum 1975	Tujuan-tujuan pendidikan dijabarkan secara sentralistik yang dijabarkan melalui tujuan intruksional umum, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus dan berbagai dan berbagai rincian lainnya sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut. Kurikulum yang berlaku tunggal dan seragam dari pusat sampai daerah.
4.	Kurikulum 1984	Masa ini ditandai dengan tiga ciri kebijakannya, yaitu semesta, menyeluruh dan terpadu. Kebijakan ini menghen- daki satu sistem dan pengelola tunggal terhadap sistem ter- sebut. Kurikulum seragam pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.	Kurikulum 1994	Kurikulum 1994 merupakan respons terhadap UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. UU ini memiliki semangat sentralistik

		yang kuat, kurikulum di atur secara nasional. Tujuan, isi, metode dan evaluasi kurikulum, serta pembelajaran masih ditentukan oleh pemerintah pusat.
--	--	--

Sumber: Pusat Kurikulum, 2007, Hidayat dan Kemendikbud 2013

Tabel atas memperlihatkan bahwa hampir semua kurikulum yang berlaku di Indonesia (kecuali kurikulum 2006) yang merupakan kurikulum sentralistik. Bahkan kurikulum 2013 masih mempertahankan ciri sentralistiknya. Selain kelebihan, terdapat beberapa kekurangan dari manajemen kurikulum sentralistik, yaitu:

- a. Wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan dan tingkat kemajuannya, kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut.
- b. Pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana diseluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan
- c. Penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak

hambatan dan kemungkinan penyimpangan.

Kelebihan dan kekurangan jenis manajemen pengembangan kurikulum sentralistik memang sangat tergantung pada keragaman kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi suatu negara atau daerah. Keragaman tersebut dapat juga menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahan yang seharusnya dapat dikelola demi terlaksananya kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Manajemen Pengembangan Kurikulum Desentralistik

Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum (evaluasi dan penyempurnaan), dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum demikian disebut pengembangan kurikulum berbasis sekolah (*School Based Curriculum Development* atau SBCD) atau biasa disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum disusun pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikannya.

Penyusunan jenis kurikulum SBCD dapat

mencakup seluruh komponen kurikulum atau hanya sebagian komponen. Penyusunannya dapat dilakukan oleh seorang, sekelompok atau seluruh guru dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan/program satuan pendidikan dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan masyarakat sekitarnya. SBCD merupakan pengembangan kurikulum yang berbeda bahkan dapat berlawanan dari pengembangan kurikulum birokratis (mengikuti gagasan, konsep pemegang kebijakan, hierarkis dari sekolah dasar sampai menengah).

Dalam pengembangan SBCD, desain kurikulum yang meliputi sarana atau tujuan kurikulum, materi atau isi kurikulum, model pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, karakteristik dan tahap perkembangan sekolah dan masyarakat tempat sekolah berada. Kurikulum menjadi lebih bermakna karena bertolak dari situasi dan kondisi setempat dan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan setempat. Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan akan menghasilkan desain kurikulum yang beragam, tetapi lebih mudah dipahami, dikuasai, dan dilaksanakan oleh guru sebab mereka yang mengembangkan atau minimal ikut serta dalam pengembangannya.

Tabel 2

Ciri Desentralistik Kurikulum 2006 (KTSP)

No	Komponen Kurikulum	Ciri Desentralistik
1.	Tujuan	Kurikulum satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK serta departemen yang menangani urusan pemerintahan dibidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

		Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada paduan yang disusun oleh badan standar Nasional Pendidikan (BSNP).
2.	Isi	Latar belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP), tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP sesuai dengan karakteristik sekolah.
3.	Metode	Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Sekolah dan kepala sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum, dan standar kompetensi di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau provinsi.

4.	Evaluasi	Evaluasi pembelajaran berbasis kelas, proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar/kompetensi siswa. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
----	----------	--

Sumber: Pusat Kurikulum, 2007

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat sehingga satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat dan
- b. Lebih mudah dilaksanakan karena disain kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan yang ada di sekolah dan

masyarakat sekitar.

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, atau tidak semua satuan pendidikan/daerah memiliki guru atau orang yang ahli atau cakap dalam pengembangan kurikulum
 - b. Kurikulum dapat bersifat lokal, lulusannya kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional
 - c. Desain kurikulum sangat beragam, dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar secara nasional dan
 - d. Kepindahan peserta didik dari satu sekolah atau daerah ke sekolah atau daerah lain dapat menimbulkan kesulitan.
1. Pengertian Model dan Pengembangan Organisasi Kurikulum

Model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Dalam pengembangan kurikulum, model dapat merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan

tentang salah satu bagian kurikulum.

Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi dan model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak sekolah/fakultas mempunyai rancangan untuk satu tahun, mereka telah memikirkan polanya untuk memecahkan masalah pendidikan atau prosedur yang tidak dapat dihindari, walaupun begitu mereka tidak mempunyai label kegiatannya sebagai rancangan.

Menurut Triwiyanto, (2015:86) perencanaan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan fungsi atau proses manajemen kurikulum dan pembelajaran. fungsi atau proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses manajemen kurikulum tersebut terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Rusman (2011:21) mengatakan bahwa perencanaan kurikulum sangat tergantung pada pengembangan kurikulum dan tujuan kurikulum yang akan menjadi penghubung teori-teori pendidikan yang digunakan. Menurut Soetopo dan Soemanto (1993:40) manajemen

kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup banyak perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Organisasi suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Definisi ini menekan pada keharusannya sebuah organisasi didasarkan pada interaksi sosial diantara anggota dengan lingkungannya supaya tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Istilah pengembangan menunjukan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami

penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut.

Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata *curir* dan *curere*. Pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish.

Selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaannya.

Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kurikulum yaitu dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

C. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Menurut Ruhimat, T. dkk (2009: 74) Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*) suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan.

Model pengembangan kurikulum ini digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, dimana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sekolah.

a. Model Tyler

Model Tyler adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan, dalam bukunya *Basic Principles of Curriculum and Instruction. The Tyler Rationale*, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan, dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan

b. Menentukan Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran

akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan, sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan terperinci.

Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Tyler, yaitu:

- hakikat peserta didik,
- kehidupan masyarakat masa kini, dan
- pandangan para ahli bidang studi.

Penentuan tujuan pendidikan dengan berdasar kepada ketiga aspek diatas, selanjutnya difilter oleh nilai-nilai filosofis masyarakat dan filosofis pendidikan serta psikologi belajar.

c. Menentukan Proses Pembelajaran

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Pengalaman peserta didik akan sangat membantu dalam terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan pendidikan atau sumber belajar, yang tujuannya untuk

membentuk sikap, pengetahuan dan keterampilan sehingga muncul perilaku yang utuh.

- d. Menentukan Organisasi Pengalaman Belajar
Pengalaman belajar sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan dan isi atau materi belajar. Tahapan-tahapan belajar yang tersusus dengan rapi akan sangat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran. Kejelasan materi dan proses pembelajaran akan memberikan gambaran mengenai jenis evaluasi yang akhirnya dapat digunakan.
- e. Menentukan Evaluasi Belajar
Menentukan evaluasi belajar yang cocok merupakan tahap akhir dalam model Tyler. Dalam menentukan evaluasi belajar hendaknya mengacu pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran serta proses pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, hendaknya merujuk pula pada prinsip-prinsip evaluasi yang ada.
- f. Model Taba
Model Taba merupakan modifikasi model Tyler. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Menurut Taba, guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang

dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai innovator dalam pengembang kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Taba. Dalam pengembangannya, model ini lebih bersifat induktif, berbeda dengan model tradisional yang deduktif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru.
 - b) Menguji unit eksperimen.
 - c) Mengadakan revisi dan konsolidasi
 - d) Pengembangan keseluruhan kurikulum (*developing' a framework*).
 - e) Implementasi dan desiminasi.
- g. Model Administratif

Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah (*top down*) atau staff lini (*line-staff procedure*), artinya dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim tertentu. Langkah pertama adalah pembentukan ide awal yang dilaksanakan oleh para pejabat tingkat atas, yang membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangagn kurikulum Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah

dalam pengembangan kurikulum.

Langkah kedua adalah membentuk suatu tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari para ahli. Tim ini bertugas untuk mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi pengembangan kurikulum yang selanjutnya menyusun kurikulum secara operasional berkaitan dengan pengembangan atau perumusan tujuan pendidikan maupun pembelajaran.

Langkah ketiga, kurikulum yang sudah selesai disusun kemudian diajukan untuk diperiksa dan diperbaiki oleh tim pengarah. Tim ini melakukan penyesuaian antara aspek-aspek kurikulum secara terkoordinasi dan menyiapkan secara sistem dalam rangka uji coba maupun dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan (*desiminasi*). Pelaksana uji coba adalah tenaga profesional yang tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum.

Supaya uji coba tersebut menghasilkan masukan yang efektif maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang fungsinya untuk memperbaiki atau menyempurnakan berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

h. Model Nicholls

Dalam bukunya *Developing a Curriculum: a Practical Guide* (1978), Howard Nicholls menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nicholls menggunakan pendekatan siklus seperti model Wheeler. Model Nicholls digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada lima langkah pengembangan kurikulum menurut Nicholls, yaitu:

- a) Analisis sesuatu
- b) Menentukan tujuan khusus
- c) Menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran
- d) Menentukan dan mengorganisasi metode
- e) Evaluasi

i. Model Dynamic Skilbeck

Menurut Skilbeck, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model Dynamic, adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah (*School Based Curriculum Development*). Skilbeck menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan

berjalan dengan baik, maka setiap pengembang termasuk guru perlu memahami lima elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Skilbeck menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah. Menurut Skilbeck langkah-langkah pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis sesuatu
 - b) Memformulasikan tujuan
 - c) Menyusun program
 - d) Interpretasi dan implementasi
 - e) Monitoring, feedback, penilaian, rekonstruksi
- j. Model Saylor, Alexander, Dan Lewis
- Model ini membentuk curriculum planning process (proses perencanaan kurikulum). Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut mereka adalah "***a plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated***"; sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar bagi orang yang akan dididik. Namun, rencana kurikulum tidak dapat dimengerti

sebagai sebuah dokumen tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk porsi atau bagian kurikulum tertentu.

4. Organisasi Kurikulum

Menurut Ruhimat, T. dkk,(2009: 83). Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan/ isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pengembangan dapat dicapai secara efektif.

Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran, yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administrative pelaksanaan proses pembelajaran, team teaching misalnya.

a. Organisasi Kurikulum Berdasarkan Mata Pelajaran (Subjet Curriculum)

Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas empat pola yaitu Separated Curriculum, Boradfield Curriculum, dan Integrated Curriculum :

- 1) Mata Pelajaran Terpisah (Separated Curriculum)

Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan, karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial.

2) Mata Pelajaran Korelasi (Correlated Curriculum)

Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi kurikulum atau materi pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperkaya wawasan siswa.

3) Fusi Mata Pelajaran (Broadfields Curriculum)

Fusi mata pelajaran atau dikenal juga dengan istilah broadfields curriculum adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan, tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif,

manfaat yang didapat dari berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak agar menghasilkan anak yang civilised Ruhimat, T. dkk, (2009: 87). Beberapa disiplin ilmu sejenis disatukan dalam satu mata pelajaran tertentu.

4) Kurikulum Terpadu

Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu (integrasi) secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternative pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. 15 Pembelajaran yang mungkin digunakan adalah pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, inkuiri, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Pengembangan program pembelajaran perlu dilakukan secara bersama-sama antara siswa dan guru, tetapi sebelumnya guru harus menyiapkan rancangan program pembelajaran sebagai acuan yang perlu dikembangkan bersama-sama dengan siswa atau mungkin dengan masyarakat.

Beberapa bentuk organisasi kurikulum dalam

kategori ini diantaranya:

- a) Kurikulum Inti (Core Curriculum)
- b) Social Function dan Persistent Situations

Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat, dalam social function ini dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topic pembelajaran. Sebagai modifikasi dari social function adalah persistent life situations, kajian substansi dalam kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. Karakteristiknya adalah situasi yang diangkat senantiasa yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.

- c) Experience atau Activity Curriculum

Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa.

Ada empat tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity curriculum, diantaranya:

- (1) Construction on creative project.
Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan ide-ide atau

merealisasikan suatu ide dalam suatu bentuk tertentu.

- (2) *Appreciation on enjoyment project*. Pembelajaran ini bertujuan menikmati pengalaman pengalaman dalam bentuk apresiasi atau estetis atau estetika.
- (3) *The problem project*. Pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat intelektual tetapi ada substansi keterampilannya (vokasional).
- (4) *The drill or specific project*. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan.

1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan

Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu:

A. Standar isi,

- B. Standar proses,
- C. Standar kompetensi lulusan,
- D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- E. Standar sarana dan prasarana,
- F. Standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
- G. Standar penilaian pendidikan.

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 2006 (versi KTSP), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum operasional yang disusun oleh guru di setiap tingkatan satuan pendidikan berdasarkan kebutuhannya. Kurikulum ini dikembangkan atas dasar perbedaan karakteristik dari setiap tingkat satuan pendidikan.

Soal Pilihan Ganda

1. Menurut Ruhimat, Model pengembangan

kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur?
kecuali..

- a. Mengevaluasi
 - b. Mendisain
 - c. Menerapkan
 - d. Menulis
2. Apa saja model perkembangan kurikulum?
kecuali...
- a. Model Tyler
 - b. Model Demonstrasi
 - c. Model Taba
 - d. Model Nicholls
3. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah (*top down*) atau staff lini (*line-staff procedure*), model menurut?
- a. Model Administratif
 - b. Model Tyler
 - c. Model Taba
 - d. Model Nicholls
4. Aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Tyler, kecuali?
- a. hakikat peserta didik
 - b. pandangan para ahli bidang studi
 - c. kehidupan masyarakat masa kini

- d. Menentukan proses pembelajaran
5. (1)Menguji unit eksperimen. (2)Mengadakan revisi dan konsolidasi (3)Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. (4)Implementasi dan desiminasi (5)Pengembangan keseluruhan kurikulum (*developing' a framework*). Dari langkah-langkah diatas urutkan dengan benar?
- 1,2,3,4,5
 - 2,4,5,3,1
 - 3,1,2,5,4
 - 1,3,5,4,2
6. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai innovator dalam pengembang kurikulum merupakan karakteristik dalam model?
- Model Taba
 - Model Saylor
 - Model Dynamic Skilbeck
 - Model Tyler
7. Analisis sesuatu, menentukan tujuan khusus, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, menentukan dan organisasi metode, evaluasi. Dari langkah-langkah tersebut menurut model?
- Dynamic Skilbeck
 - Tyler

- c. Taba
 - d. Nicholls
8. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas...pola?
- a. 1
 - b. 3
 - c. 2
 - d. 4
9. 15 Pembelajaran yang mungkin digunakan adalah pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, inkuiri, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Salah satu pengertian dari?
- a. Kurikulum Terpadu
 - b. Mata Pelajaran Terhubung
 - c. Fusi Mata Pelajaran
 - d. Mata Pelajaran Terpisah
10. a) standar isi, b) standar sarana dan prasarana, c) standar proses, d) standar kompetensi lulusan, e) standar penilaian pendidikan. f) standar pendidik dan tenaga kependidikan, g) standar pengelolaan, standar pembiayaan, Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan. Susunan yang benar adalah?

- a. a,b,c,d,e,f,g
- b. c. a,c,d,f,b,g,e
- c. b,c,d,a,e,g,f
- d. d. g,f,e,d,c,b,a

BAGIAN KESEPULUH PERANAN IT DALAM MANAJEMEN KURIKULUM

Bahasan :

- Peran IT dalam Implementasi Kurikulum
- Analisis Manajemen Kurikulum

TUJUAN

Mahasiswa memahami Peranan dan aplikasi IT

dalam manajemen kurikulum

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran:

Mampu menganalisis peranan dan fungsi, serta dapat mengaplikasi IT dalam manajemen kurikulum..

Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran:

Mengembangkan dan meningkatkan potensi, efektivitas, mendesain dan mengontrol implementasi kurikulum.

BAB X

PERANAN IT DALAM MANAJEMEN KURIKULUM

A. Peran IT dalam Implementasi Kurikulum

Peran IT dapat dianalisis dari beberapa pendapat ahli tentang IT sebagai berikut:

1. Menurut Alter, Martin dan Lucas yang dikutip oleh Abdul Kadir, teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data.⁸⁴
2. Menurut wawan wardiana⁸⁵ mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan.

⁸⁴Abdul Kadir. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi h. 13

⁸⁵wawan wardiana. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia dengan Microsoft SQL* Yogyakarta: Andi Offset. h. 34

3. Menurut Abdul Kodir⁸⁶ bahwa teknologi informasi digolongkan mejadi dua, yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras menyangkut pada peralatan yang bersifat fisik, seperti memory, printer, juga keyboard. Sedangkan perangkat lunak terkait dengan intruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan itruksi tersebut.

Ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta alam, dan melestarikan pengetahuan tersebut secara konsepsional dan sistematis. Sedangkan teknologi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan. Karena hubungan tersebut maka perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dengan perkembangan teknologi, demikian pula sebaliknya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai ciri eksponensial yaitu semakin lama semakin cepat, karena hasil dari suatu tahap menjadi dasar dan alasan bagi tahap selanjutnya.

Proses dan produk teknologi yang dihasilkan, tidak semuanya dapat dimanfaatkan dan secara

⁸⁶Abdul Kodir. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi h. 14.

relevan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan terutama untuk proses dan hasil pembelajaran. Teknologi informasi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik terutama komputer.

Makna teknologi informasi tersebut belum menggambarkan secara langsung kaitannya dengan sistem komunikasi, namun lebih pada pengolahan data dan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika yang lebih menekankan pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi, sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki tiga fungsi utama yang berkaitan dengan kurikulum, yaitu :

a. teknologi berfungsi sebagai alat

Dalam hal ini tidak digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat

unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk peserta didik, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan dan sebagainya.

- b. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau science

Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran tik sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasi siswa semua kompetensinya.

- c. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literacy.

Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi.

Dalam hal ini posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai, fasilitator,

motivator, transmitter, dan sebagai evaluator.

Sebagai bagian dari pembelajaran, teknologi, TI memiliki tiga kedudukan, yaitu :

2. Peran tambahan

Dikatakan berfungsi sebagai tambahan, apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui TI atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui TI.

Sekalipun sifatnya hanya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Walaupun materi pembelajaran melalui TI berperan sebagai suplemen, para dosen /guru tentunya akan senantiasa mendorong, menggugah, atau menganjurkan para peserta didiknya untuk mengakses materi pembelajaran melalui ti yang telah disediakan.

2. Fungsi pelengkap (komplemen)

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen (pelengkap), apabila materi pembelajaran

melalui TI diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran melalui TI diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement (pengayaan) yang bersifat enrichment atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.

3. Fungsi pengganti (substitusi)

Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran/perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran/perkuliahannya sehingga para mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahannya.

Sehubungan dengan hal ini, ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih para mahasiswa, yaitu apakah mereka akan mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan secara konvensional (tatap muka) saja, atau sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan sepenuhnya

melalui internet.

Alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih oleh para mahasiswa tidak menjadi masalah dalam penilaian. Artinya, setiap mahasiswa yang mengikuti salah satu model penyajian materi perkuliahan akan mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama.

Jika mahasiswa dapat menyelesaikan program perkuliahannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui internet, atau bahkan melalui perpaduan kedua model ini, maka institusi penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama.

Keadaan yang sangat fleksibel ini dinilai sangat membantu para mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian perkuliahannya. Para mahasiswa yang belajar pada lembaga pendidikan konvensional tidak perlu terlalu khawatir lagi apabila tidak dapat menghadiri kegiatan perkuliahan secara fisik karena berbenturan dengan kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan atau ditangguhkan.

Apabila lembaga pendidikan konvensional tersebut menyajikan materi

pembelajaran yang dapat diakses para mahasiswa melalui internet, maka mahasiswa dapat mempelajari materi perkuliahan yang terlewatkan tersebut melalui internet.

Hal demikian dapat terjadi karena para mahasiswa diberi kebebasan mengikuti kegiatan perkuliahan yang sebagian disajikan secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet (model pembelajaran kedua). Di samping itu, para mahasiswa juga dimungkinkan untuk tidak sepenuhnya menghadiri kegiatan perkuliahan secara fisik. Sebagai penggantinya, para mahasiswa belajar melalui internet (model pembelajaran ketiga).

B. Analisis Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum dan pembelajaran diarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum agar proses belajar mengajar memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan guru.

Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. Untuk ketercapaian program kurikulum dan pembelajaran yang efektif,

Kepala Sekolah beserta guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional kedalam program tahunan, catur wulan dan bulanan.

Agar proses belajar mengajar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetaopkan, maka langkah-langkah dalam pelaksanaan kurikulum disekolah perlu diperhatikan. Tahapan pelaksanaan kurikulum disekolah melalui 4 tahap yaiu :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi Rencana Pembelajaran (RP). Guru melakukan persiapan yang komprehensif sebelum belajar mengajar dikelas. Pada tahap ini guru melakukan persiapan dari mulai tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode yang tepat yang akan digunakan, media dan alat yang mendukung proses pembelajaran, buku atau sumber referensi, dan alat evaluasi yang akan diterapkan.

Dalam tahap perencanaan ini pula perlu dipahami hal-hal sebagai berikut: menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata pelajaran (AMP), memiliki kalendr akademik, menyusun program tahunan (Prota), menyusun program catur wulan (Proca), Program Satuan Pembelajaran (PSP), Rencana Pengajaran (RP).

2. Tahap Pengorganisasian dan Koordinasi

Pada tahap perencanaan seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran disiapkan secara matang dan menyeluruh agar pada tahap pengorganisasian dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Pada tahap pengorganisasian dan koordinasi ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala sekolah beserta tim yang dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan apakah sekolah dibawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi yang telah disusun akan dibuktikan keberhasilannya dalam tahap pelaksanaan ini. Proses belajar mengajar akan berjalan secara efektif apabila guru dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran.

Mutu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila guru dan kepala sekolah bersama- sama untuk membuka diri terhadap

masukan atau kritikan yang membangun. Sebagai guru harus siap diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Begitupun kepala sekolah harus memiliki jadwal yang jelas dan rinci untuk melakukan supervisi terhadap kinerja guru.

Hasil supervisi kepala sekolah menjadi fakta dan data yang benar untuk memberikan informasi kepada guru berkaitan dengan tugas yang di kerjakannya selama di sekolah. Apabila kepala sekolah memiliki fakta dan data yang berkaitan dengan kinerja guru maka guru akan menerima dengan terbuka terhadap masukan yang disampaikan oleh kepala sekolah.

Sebaliknya apabila kepala sekolah tidak melakukan supervisi (tidak berdasarkan fakta dan data) yang diperoleh langsung oleh kepala sekolah, maka masukan yang diberikan oleh kepala sekolah tidak valid dan berpengaruh negative terhadap kinerja guru. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru akan terbuka dalam memberikan masukan atau kesulitan yang dihadapi dengan tujuan untuk kemajuan dan peningkatan mutu pembelajaran.

4. Tahap Evaluasi dan pengendalian

Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini penting dilakukan secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Guru perlu menetapkan jenis evaluasi apa yang akan digunakan dan hasil evaluasi apa yang diharapkan, yang kemudian memiliki pengaruh dan dampak terhadap perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran selanjutnya. Evaluasi akan memberikan dampak dan manfaat bagi guru dan peserta didik untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi juga dapat menjadi umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya.

ESSAY

1. Apa yang dimaksud dengan IT ?
2. Jelaskan pengertian Teknologi Informasi menurut Williams dan Sawyer (2003) !

3. Sebutkan fungsi utama yang berkaitan dengan kurikulum ?
4. Jelaskan tahapan pengorganisasian dan koordinasi !
5. Sebutkan tahapan apa saja yang dibuat untuk kurikulum sekolah ?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Idi. 2007. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Pratik*. Ar RUZZ:
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kristiawan, Muhammad dkk. 2017. *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kristiawan, Muhammad, *Manajemen pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Rusman, *Mengemukakan prinsip-prinsip KTSP* (Yogyakarta: Deepublish, 2011), hlm. 77
- Rusman, *Manajemen kurikulum* (Yogyakarta: Deepublish, 2011), hlm. 77
- Lestari, Rena. *Siklus manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2006), hlm. 7
- Triwiyanto, Teguh (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pengembangan*. Aksara: Jakarta
- Rusman (2009). *Manajemen Kurikulum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Hamalik, Oemar (2007). *Dasar-Dasar Kurikulum*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Saefullah, Asep dan Rusdiana, Ahmad. (2016). *Perubahan*. Pustaka setia: Bandung
- Engkoswara dan A. Komariah. 2010. *Administrasi* Bandung Alfabeta
- Hamalik, Oemar. 2007. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Idi, Abdullah. 2011. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Imron, Ali. 2013. *Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan* Jakarta Bumi Aksara
- Rusman. 2011. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetopo Hendyat dan W. Soemanto. 1991. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development, Theory, and Practice*. New York: Hercout, Brace and World.
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rohiat, 2008, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar Dan Praktik* Bandung. Refika Aditama
- Kompri, 2014, *Manajemen Sekolah; Teroti Dan Praktek*. Bandung. Alfabeta
- Karwati Euis, Dan Priansa Doni Juni, 2014, *Manajemen Kela: Classroom Management*. Bandung. Albeta
- Rusman, *Manajemen kurikulum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008
- Kunandar, *Guru Profesional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Kompri,

- Manajemen Sekolah*, Jambi: Alfabeta, 2014.
- Hamalik. (2007). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa. (2006). *Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rusman. (2008). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada
- Sukmadinata. (2010). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya
- Nurdin dan Usman. (2003) *Guru Professional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta : Ciputat Press.
- Muhammad, Zaini. (2009). *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Teras
- Azwar, Muhammad. (2016). "*peranan Perpustakaan Sekolah dalam Mendukung Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 1 Sinjai tengah*"
- Husni, Karna. (2015). *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta
- Karwati dan Priansa Doni Joni. (2014). *Manajemen Kelas*. Bandung: Alfabeta
- Rohiat. (2008). *Manajemen Sekolah Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama

- Triwiyanto, Teguh. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafaruddin, Amiruddin. (2017). *Manajemen Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing
- Sanjaya, W. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Sukmadinata, N.S. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung. Kesuma Karya.
- Sahertian, Piet. 1986. *Manajemen Sekolah*. Malang: Malang.
- Suryosubroto. 2010. *Manajemen pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan pelatihan Pegawai.
- Triwiyanto, Teguh. 2015. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Soetopo, Hidayat dan Wasty Soemarno. 1993. *Pembinaan Pengembangan Kurikulum : sebagai substansi problem administrasi pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hernawan, A. H., dkk. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ruhimat, Toto, dkk. (2009). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung Jurusan

Kurtekpen.

Ali, M, dkk.(2017). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan:
Bandung: FIP UPI Press